

MMXXII



# LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPOM

# 2022



**Yudianto, ST., MT., MPP**  
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (2021 - 2022)

MMXXII



# LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPOM

# 2022



☎ 021-4241646

✉ rorenkeu@pom.go.id

🌐 <https://sites.google.com/view/rorenkeu-bpom/>

# KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi di Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sepanjang tahun 2022.

Laporan Tahunan disusun dengan tujuan sebagai media bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi pelaksanaan kegiatan yang komprehensif di Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2022. Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan Tahunan ini berisikan narasi dan uraian, gambar, grafik dan tabel hasil kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2022. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai dasar dan gambaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keberhasilan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mengemban tugas dan amanatnya sangat didukung oleh peran aktif pimpinan dan seluruh staf di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan serta kerjasama yang baik dengan seluruh unit kerja di Badan POM.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, maka kami mengharapkan masukan, saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kami berharap semoga Laporan Tahunan 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama dan pemangku kepentingan terkait.

Jakarta, 31 Maret 2023

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Denny Alan, S.Kom



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI .....	1
VISI .....	1
MISI .....	1
BUDAYA ORGANISASI .....	2
1.2 TUGAS POKOK, PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI .....	3
TUGAS POKOK .....	3
PERUBAHAN SOTK .....	4
FUNGSI.....	6
<b>BAB 2: PENGELOLAAN SUMBER DAYA .....</b>	<b>8</b>
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA .....	8
2.1.1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
2.1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	9
2.1.3 Data Pegawai Berdasarkan Usia.....	10
2.1.4 Kebutuhan Pegawai .....	10
2.1.5 Peningkatan Kompetensi SDM.....	12
2.2 SURAT MENYURAT .....	17
2.3 sarana dan prasarana .....	18
<b>BAB 3: CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Indikator Kinerja Utama .....	21
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
<b>BAB 4: KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2022 .....</b>	<b>27</b>
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan .....	27
IKU 1: Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas.....	27



A. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021	27
B. Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP dan Monev Online Tahun 2022	31
C. Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 di Bali	34
IKU 2: Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	35
A. Pengembangan <i>E-performance</i>	35
B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, kegiatan, dan Reformasi Birokrasi	38
C. Pengembangan aplikasi e-planning SIMETRIS	40
IKU 3: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	41
A. Rapat Koordinasi Pimpinan terkait monitoring kinerja dan realisasi anggaran	41
B. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/ Balai POM	44
C. Bimtek Penyusunan PK dan RAPK Unit Organisasi/Satker melalui aplikasi <i>e-planning</i> SIMETRIS	47
D. Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM	47
E. Sarasehan Pejabat Fungsional Perencana Dengan Ibu Kepala Badan POM	49
IKU 4: Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	50
A. Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja Badan POM	50
B. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	52
C. FGD IKPA dan Indikator Capaian Output	55
D. Workshop Digital Payment dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah	57
IKU 5: Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	58
A. Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Balai)	58
B. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM	59
C. FGD Laporan Keuangan BPOM	61
D. Koordinasi Pembentukan UAPPA Wilayah	63
E. Workshop Laporan Keuangan	63
F. Pengelolaan PNBPN Fungsional dan Penyusunan Laporan PNBPN Badan POM	63
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	65



IKU 6: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan .....	65
A. Survei Kepuasan Internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan .....	65
B. Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.....	68
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman.....	69
IKU 7: Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER terhadap pedoman .....	69
A. Penyusunan Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM.....	69
B. Penyusunan Petunjuk Operasional (Jukop) Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan TA 2023 .....	71
C. Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2022 di Jakarta.....	72
D. Pemantauan Mekanisme Penganggaran di BB/BPOM .....	74
E. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait.....	75
F. Penyiapan Bahan dan Pengawasan RDP dengan Mitra Kerja Badan POM ....	75
G. Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor .....	76
H. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) .....	76
I. Workshop Penganggaran Kegiatan Terpadu Pusat dan UPT BPOM .....	77
J. Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2022 .....	78
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM .....	79
IKU 8: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.....	79
A. Penyusunan Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2021.....	79
B. Refleksi Akhir Tahun 2022 dan <i>Outlook</i> 2023 .....	81
C. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Tahun 2022 .....	84
D. Penyerahan DIPA Petikan BPOM 2023 .....	85
E. Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Renstra BPOM 2020-2024.....	86



F.	Penyusunan <i>Grand Design</i> Pengawasan Obat dan Makanan 2045 .....	88
G.	Penyusunan Rencana Kerja BPOM Tahun Anggaran 2023.....	89
H.	Pengembangan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan ..	92
I.	Rebranding Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).....	93
J.	Forum Konsultasi dengan Pakar Gender .....	94
K.	Studi Tiru Praktek Baik Implementasi Pengarusutamaan Gender.....	95
L.	Pelatihan PPRG .....	95
M.	Intensifikasi Penyediaan Data Terpilah.....	96
N.	Pelatihan Pengelolaan Data Gender .....	98
O.	Kerjasama Penggunaan E-Learning PPRG dari Pusdiklat AP Kementerian Keuangan .....	98
P.	Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) BPOM .....	98
Q.	Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik BOK POM .....	100
R.	Pengelolaan Hibah .....	103
S.	Penguatan Kelompok Kerja.....	106
T.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM Tahun 2023.....	107
IKU 9:	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.....	108
A.	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022.....	108
B.	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama Tahun 2022	109
C.	Laporan Tahunan Biro PErencanaan dan keuangan tahun 2021.....	110
Sasaran Kegiatan 5:	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan .....	111
IKU 10:	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan.....	111
A.	Koordinasi Biro Perencanaan dan Keuangan Lintas Sektor .....	112
B.	Koordinasi Penyiapan Bahan Substansi Kepala BPOM .....	112
C.	Pendampingan Kegiatan Strategis Kepala BPOM.....	113
D.	Pemantauan tindak lanjut arahan kepala bpom dan monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan (PSP) .....	114
E.	Pemantauan tindak lanjut arahan kepala bpom .....	115



Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif .....	116
IKU 11: Indeks Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	116
A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 .....	116
Sasaran Kegiatan 7: Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal .....	119
IKU 12: Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan .....	119
A. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022.....	119
B. Pelatihan <i>PERSONAL RESILIENCY FOR BETTER PERFORMANCE IN DIGITAL ERA</i> (2 Juni 2022).....	121
Sasaran Kegiatan 8: Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan.....	123
IKU 13: Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik.....	123
A. Pemeliharaan Alat Pengolah Data Tahun 2022 .....	123
B. Data Pemanfaatan Email <i>Corporate</i> (mail.pom.go.id) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022.....	124
Sasaran Kegiatan 9: Terkelolanya Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel.....	126
IKU 14: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan .....	126
A. Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran .....	126
B. Monev Triwulan (Evaluasi Internal Biro Perencanaan dan Keuangan) tahun 2022 .....	127
Bab 5: PENUTUP.....	129



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan (Semula)...	4
Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2022.....	9
Gambar 2. 3 Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2022.....	10
Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2010-2022 .....	10
Gambar 2. 5 Grafik Data Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2022.....	17
Gambar 3. 1 Grafik % Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018-2022.....	26
Gambar 4. 1 Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.....	28
Gambar 4. 2 Bimtek SAKIP dan Monev Online Juni 2022.....	31
Gambar 4. 3 RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2022 DI BALI .....	34
Gambar 4. 4 Kepala Badan POM Berfoto bersama pada Rakernas Tahun 2022 di Bali .....	35
Gambar 4. 5 Penambahan Fitur Kendala dan Tindak Lanjut dan Fitur Download SIMAKIN.....	36
Gambar 4. 6 Penambahan Fitur Pohon Kinerja Pada Menu Dashboard.....	37
Gambar 4. 7 Integrasi SAKTI pada Menu Realisasi Anggaran.....	38
Gambar 4. 8 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun 2022 .....	39
Gambar 4. 9 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan.....	39
Gambar 4. 10 Tampilan RAPK versi detail.....	40
Gambar 4. 11 Tampilan <i>Report Tagging</i> .....	40
Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Muka SIMETRIS dengan domain pom.go.id .....	41
Gambar 4. 13 Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan .....	41



Gambar 4. 14 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rakorpim.....	42
Gambar 4. 15 Sesi Pemaparan oleh Unit Kerja dan Sesi Diskusi serta Pemberian Arahan .....	43
Gambar 4. 16 Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan: (A) Regional Kalimantan-Sulawesi, (B) Regional Jawa, (C) Regional Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan, (D) Regional Sumatera.....	46
Gambar 4. 17 Sosialisasi <i>hibrid</i> Penyusunan PK 2023 di Jakarta pada (7 Desember 2022).....	47
Gambar 4. 18 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM .....	48
Gambar 4. 19 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM.....	48
Gambar 4. 20 Pelatihan High Class Response Perencana BPOM .....	49
Gambar 4. 21 Sarasehan Pejabat Fungsional Perencana Dengan Ibu Kepala Badan POM.....	50
Gambar 4. 22 Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2022 .....	51
Gambar 4. 23 Dokumentasi pembinaan pelaksanaan anggaran: (A) BPOM di Ambon, (B) Loka POM di Kab. Kediri, (C) Loka POM di Kab. Sorong, dan (D) BBPOM Banda Aceh.....	54
Gambar 4. 24 Workshop evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA) dan Sosialisasi OMSPAN atas IKPA serta mekanisme pelaporan dan monev capaian output pada Aplikasi SAKTI tahun 2022.....	56
Gambar 4. 25 Workshop Digital Payment dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah .....	58
Gambar 4. 26 <i>Sharing Knowledge</i> kepada petugas di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).....	58
Gambar 4. 27 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.....	59
Gambar 4. 28 Penyusunan LK TA 2021 Unaudited (24 s.d 29 Januari 2022).....	60
Gambar 4. 29 Penyusunan Laporan Keuangan TW III TA via Zoom.....	61
Gambar 4. 30 Laporan Keuangan BPOM TA 2021 (Audited).....	61
Gambar 4. 31 Laporan Hasil Survey Kepuasan Layanan Tahun 2022 .....	67
Gambar 4. 32 Nilai Indeks IPP-IPAK Tahun 2022.....	68



Gambar 4. 33 Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM .....	70
Gambar 4. 34 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan dalam rangka Sosialisasi Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM pada tanggal 20 Desember 2022 .....	70
Gambar 4. 35 Finalisasi Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2023 .....	71
Gambar 4. 36 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2022 .....	72
Gambar 4. 37 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2022 .....	73
Gambar 4. 38 Asistensi Anggaran BBPOM Ambon (17-19 Oktober 2022).....	74
Gambar 4. 39 Asistensi Anggaran BBPOM Banjarmasin (13-15 Juli 2022).....	74
Gambar 4. 40 Asistensi Anggaran BBPOM Denpasar (23 Desember 2022).....	74
Gambar 4. 41 Kegiatan Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2023 .....	77
Gambar 4. 42 Foto Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Tanggapan Terhadap Usulan Kegiatan Terpadu TA 2023 .....	77
Gambar 4. 43 Buku Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2021 .....	79
Gambar 4. 44 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan	84
Gambar 4. 45 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2022 .....	85
Gambar 4. 46 Kegiatan Penyerahan DIPA Petikan BPOM 2023 .....	86
Gambar 4. 47 Pembahasan evaluasi paruh waktu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 bersama Unit Kerja di Lingkungan BPOM, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Agustus 2022. ....	87
Gambar 4. 48 Pembahasan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045 bersama Kepala BPOM, Pejabat Tinggi Madya, dan Pejabat Tinggi Pratama.....	88
Gambar 4. 49 Pembahasan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045.....	89
Gambar 4. 50 Trilateral Meeting Tahap I Penyusunan.....	89
Gambar 4. 51 Trilateral Meeting Tahap II Penyusunan.....	91
Gambar 4. 52 Pembahasan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan.....	92



Gambar 4. 53 Pembahasan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan .....	93
Gambar 4. 54 Pembahasan dengan pakar Gender.....	94
Gambar 4. 55 Surat Edaran Tentang Penyediaan Data Terpilah.....	95
Gambar 4. 56 Screenshoot Studibanding dengan KLHK terkait implemetasi PUG.....	95
Gambar 4. 57 Kegiatan pemantapan pemahaman PUG tingkat dasar dan menengah bersama pakar yang diikuti Satker Pusat luring di Aryaduta Hotel .....	96
Gambar 4. 58 Kegiatan Pelatihan bersama JF Perencana, JF Auditor dan JF Widyaiswara/PFM Madya.....	96
Gambar 4. 59 Screenshoot kegiatan sosialisasi Penyediaan Data Terpilah .....	97
Gambar 4. 60 kegiatan pemantapan materi Data Terpilah melalui zoom meeting bersama pakar pada 14 Juli 2022 .....	97
Gambar 4. 61 Screenshoot zoom meeting 20 September 2022 .....	97
Gambar 4. 62 Foto Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Data Gender.....	98
Gambar 4. 63 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM .....	99
Gambar 4. 64 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-20223.....	99
Gambar 4. 65 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2023 .....	100
Gambar 4. 66 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan Dinas Kab/Kota .....	101
Gambar 4. 67 Pertemuan moneyv DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2022 .....	101
Gambar 4. 68 Perbandingan Realisasi DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2022 .....	102
Gambar 4. 69 Siklus Hibah.....	104
Gambar 4. 70 Monitoring dan Evaluasi Hibah.....	104
Gambar 4. 71 Kegiatan Pertemuan POKJA PUG BPOM yang dilakukan secara hybrid pada 4 Oktober 2022 .....	106
Gambar 4. 72 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2023. ....	107
Gambar 4. 73 Buku Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 .....	108



Gambar 4. 74 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2023.....	110
Gambar 4. 75 LAPTAH BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2021 .....	110
Gambar 4. 76 Pendampingan Karokenkeu dalam kegiatan Perjalanan Dinas ke Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022 (A. Batam, B. Lampung, C. Nusa Dua (Bali), D. Banjarmasin, E. Semarang, F. Surabaya).....	112
Gambar 4. 77 Sebaran Keterkaitan Topik Bahan Kegiatan Kepala BPOM tahun 2022 per Satker (N = 188).....	113
Gambar 4. 78 Workshop Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan.....	115
Gambar 4. 79 Profil Sebaran Tindak Lanjut Arahan Kepala BPOM per Satker .....	115
Gambar 4. 80 Profil Sebaran PSP per Satker.....	116
Gambar 4. 81 Hasil evaluasi PMPZI pada Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 .....	117
Gambar 4. 82 Pelatihan PERSONAL RESILIENCY FOR BETTER PERFORMANCE IN DIGITAL ERA (2 Juni 2022 – Hotel Aryaduta).....	122
Gambar 4. 83 Data Pemeliharaan APD Tahun 2022 .....	124
Gambar 4. 84 Indeks Pemanfaatan per Triwulan .....	124
Gambar 4. 85 Indeks Pemanfaatan Email Rorenkeu 2022.....	125
Gambar 4. 86 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Rorenkeu selama Tahun 2022 .....	125
Gambar 4. 87 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	126
Gambar 4. 88 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan IV 2022 .....	128
Gambar 4. 89 Dokumentasi Rapat Evaluasi Internal TW IV 2022 .....	128



## DAFTAR TABEL

---

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022....	11
Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022.....	13
Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	21
Tabel 3. 2 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022.....	23



# LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

## 2022



## BAB 1: PENDAHULUAN

### 1.1. VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024 sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:

#### VISI

*“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

#### MISI

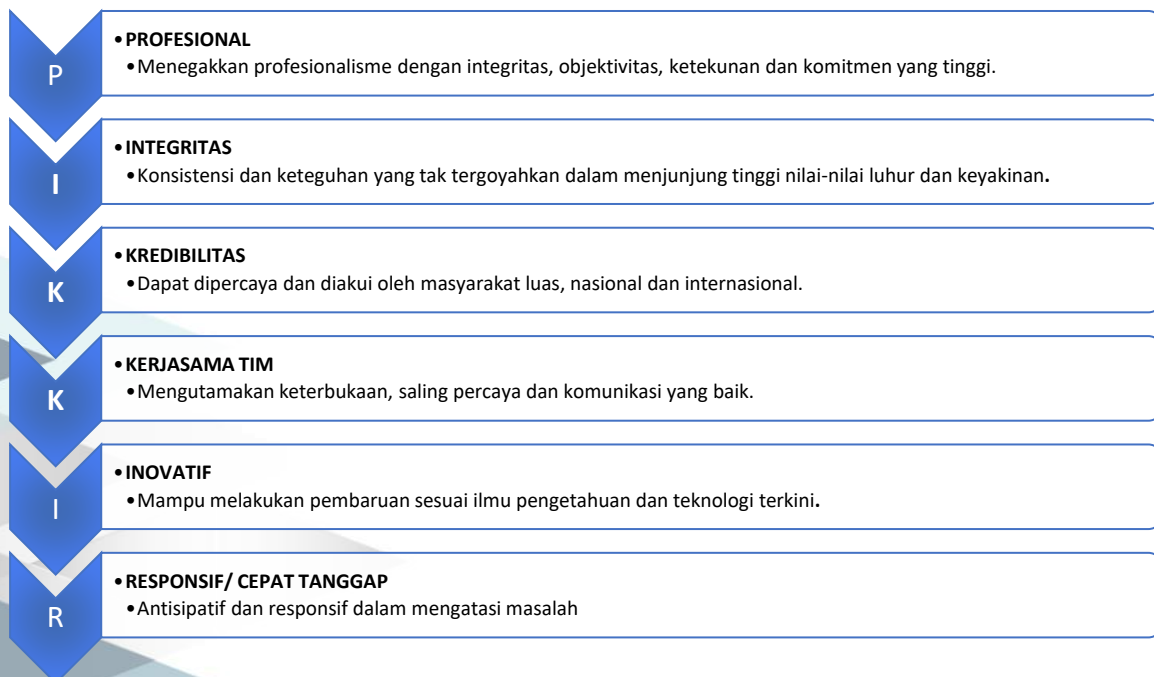
- ❖ Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- ❖ Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- ❖ Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- ❖ Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan



## BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit penunjang menggunakan misi Badan POM untuk melakukan perencanaan tahunan maupun 5 (lima) tahunan dan memastikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Badan POM tertuang dalam dokumen perencanaan serta ketersediaan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai koordinator dan fasilitator harus memastikan bahwa semua sumber daya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi. Kinerja organisasi dipantau dan diukur baik indikator *output* maupun indikator *outcome* secara periodik. Mengingat sumber daya terbatas, Biro Perencanaan dan Keuangan harus bijaksana menetapkan prioritas, berdasarkan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan. Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, diperlukan Budaya Organisasi.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya. Budaya organisasi dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:





## 1.2 TUGAS POKOK, PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI

### TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.

Tugas Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perencanaan, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, serta koordinasi bahan substansi strategis pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian fungsi organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional. Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan urusan daerah, dan pengelolaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- e. penyiapan bahan koordinasi substansi strategis pimpinan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, analisis dan penyusunan laporan keuangan, pemantauan dan evaluasi



- penyelenggaraan sistem akuntansi, dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

### PERUBAHAN SOTK

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM, khususnya pada unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Terutama setelah dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Badan POM. Terdapat perubahan bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, semula sebagai berikut:



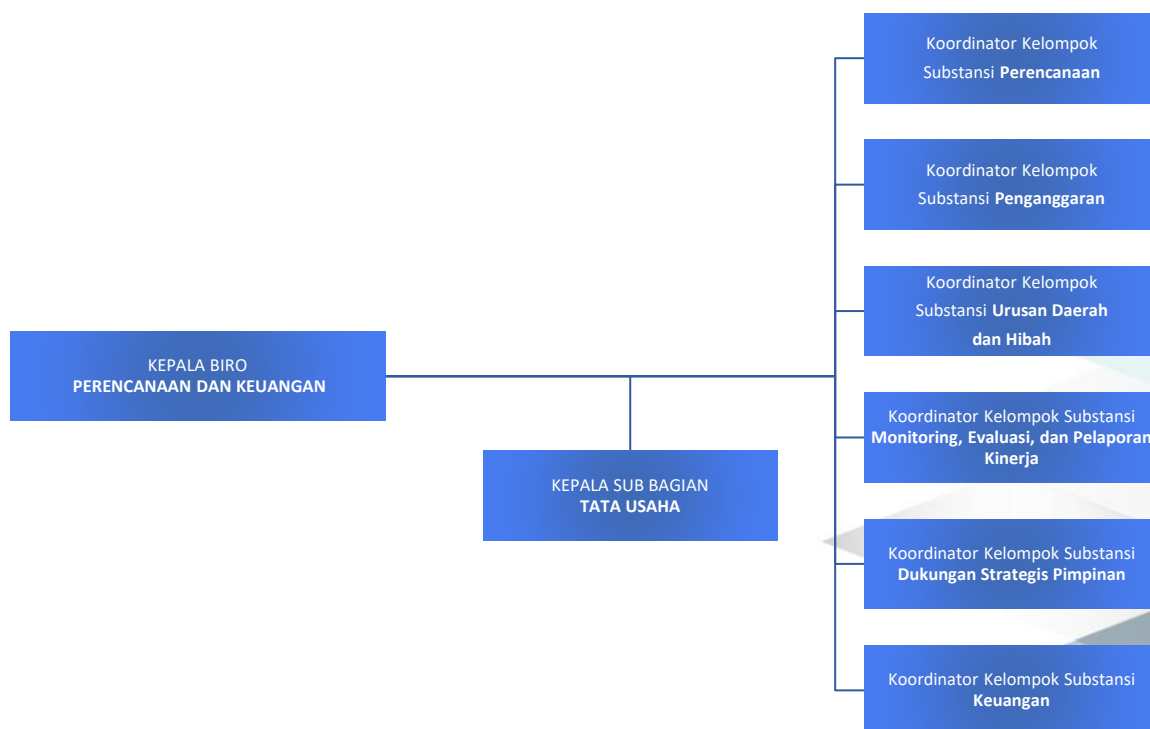
Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan (Semula)



Pada bulan April 2022 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengeluarkan Surat Penugasan Koordinator pada Biro Perencanaan dan Keuangan nomor KP.07.21.216.04.22.232, berdasarkan tindak lanjut dari Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149. Untuk selanjutnya disebut Koordinator Kelompok Substansi dan memiliki peran sebagai berikut:

1. Koordinator melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
2. Koordinator memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Koordinator bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan Kelompok Substansi dan unit kerjanya.
4. Koordinator mempunyai peran untuk memberikan masukan penilaian kinerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang berada di bawah koordinasinya untuk dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural lainnya sebagai pejabat penilai kinerja.

Dengan begitu ada penyesuaian pada Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan (Menjadi)



Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2022, kemudian dalam melaksanakan fungsinya Biro Perencanaan dan Keuangan dibagi menjadi:

1. **Kelompok Substansi Perencanaan**
2. **Kelompok Substansi Penganggaran**
3. **Kelompok Substansi Urusan Daerah dan Hibah**
4. **Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja**
5. **Kelompok Substansi Keuangan**
6. **Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan**
7. **Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.**

1. **Kelompok Substansi Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka Panjang
- ❖ Penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana tahunan atau jangka pendek.

2. **Kelompok Substansi Penganggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

3. **Kelompok Substansi Urusan Daerah dan Hibah** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan urusan daerah, dan pengelolaan pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri.



4. **Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
  - ❖ Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja organisasi di lingkungan BPOM
5. **Kelompok Substansi Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - ❖ Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan
  - ❖ Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM
  - ❖ Penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM
  - ❖ Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. **Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan:
  - ❖ Penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan
  - ❖ Pendampingan kegiatan strategis pimpinan
  - ❖ Penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut arahan Pimpinan
  - ❖ Penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program strategis pimpinan
7. **Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan** berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 15 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, dan administrasi penjaminan mutu biro.



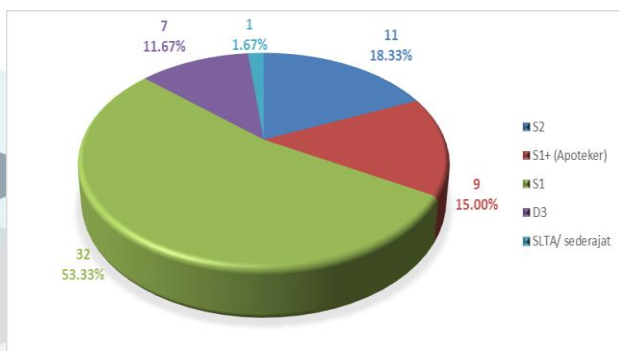
## 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 6 (empat) Kelompok Substansi dengan jumlah pegawai pada tahun 2022 terdiri dari 60 (enam puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 34 (tiga puluh empat) orang pegawai tidak tetap (PPNPN).

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami dampak dari reorganisasi, sehingga terdapat perpindahan pegawai baik dari luar ke dalam maupun dari dalam ke luar Biro Perencanaan dan Keuangan. Pada bulan Januari 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan 1 (satu) orang pegawai dari Biro Sumber Daya Manusia, kemudian bulan Februari 2022, 1 (orang) pegawai pindah ke Loka Tasikmalaya, dan mendapat 1 orang pegawai dari STAN. Kemudian pada bulan Maret 2022, mendapatkan 1 (satu) orang pegawai pindahan dari Inspektorat dan 3 (tiga) orang pegawai CPNS.

### 2.1.1 DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada grafik berikut ini:



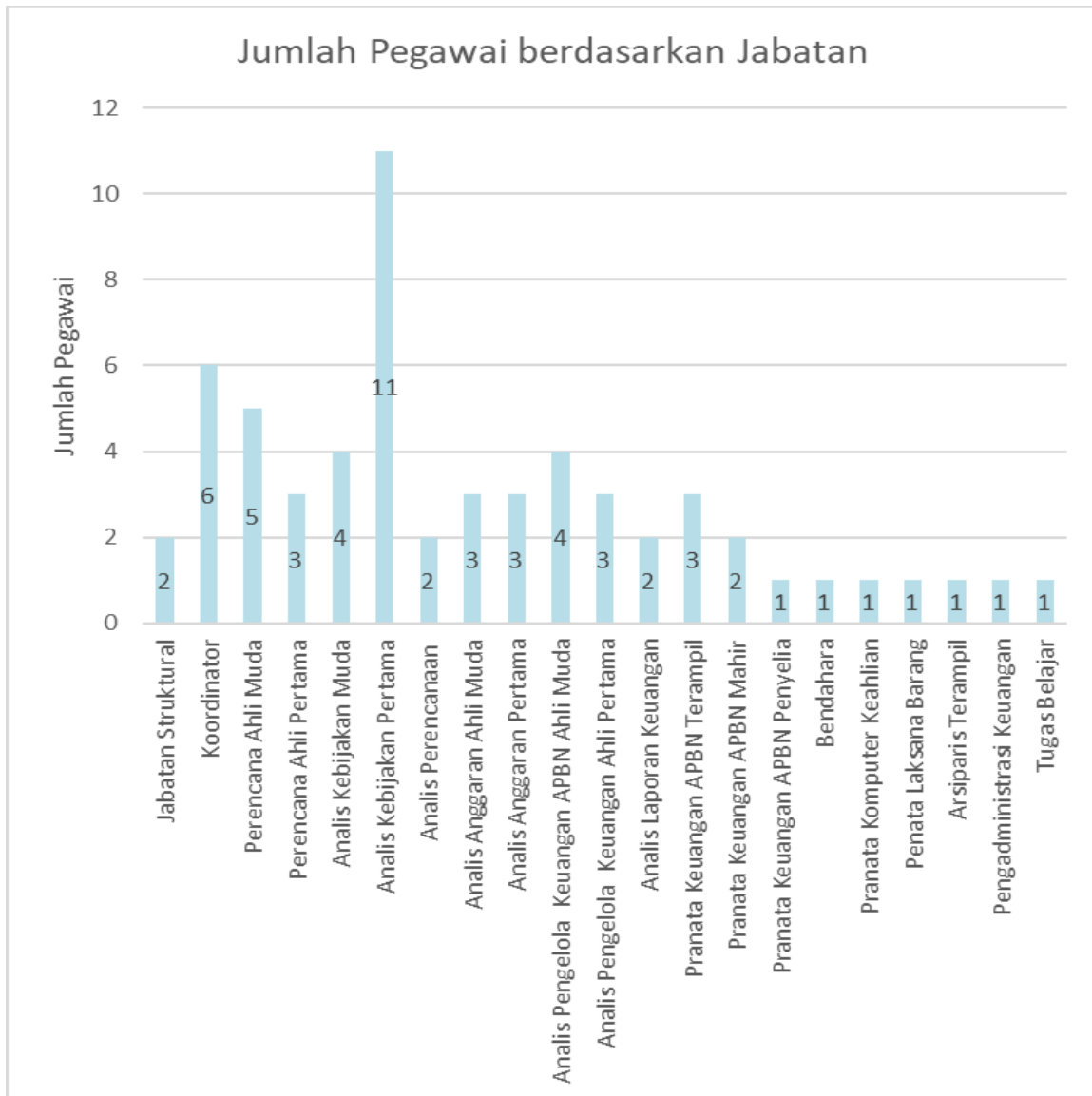
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022. Populasi terbesar pada tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 32 pegawai dengan persentase 53,33 % dari total pegawai.

Gambar 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.1.2 DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Grafik data pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan bahwa dari 60 orang PNS, 2 diantaranya menduduki jabatan struktural, 6 orang koordinator, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Di tahun 2022, terdapat perpindahan pegawai dari Inspektorat dan Biro Sumber Daya Manusia dan mendapatkan pegawai CPNS. Selain perubahan formasi jabatan, ada 1 (satu) pejabat struktural yang mengikuti Tugas Belajar.

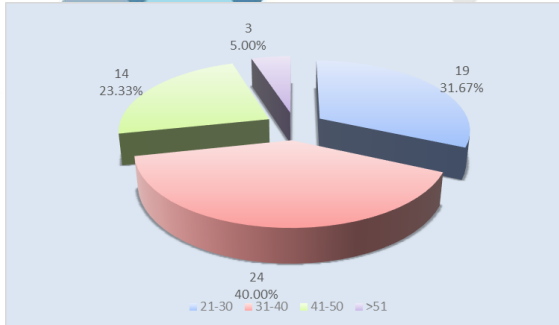


Gambar 2. 2 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2022



### 2.1.3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

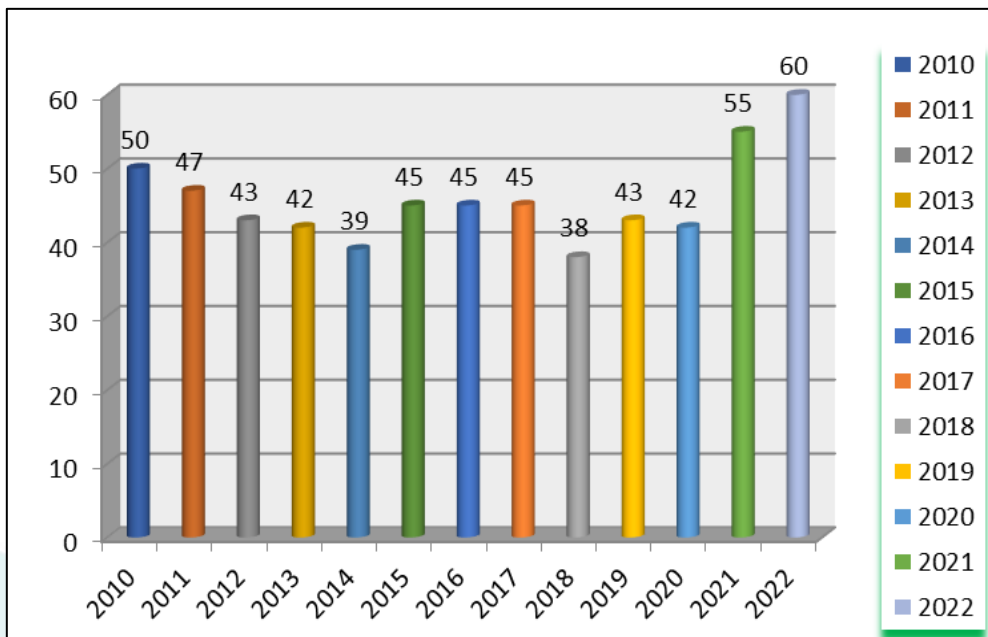
Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan termuda berusia 22 tahun dan tertua 53 tahun dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, populasi terbesar PNS Biro Perencanaan dan Keuangan adalah usia 31-40 tahun yaitu sebesar 49.09%, diikuti oleh kelompok usia 21-30 tahun ke atas yaitu sebesar 32.73%.

Gambar 2. 3 Grafik Persentase Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2022

### 2.1.4 KEBUTUHAN PEGAWAI



Gambar 2. 4 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari Tahun 2010-2022

Pada tahun 2022, dampak dari reorganisasi Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan mendapatkan tambahan pegawai pada struktur organisasi, yaitu bulan Januari 2022 mendapatkan 1 (satu) orang pegawai dari Biro Sumber Daya Manusia. Kemudian di bulan Februari 2022 1 (satu) orang pegawai pindah ke Loka Tasikmalaya, dan mendapatkan 1 (satu) orang pegawai STAN. Pada bulan Maret 2022 Biro Perencanaan mendapatkan pegawai CPNS sebanyak 3 orang pegawai dan mendapatkan pindahan 1



(satu) orang pegawai dari Inspektorat. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami peningkatan jumlah pegawai dari 55 orang pegawai menjadi 60 orang pegawai.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2022, kebutuhan SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	0	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
3	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
4	Arsiparis Penyelia	1	0	1
5	Arsiparis Mahir	2	0	2
6	Arsiparis Terampil	4	1	3
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
8	Pranata Komputer Terampil	1	0	1
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	3	0	3
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	4	4	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	5	3	2
12	Analisis Anggaran Ahli Madya	6	1	5
13	Analisis Anggaran Ahli Muda	9	4	5
14	Analisis Anggaran Ahli Pertama	9	2	7
15	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	0	5
17	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	11	5	6
18	Perencana Ahli Madya	7	2	5
19	Perencana Ahli Muda	10	4	6
20	Perencana Ahli Pertama	17	3	14
21	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
22	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
23	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
24	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1



No	Jabatan	ABK	Bezzeting	Gap
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	1	2
26	Pranata Keuangan APBN Mahir	3	2	1
27	Pranata Keuangan APBN Terampil	3	2	1
28	Analisis Keuangan	3	3	0
29	Bendahara	1	1	0
30	Pelaksana	1	1	0
31	Analisis Anggaran	1	1	0
32	Pranata Komputer Keahlian	1	1	0
33	Penata Laksana Barang	1	1	0
34	Analisis Perencanaan	3	3	0
<b>Total</b>		<b>124</b>	<b>47</b>	<b>77</b>

Untuk mengimbangi semakin beratnya tugas dan tanggung jawab, sementara jumlah PNS terbatas, maka sejak tahun 2013, Biro Perencanaan dan Keuangan merekrut tenaga tambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN/pramubakti) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada 5 (lima) kelompok substansi. Sampai dengan tahun 2022, total pegawai non PNS yang telah direkrut adalah 34 orang.

#### 2.1.5 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab pelaksanaan program dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, yang semakin besar, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan jumlah pegawai saat ini, maka Biro Perencanaan dan Keuangan membuat usulan perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pendidikan pelatihan.

Sebagian besar tugas-tugas perencanaan seperti perencanaan jangka panjang dan strategis, pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, pengembangan metode dan sistem *sampling*, pengembangan sistem pengelolaan data terpadu, serta pengembangan sistem pelaporan membutuhkan analisis yang tajam dan mendalam. Oleh karena itu, disamping memerlukan penambahan jumlah SDM, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial pegawai, baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan. Peningkatan kompetensi yang dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sesuai dengan pedoman kompetensi yang ada.



Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022, dengan memberikan persetujuan pegawai untuk mengikuti Tugas Belajar atas nama Didi Suryadi, S.E. dengan mengambil Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, LAN, Jakarta.

Sedangkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Diklat Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
1	FGD Penyusunan Juklak Anggaran 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta	26 – 27 Januari 2022	11 orang
2	FGD Penyusunan Laporan Kinerja Badan POM Tahun 2021	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Santika Indonesia, Bekasi	3 - 4 Februari 2022	11 orang
3	Workshop Pendalaman Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Aryaduta, Jakarta	10 Maret 2022	35 orang
	Workshop Pelaksanaan Barang dan Jasa tahun 2022	Biro Umum	Hotel Intercontinental	21 - 24 Maret 2022	2 orang
4	<i>Impactful Presentation Skill</i>	Markplus Institute	Zoom Meeting	22 Maret 2022	3 orang
5	Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Persiapan Pengawasan Kearsipan Eksternal di Lingkungan Badan POM Tahun 2022	Biro Umum	Gedung Merah Putih Lantai 7	8 April 2022	5 orang
6	Workshop Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sosialisasi Omspan atas IKPA serta Mekanisme Pelaporan dan Monev	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Santika, Premiere, Harapan Indah, Bekasi	6 - 7 April 2022	22 orang



No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
	Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2022				
7	Workshop Digital Payment dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Horison, Bekasi	19 - 20 Mei 2022	15 orang
8	Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Level 1	PPM dan LKPP	Jakarta	23 Mei - 17 Juni 2022	1 orang
9	Bimbingan SAKIP dan Monitoring dan Evaluasi Online Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	Jakarta	22 - 25 Mei 2022	16 orang
10	Workshop <i>Digital Payment</i> dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Horison, Bekasi	19 - 20 Mei 2022	15 orang
11	Pelatihan <i>Lead Auditor</i>	PPSDM	Jakarta	23 - 27 Mei 2022	1 orang
12	<i>Training: Personal Resiliency For Better Performance In Digital Era</i>	ASBI Consulting	Hotel Aryaduta	2 Juni 2022	90 orang
13	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2022	Biro Umum	Kantor Arsip Nasional	7 - 9 Juni 2022	1 orang
14	Webinar Salah Kaprah dan Lawah dalam Berbahasa	Kompas Institute	Zoom Meeting	17 Juni 2022	6 orang
15	Workshop Pengelolaan Barang Milik Negara	Biro Umum	Hotel Avanzel	20 - 23 Juni 2022	1
16	Pelatihan Analisis Data untuk Perumusan Rekomendasi Kebijakan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Erian Jakarta	21 - 22 Juni 2022	14 orang



No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
17	Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran BPOM	Biro Sumber Daya Manusia	Hotel Borobudur, Jakarta	13 - 14 Juli 2022	8
18	Webinar Riset Pengembangan Kebijakan-Metode Sampling dan Membangun Kuesioner untuk Riset Kebijakan	Kompas Institute	Zoom Meeting	28 Juli 2022	2 orang
19	Workshop Mendupakkan Pekerjaan Analis Kebijakan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Zoom Meeting	1 Agustus 2022	9 orang
20	Forum Diskusi JFP : Kontribusi Perencana dalam Meningkatkan Peran BPOM di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Bogor	31 Agustus - 1 September 2022	12 orang
21	<i>Webinar Policy Analyst Virtual Public Lecture</i> "Peran Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"	Tanoto Foundation dan Lembaga Administrasi Negara	Zoom Meeting	29 September 2022	1 orang
22	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan	PPSDM	Hotel Millenium	31 Agustus - 2 September 2022	2 orang
23	Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Gender	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Santika Premiere, Kota Harapan Indah, Bekasi	30 September 2022	3 orang



No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
24	Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Gender	Biro Perencanaan dan Keuangan	Zoom Meeting	6 Oktober 2022	1 orang
25	Best Practise Implementasi dan Entry Meeting Evaluasi SAKIP TA 2022	Inspektorat Utama	Zoom Meeting	18 - 19 Oktober 2022	8 orang
26	Pelatihan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (intermediate)	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Aryaduta, Jakarta	18 - 19 Oktober 2022	14 orang
27	Analisis Kebutuhan dan Tren Global Pengembangan Kompetensi SDM	PPSDM	Jakarta	19 Oktober 2022	7 orang
28	Petunjuk Pelaksanaan Penerapan, Penilaian dan Reviu PIPK di Lingkungan BPOM	Inspektorat Utama	Hotel Grand Mansion, Menteng	10 November 2022	2 orang
29	Pelatihan Menulis Laporan Efektif	Tempo Institute	Tempo Institute	22 - 24 November 2022	3 orang
30	Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2022	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pullman Bandung	29 November 2022	4 orang
31	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Biro Hukum dan Organisasi	Hotel Santika Premiere Bekasi	30 November - 1 Desember 2022	3 orang
32	Workshop Inovasi Pelayanan Publik BPOM Tahun 2022	PPSDM	Hotel Savero, Depok	5 Desember 2022	2 orang
33	Pengarusutamaan Kebijakan Kesehatan Tradisional	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Aula BPOM	12 Desember 2022	5 orang

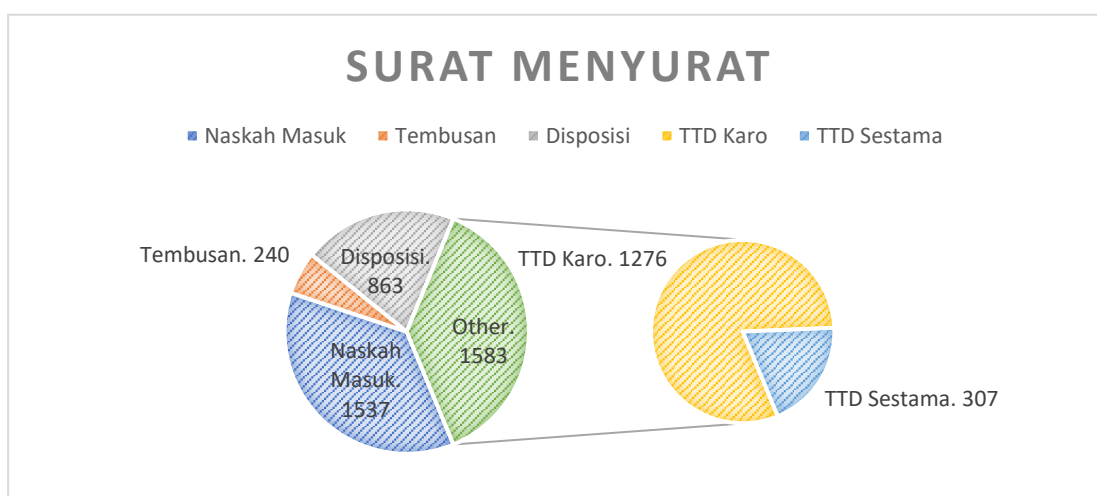


No	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu	Jumlah Peserta
34	Strategi BPOM dalam Mengawal Kebijakan Obat Herbal	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Zoom Meeting	22 Desember 2022	2 orang
35	Pelatihan Pengembangan Gagasan Kebijakan: Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik, Benar, dan Efektif dalam Naskah Pidato	Biro Perencanaan dan Keuangan	Hotel Sari Ater Bandung	23-24 Desember 2022	14 orang

## 2.2 SURAT MENYURAT

Penerimaan surat masuk pada Biro Perencanaan dan Keuangan sepanjang tahun 2022 telah sepenuhnya menggunakan Aplikasi Srikandi dengan total naskah sebanyak 2640 dokumen, terdiri atas 1537 naskah masuk, 863 disposisi, dan 240 tembusan. Sementara itu, surat keluar dari Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1583 dokumen, terdiri atas 1276 dokumen dengan tanda tangan Kepala Biro dan 307 dokumen dengan tanda tangan Sekretaris Utama.

Pada tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan memanfaatkan aplikasi Srikandi (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk proses Surat Menyurat Internal dan SIPANDA (Sistem Penomoran Naskah Dinas) untuk penomoran dan klasifikasi dokumennya, hal ini dilakukan guna mendukung implementasi SPBE di lingkungan Badan POM.



Gambar 2. 5 Grafik Data Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2022



### 2.3 SARANA DAN PRASARANA

Adapun Sarana dan Prasarana pada tahun 2022 di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan pengadaan BMN yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Bagian/Sub Bagian
1	PC	ACER VERITON X2 - CORE I3	2022	3.10.01.02.001	1135	Ivani	Tata Usaha
2	Laptop	Axioo mybook pro k7	2022	3.10.01.02.002	655	Beni	Tata Usaha
3	Laptop	Axioo mybook pro k7	2022	3.10.01.02.002	656	Titin	Tata Usaha
4	Printer	L1300A3 Ink Tank	2022	3.10.01.02.003	902	Lelita	Tata Usaha
5	PC	ACER VERITON X2 - CORE I3	2022	3.10.01.02.001	1134	Lelita	Tata Usaha
6	Printer	HP Laser 107w	2022	3.10.02.03.003	914	Indry Puspitasari	Keuangan
7	PC Unit	Axioo MyPC One Pro K5	2022	3.10.01.02.001	1130	Naiva Tianli	Keuangan
8	PC Unit	Axioo MyPC One Pro K5	2022	3.10.01.02.001	1129	Dionisius	Keuangan
9	PC Unit	Axioo MyPC One Pro K5	2022	3.10.01.02.001	1131	Della	Keuangan
10	Printer	HP Laser 107w	2022	3.10.02.03.003	916	Yoga	Keuangan
11	Laptop	ACER Travelmate P214	2022	3.10.01.02.002	217	Yuni	Keuangan
12	Printer	HP Laser 107w	2022	3.10.02.03.003	915	Yuni	Keuangan
13	Laptop	Acer	2022	3.10.01.02.003	680	Hany	Perencanaan
14	Laptop	Acer	2022	3.10.01.02.003	681	Rizal	Perencanaan
15	Laptop	Acer	2022	3.10.01.02.003	682	Eliyanti	Perencanaan
16	PC	GEAR	2022	3.10.01.02.003	1133	Amanah Rahayu	Perencanaan
17	PC	GEAR	2022	3.10.01.02.003	1132	Adi	Perencanaan



No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Bagian/Sub Bagian
18	Laptop	Travelmate P214-i5	2022	3.10.01.02.003	676	Arham	Bagian Dukungan Strategis Pimpinan
19	Laptop	Travelmate P214-i5	2022	3.10.01.02.003	674	Fajri Nugroho	Bagian Dukungan Strategis Pimpinan
20	Laptop	Travelmate P214-i5	2022	3.10.01.02.003	678	Isna Inawati Asih	Bagian Dukungan Strategis Pimpinan
21	Laptop	Travelmate P214-i5	2022	3.10.01.02.003	673	Okki Ayu Oktria	Bagian Dukungan Strategis Pimpinan



# LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

## 2022



## BAB 3: CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

### 3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022 ditetapkan oleh Sekretaris Utama pada tanggal 16 Desember 2021, kemudian pada awal tahun 2022 terdapat pergantian Sekretaris Utama sehingga Perjanjian Kinerja 2022 di revisi dan ditetapkan kembali oleh Plt. Sekretaris Utama pada tanggal 3 Januari 2022. Sehingga ditetapkanlah Perjanjian Kinerja seperti dibawah ini:

Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48
		2	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33
		3	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95
		4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22
		5	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER terhadap pedoman	71,04%
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SESTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	1	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,50
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1	Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7
7	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82
8	Menguatnya data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)

Berikut pencapaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022:

Tabel 3. 2 Capaian IKU Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	4,07	91%	Baik
		2 Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	71,86	98%	Baik
		3 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	93,63	99%	Baik
		4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	96,63	101%	Sangat Baik
		5 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%	100%	100%	Baik
2	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	3,48	91%	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Dokumen	Persentase Kesesuaian Dokumen	71,04 %	77%	108%	Sangat Baik



# LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

## 2022

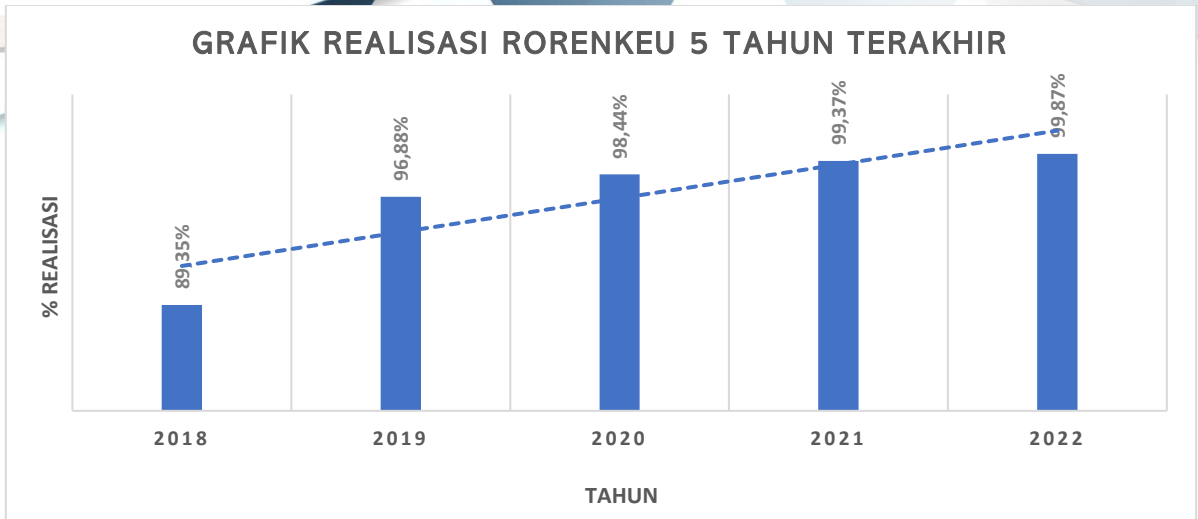
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SATKER sesuai pedoman	Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Terhadap Pedoman				
4	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM	1 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan BPOM yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar terhadap pedoman	100%	100%	100%	Baik
		2 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pelaporan Kinerja, Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Utama yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100%	100%	100%	Baik
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan strategis Pimpinan	1 Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,50	90,02	108%	Baik



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	1 Indeks RB Biro dan Perencanaan Keuangan	74,7	89,58	120%	Sangat Baik
7	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	84,04	102%	Baik
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	2,25	100%	Baik
9	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	1 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	100	100%	Baik

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, berdasarkan OMSPAN Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Biro Perencanaan dan keuangan adalah sebesar Rp. 18,127,411,000,00 sedangkan realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 13,771,930,972,00 sehingga jika dibandingkan dengan penyerapan tahun 2021, penyerapan Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami **kenaikan** dari 99,37% menjadi **99,87%** (per 31 Desember 2022).



Gambar 3. 1 Grafik % Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018-2022

Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2022 sangat bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu **99,87%** sumber dari Aplikasi OMSPAN sesuai SP2D yang terbit per 31 Desember 2022.

Sedangkan untuk masing-masing Substansi dari Aplikasi SAKTI Modul Akrual belum termasuk pengembalian realisasi sebagai berikut (%):

	PAGU	REALISASI	% Realisasi
TU	2.132.667.000	2.130.547.089	99,95%
DSP	1.041.129.000	1.040.419.121	99,93%
PERENCANAAN	3.641.576.000	3.641.166.951	99,99%
PENGANGGARAN	3.874.464.000	3.874.209.267	99,99%
MONEV	3.206.539.000	3.201.324.711	99,84%
KEUANGAN	4.293.536.000	4.292.347.058	99,97%
TOTAL	18.189.911.000	18.180.014.197	99,95%

No	Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Output	Satuan	Volume Output			Anggaran (dalam Ribu)			Ket
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	3159-Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan								
	960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	3.173.796.000	3.170.966.210	99,91%	
	952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	dokumen	15	15	100%	7.516.040.000	7.515.376.218	99,99%	
	953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	dokumen	12	12	100%	3.206.539.000	3.201.324.711	99,84%	
	955.Layanan Manajemen Keuangan	dokumen	9	9	100%	4.293.536.000	4.292.347.058	99,97%	



## BAB 4: KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2022

Pencapaian 9 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh keenam kelompok substansi yaitu Kelompok Substansi Perencanaan, Kelompok Substansi Penganggaran, Kelompok Substansi Urusan Daerah & Hibah, Kelompok Substansi Monitoring Evaluasi & Pelaporan Kinerja, Kelompok Substansi Keuangan dan Kelompok Substansi Dukungan Strategis Pimpinan serta Sub Bagian Tata Usaha atau juga kegiatan yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.

### SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS DUKUNGAN MANAJEMEN BPOM DI LINGKUP BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

#### IKU 1: NILAI RB BPOM PENGUATAN AKUNTABILITAS

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 adalah:

#### A. *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 3-4 Februari 2022 di Bekasi. Peserta *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah TU Eselon I, 30-unit kerja pusat secara luring, 6 Loka POM Mandiri dan Balai POM di Tarakan secara luring serta 33 Balai Besar/Balai POM dan 9 Loka POM secara daring. Narasumber pada



kegiatan ini adalah dari Direktur Sistem Penganggaran Kementerian Keuangan, Inspektur I dan II, Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Sumber Daya dan Manusia dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam paparannya menyampaikan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyampaikan agar meningkatkan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa Pentingnya Evaluasi Kinerja Anggaran mengingat belanja Kementerian/Lembaga punya peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa pandemi APBN 2021. Oleh karena itu setiap rupiah yang dialokasikan harus terukur hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, di mana, dan apa hasilnya (*Value*



Gambar 4. 1 Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021



*for Money*). Ketercapaian Sasaran Strategis, sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan KRO/RO menjadi tolok ukur keberhasilan dengan cara *tracking* Capaian Kinerja Anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya, dan juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Pada tahun 2021, BPOM memperoleh nilai EKA 92,82 dan IKPA 89,68. Kementerian Keuangan juga menghimbau agar mengoptimalkan capaian kinerja anggaran dengan memastikan kesesuaian dan keselarasan data referensi dan data entri, mengidentifikasi dan memastikan kelengkapan informasi kinerja, meningkatkan akurasi data capaian yang dilaporkan, mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya, menyelesaikan pelaporan kinerja semesteran dan tahunan pada Aplikasi SMART, meng-approve capaian kinerja level di bawahnya, dan meningkatkan awareness semua pihak dalam EKA.

Narasumber Inspektur I dan II menjelaskan pada tahun 2021 telah dilaksanakan evaluasi AKIP terhadap 4 komponen yang terdiri dari 93 parameter. 4 komponen tersebut adalah Capaian Kinerja, Evaluasi Kinerja, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja. Dari masing-masing komponen diberikan rekomendasi untuk perbaikan AKIP pada tahun berikutnya. Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP untuk BB/Balai POM adalah 78,65; Pusat-Pusat adalah 77,46; dan Eselon I adalah 78,61. Adapun 4 (empat) Unit Kerja berpredikat WBBM Tahun 2021 adalah BBPOM di Surabaya, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Padang, dan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psiotropika Prekursor dan Zat Adiktif. Selain itu terdapat 7 (tujuh) Unit Kerja berpredikat WBK Tahun 2021 yaitu: BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Bandung, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Mataram, BPOM di Manokwari, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, serta Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Narasumber dari Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan materi terkait Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM Tahun 2021 dan Indeks Kualitas Kebijakan BPOM Tahun 2021. Pada rekapitulasi kategori IPP UPP BPOM Tahun 2021 terdapat 3 unit kerja dengan predikat baik (BPOM di Banjarmasin, BBPOM di Medan, dan BBPOM di Banda Aceh), 26 unit kerja dengan predikat sangat baik, dan 4 unit kerja dengan predikat pelayanan prima. Diharapkan pada tahun 2024 seluruh UPP di lingkungan BPOM telah meraih kategori pelayanan prima dengan IPP minimal 4,51. Untuk KIE, Indeks efektivitas KIE tertinggi di tahun 2021 dengan interpretasi sangat efektif sekali (97,85) adalah dari BPOM di Gorontalo sementara indeks efektivitas KIE terendah sangat efektif (88,58) adalah dari BBPOM di Pontianak. Selanjutnya untuk hasil



penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 adalah sebesar 78,64 dengan kategori baik.

Koordinator Monev dan Lapkin memaparkan terkait format penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021. Pelaporan Kinerja terbagi menjadi dua yaitu laporan kinerja yang dilaporkan secara interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Narasumber dari Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menyampaikan hasil evaluasi beberapa indikator BPOM tahun 2021 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 89,80; Indeks Kesadaran Masyarakat adalah 77,64; Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM adalah 68,89; Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) adalah 86,50; serta Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (Compliance Index) Obat Dan Makanan adalah 82,36.

Narasumber Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyampaikan paparan terkait capaian dan evaluasi Program Prioritas Nasional 2021 (Desa, Pasar, Sekolah). Berdasarkan perhitungan capaian tahun 2021, terdapat 427 desa yang sudah selesai diintervensi. Untuk pasar, terdapat 169 pasar yang sudah diberikan intervensi. Pada PJAS, terdapat 1.362 sekolah yang diberikan sertifikat sekolah dengan PJAS aman.

Narasumber Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyampaikan terkait indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP. Dari 33 Balai, terdapat 21 Balai yang nilai SKL diatas 76 (target indikator strategis tahun 2021 adalah sebesar 76). Narasumber dari Biro SDM memaparkan terkait Indeks Profesionalitas ASN, yaitu Nilai IP ASN BPOM pada tahun 2021 adalah 84,35, nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai 82,88. Terakhir Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memaparkan terkait Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal. Nilai capaian dapat dipantau oleh masing-masing unit kerja pusat dan balai melalui aplikasi BOC, yaitu dengan login sebagai PIC Unit Teknis pada [command-center.pom.go.id](http://command-center.pom.go.id), kemudian memilih menu Pengelolaan Data dan Informasi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan desk Hasil Kegiatan Pengawasan/RHPK, RAPK/RKP, e-performance, dan Draf Lapkin Tahun 2021. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf Laporan Kinerja masing-masing satuan kerja (58 draf Laporan Kinerja) dan 94 orang SDM yang meningkat kompetensinya terkait SAKIP.



Sebagai tindak lanjut pertemuan ini adalah perlunya komitmen dari seluruh Unit Kerja dari seluruh Unit Kerja untuk melaporkan data capaian Hasil Kegiatan Pengawasan/RHPK, RAPK/RKP, aplikasi e-monev Bappenas, SMART DJA, TEPRRA dan e-Performance BPOM secara tepat waktu. Seluruh Unit Kerja juga diharapkan tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kinerja baik kepada Biro Perencanaan dan Keuangan maupun melalui aplikasi e-SAKIP Reviu KemenPAN RB, dimana melalui aplikasi tersebut ketepatan waktu Unit Kerja dalam menyampaikan laporan juga akan direviu oleh Inspektorat II BPOM. Selain itu, dalam melakukan penginputan data capaian, Unit Kerja agar menyamakan data capaian antara Laporan Kinerja, monev online dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja/RKP agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada data yang diinput.

## B. BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) SAKIP DAN MONEV ONLINE TAHUN 2022

Kegiatan Sosialisasi, Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 Mei 2022 di Jakarta. Peserta berasal dari seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Pada pertemuan tersebut menghadirkan narasumber dari eksternal yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta narasumber internal dari Biro Perencanaan dan Keuangan dan LPSE Badan POM.



Gambar 4. 2 Bimtek SAKIP dan Monev Online Juni 2022

Narasumber Bappenas menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang berusaha mengawal program, kegiatan dan output yang dilaksanakan oleh K/L tidak hanya



terlaksana namun harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaporan komponen dan rincian output di aplikasi e-Monev dilakukan setiap bulan oleh masing-masing Satuan Kerja, sedangkan pelaporan e-Monev oleh Kementerian/Lembaga dilakukan tiap triwulan. Data e-Monev yang terbuka dan saat ini tidak ada mekanisme buka tutup (e-monev tidak dikunci). Optimalisasi pemanfaatan e-Monev perlu dilakukan melalui penyempurnaan aplikasi e-Monev dan juga Kerjasama dari seluruh kementerian Lembaga untuk menggunakan e-Monev dalam kerangka pelaksanaan PEP di masing-masing K/L. diharapkan melakukan pengecekan kembali dalam melakukan verifikasi data yang diinputkan terhadap seluruh satuan kerja. Data hasil pelaporan pada 2018 cukup rendah, yang antara lain disebabkan oleh pendekatan pelaporan/entri data yang mengalami perubahan cukup signifikan serta kendala pada data referensi dan aplikasi yang masih dalam proses pengembangan. Pada tahun 2019-2021 kelengkapan data pelaporan sudah mulai membaik. Banyaknya item yang harus dilaporkan menjadi salah satu penyebab selain belum terintegrasinya realisasi anggaran dengan kementerian keuangan, yang hingga kini masih terus diupayakan.

Narasumber Kementerian Keuangan menyampaikan 2 topik materi yaitu terkait aplikasi SAKTI Tahun 2022 dan aplikasi Monev SMART DJA. Terkait aplikasi SAKTI, disampaikan mengenai mekanisme pengisian dan pelaporan data capaian output pada aplikasi. Alur pelaporan dan konfirmasi capaian output adalah mengisi data capaian RO pada aplikasi SAKTI yang kemudian data tersebut dikirimkan kepada aplikasi OMSPAN dimana data RO tersebut dilakukan validasi. Setelah itu dilakukan konfirmasi status data, apabila ditolak maka perlu dilakukan perbaikan pengisian RO pada aplikasi SAKTI, sedangkan apabila diterima maka data RO masuk kedalam database OMSPAN dan menjadi pembentuk nilai IKPA komponen Capaian Output. Penginputan pada aplikasi SAKTI menggunakan metode Self-Assesment/Mandiri yang dilakukan oleh operator PPK. Yang dilakukan input adalah Realisasi Volume RO (RVRO); Progres Capaian RO (PCRO); dan keterangan. RVRO sendiri adalah Capaian keluaran (output) riil berupa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Satker atas penggunaan anggarannya. Sedangkan PCRO adalah Persentase yang menunjukkan tingkat penyelesaian dari berbagai tahapan atau aktivitas yang dilakukan Satker dalam mencapai suatu output riil/spesifik berupa barang/jasa.



Narasumber Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa dasar hukum yang menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L yang sebelumnya adalah PMK 214/PMK.02/2017 telah diubah menjadi PMK 22/PMK.02/2021. Pada tahun 2021, Badan POM memperoleh NKA 93,98 (Nilai EKA 92,82 & Nilai IKPA 95,72). Secara nasional, Badan POM memperoleh peringkat 69 dari 86 K/L dan peringkat 40 dari 51 K/L pada kategori pagu kecil pada tahun 2021 dengan nilai EKA 92,82. Evaluasi Pelaksanaan PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dilakukan melalui aplikasi Monev SMART DJA. Adanya integrasi berupa Integrasi EKA (SMART) dan IKPA (OMSPAN) dalam rangka Single Budget Monitoring System, serta integrasi data SAS/SAKTI dengan SMART untuk meningkatkan konsistensi, integritas, ketersediaan data, serta meminimalkan entri data. Perbaikan pengolah data SMART, peningkatan keamanan sistem, dan perbaikan model tampilan. Pelaksanaan EKA melalui aplikasi SMART dengan cara mengisi RVRO pada Satuan Kerja dan menyampaikan laporan kinerja.

Narasumber LKPP dan LPSE Badan POM menyampaikan bahwa data pada tabel rencana paket pengadaan terintegrasi dengan aplikasi SiRUP dan dilakukan penarikan data setiap 1x24 jam. SiRUP merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. Saat ini, LPSE Badan POM memiliki aplikasi monitoring PBJ yaitu aplikasi AMEL yang dapat diakses langsung tanpa *login* dan *password* melalui <https://lpse.pom.go.id/eproc4/amel/>. AMEL ditujukan sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik yang diwajibkan oleh Badan POM.

Pada kegiatan ini Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan sosialisasi terkait Pedoman SAKIP, Pelaporan melalui Dashboard Badan POM Operational Center (BOC), Pelaporan Melalui RHPK, Manual IKU UPT, dan aplikasi Simetris juga dilaksanakan pada kegiatan ini. SIMETRIS merupakan sistem pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BPOM, unit kerja eselon I, dan eselon II secara online berbasis peta strategi *Balanced Score Card* (BSC) untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Saat Ini e-Planning dan e-Performance sudah diintegrasikan dalam Simetris yang dapat diakses melalui <http://simetris.esolution-tech.com/>.



Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan desk capaian kinerja dan anggaran yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM baik dalam pengisian aplikasi monev online maupun pelaporan secara manual.

Sebagai tindak lanjut pertemuan Bimtek SAKIP dan Monev *Online* 2022 diperlukannya komitmen dari seluruh Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM untuk melaporkan data capaian Hasil Kegiatan Pengawasan (RHPK) melalui BOC, RAPK, aplikasi SMART, e-Monev Bappenas, dan *e-Performance* secara tepat waktu setiap bulannya. Selain itu, agar seluruh Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM juga tepat waktu dalam menyampaikan laporan baik laporan evaluasi internal maupun laporan kinerja interim setiap triwulannya. Kemudian dalam melakukan penginputan data capaian, Unit Kerja/Balai Besar/Balai POM/Loka POM dimita agar menyamakan data capaian antara Laporan Kinerja, aplikasi monev *online* dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada data yang diinput. Dengan diselenggarakannya Kegiatan Bimtek ini, diharapkan seluruh unit kerja meningkat kompetensinya dan kepatuhannya dalam pelaporan kinerja dan anggaran sehingga dapat disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### C. RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2022 DI BALI



Gambar 4. 3 RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2022 DI BALI

Rakernas BPOM ini merupakan bentuk dukungan terhadap tantangan pengawasan Obat dan Makanan, dinamika lingkungan strategis, dengan memperhatikan arah kebijakan RKP tahun 2023 dan Renstra BPOM tahun 2020- 2024. Rakernas BPOM 2022 digelar secara hybrid di Bali, yang dibuka

langsung oleh Kepala Badan POM Dr. Penny K Lukito. Kegiatan ini telah berlangsung dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2022 lalu.

Tujuan dari penyelenggaraan Rakernas BPOM yaitu konsolidasi dan pembahasan isu-isu strategis perencanaan tahun 2023 yang dijabarkan dalam arah kebijakan Badan



POM, program dan kegiatan prioritas unit kerja, dan rincian output Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kepala Badan POM, Dr. Penny K Lukito menegaskan bahwa “pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu upaya strategis guna mendukung Pembangunan Kesehatan dalam rangka melindungi Bangsa Indonesia dari produk Obat dan Makanan berbahaya dan menjamin Bangsa Indonesia memperoleh produk Obat dan Makanan aman dan bermutu”. Untuk itu, penyusunan program dan kegiatan 2023 perlu menekankan adanya inovasi dalam rangka penyempurnaan bisnis proses serta terobosan percepatan kinerja Badan POM yang menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat dan seluruh stakeholders.



Gambar 4. 4 Kepala Badan POM Berfoto bersama pada Rakernas Tahun 2022 di Bali

## **IKU 2: NILAI AKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN PENCAPAIAN KINERJA BPOM**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 2 adalah:

### **A. PENGEMBANGAN *E-PERFORMANCE***

*E-Performance* merupakan sistem Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan keputusan

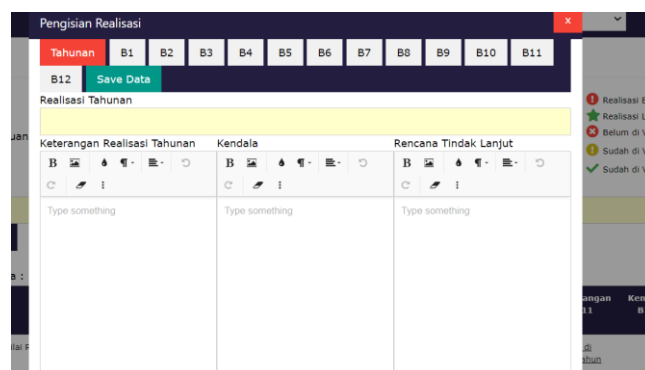


Kepala Badan POM No. HK.08.1.23.02.16.0562 tahun 2016 tentang Penerapan Sistem Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja secara Elektronik di Lingkungan Badan POM, disebutkan bahwa seluruh Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis wajib melaporkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja secara berkala dalam *e-performance* Badan POM.

Pada tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan mengembangkan aplikasi SIMETRIS BPOM (Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi) dimana aplikasi tersebut terdiri dari modul *e-planning* dan modul *e-performance*. Sebelum melakukan penginputan pada modul *e-performance*, unit kerja diwajibkan untuk menginput pada modul *e-planning* yang terdiri dari Sasaran, Indikator, target indikator dan mapping anggaran per indikator pada level Kepala BPOM s.d level eselon II unit kerja pusat, BB/BPOM, dan Loka POM.

Pada tahun 2022 pengembangan *e-performance* dilakukan mulai dari penambahan fitur fitur kendala dan tindak lanjut dan fitur download semakin pada menu realisasi IKU, fitur pohon kinerja pada menu *dashboard*, dan fitur integrasi SAKTI pada menu realisasi anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan pemanfaatan aplikasi *e-performance* untuk pengukuran capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Penambahan Fitur Kendala dan Tindak Lanjut dan Fitur Download SIMAKIN pada Menu Realisasi IKU



Gambar 4. 5 Penambahan Fitur Kendala dan Tindak Lanjut dan Fitur Download SIMAKIN

Pada menu Capaian Realisasi IKU dalam pengisian realisasi capaian indikator ditambahkan fitur pengisian kendala dan tindak lanjut untuk setiap indikator yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengisian laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim triwulanan.



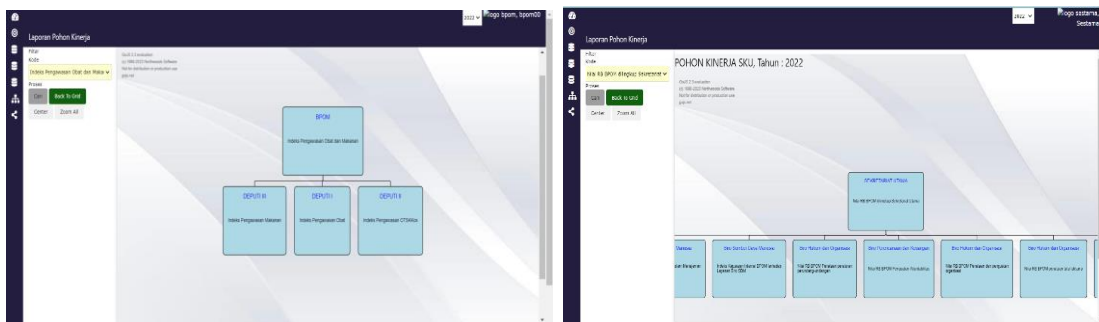
No.	Unit Cascading/Nama Individu	Kode	Indikator	Realisasi B12
1.	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100
2.	Biro Sumber Daya Manusia	01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100
3.	Biro Hukum dan Organisasi	01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	94
4.	Biro Perencanaan dan Keuangan	01	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100

NIP	Nama Individu	Jabatan	Rencana Aksi	Target	Kualitas	Nb Capaian
197606082000011001	Denny Alan, S.Kom	Ketua	Rencana aksi RB Sekeloa pengujian akuntabilitas di lingkup substansi penganggaran yang diimplementasikan sesuai perencanaan	0	0	0
197606082000011001	Denny Alan, S.Kom	Ketua	Rencana aksi RB BPM pengujian akuntabilitas di lingkup substansi penganggaran yang diimplementasikan sesuai perencanaan	0	0	0
1979080420050112002	Sinta Kurniasihari, S.Si	Ketua	Indikator kinerja pembangunan di bidang	0	0	0

Fitur download SIMAKIN merupakan hasil integrasi antara aplikasi SIMAKIN milik Biro SDM dengan *E-Performance*. Fungsi integrasi dari kedua aplikasi tersebut untuk melihat *cascading* aliran data dari setiap indikator level II (pimpinan unit) sampai ke level individunya.

2. Penambahan Fitur Pohon Kinerja Pada Menu *Dashboard*



Gambar 4. 6 Penambahan Fitur Pohon Kinerja Pada Menu Dashboard

Fitur Pohon Kinerja ini menunjukkan bahwa secara grafis setiap indikator yang ada pada level 0 dan level I mengalir ke indikator di bawahnya. Misal pada gambar di atas indikator indeks pengawasan obat dan makanan level BPOM didukung oleh 3 indikator di bawahnya yaitu Indeks Pengawasan Makanan milik Deputy III, Indeks Pengawasan Obat milik Deputy I, dan Indeks Pengawasan OTSK dan Kos milik Deputy II. Begitu pula dengan cascading pada indikator level I yang diturunkan ke indikator level II seperti pada contoh indikator Nilai RB BPOM dilingkup sekretariat utama seperti gambar di atas.



### 3. Integrasi SAKTI pada Menu Realisasi Anggaran

No.	Output	Sub-Output	Komponen	Kode-Sub-Komponen	Sub-Komponen	Page AHIR	Realisasi	(%) Pergerakan Anggaran	(%) Indikator
1.	880	932	001	A	PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU STRATEGI BOPM 2022-2029	46,270,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
2.	880	932	001	B	PERENCANAAN DESAIN PERENCANAAN IMPLEMENTASI GRAND DESIGN PENGANGARAN ORAT DAN MAKRAN (BULAN BOKK) PERENCANAAN ORAT DAN MAKRAN	438,318,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
3.	880	932	001	C	PENGALIHAN TANGKAPAN KUNCI-KUNCI PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU STRATEGI BOPM 2022-2029	3,890,490,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
4.	880	932	001	E	PERENCANAAN KEMERDEKAAN EKONOMI SUBSISTEM PERENCANAAN	478,149,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
5.	880	932	002	A	BANGUN LINTAS NASIONAL SAKAL PENGANGARAN ORAT DAN MAKRAN	124,327,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
6.	880	932	002	B	PERENCANAAN PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU	123,174,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
7.	880	932	002	C	PERENCANAAN PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU	550,746,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
8.	880	932	002	D	KELOMPOK PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU STRATEGI BOPM 2022-2029	44,000,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
9.	880	933	001	D	BENTUK PERENCANAAN LAMPUNG KUNCI DAN KUNCI ORAT DAN MAKRAN	1,813,313,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
10.	880	932	002	B	Manajemen dan Layanan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	1,225,722,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
11.	880	932	002	F	PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU	0.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
12.	880	932	002	C	SOSIALISASI DAN DUKUNG PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU	0.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
13.	880	932	002	D	PERENCANAAN BERKAWAN TERPADU	153,029,000.00	0.00	0.0%	0.00 (%)
Total						6,746,077,000.00	0.00	0.0%	

Gambar 4. 7 Integrasi SAKTI pada Menu Realisasi Anggaran

Fitur Integrasi ini dilakukan dengan menggunakan API (*Application Programming Interface*) dari aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan. Hasil dari integrasi ini dapat dilakukan penarikan data realisasi anggaran sampai dengan sub komponen dan dapat dilakukan update dengan menggunakan fitur *retrive* data sesuai dengan bulan yang diminta. Selain itu terdapat realisasi per sub komponen yang dapat digunakan untuk melakukan mapping anggaran pada laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal.

## B. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan; menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program; serta memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan kedepan.

Sampai saat ini, monev di Badan POM sedang berusaha untuk dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Badan POM Operational Center (BOC) dengan beberapa tabel yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pelaporan kinerja



dari unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM diatur berdasarkan pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan POM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Monev unit kerja di Pusat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap triwulan bersama penanggung jawab data dari unit kerja untuk menyampaikan capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi.



Gambar 4. 8 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Triwulan Tahun 2022

Hasil dari pertemuan ini disusun menjadi (1) Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan; (2) Laporan realisasi anggaran, realisasi fisik, hambatan pelaksanaan kegiatan beserta rencana tindak lanjut per triwulan; dan (3) Laporan Kinerja Interim (Triwulanan).



Gambar 4. 9 Laporan Kinerja Dalam Angka Triwulanan



C. PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING SIMETRIS

*e-Planning* SIMETRIS merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem *bottom-up planning* dan *top down policy* yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari pelaksanaan *e-Government*.

No.	Unit	KRO	RO	Komponen	Kode Sub Komponen	Sub Komponen	Budget Plan	B03	B06	B09	B12	Total
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Revisi rencana strategi dan analisis lingkungan strategis Penganggaran Obat dan Makanan	A	PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNIKRATIK RENCANA STRATEGIS BPOM 2025-2029	425.250.000,00	0,00	0,00	0,00	42.525.000,00	42.525.000,00
2.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Revisi rencana strategi dan analisis lingkungan strategis Penganggaran Obat dan Makanan	B	PENYUSUNAN RANCANGAN IMPLEMENTASI GRAND DESIGN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BLUE BOOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN)	549.930.000,00	0,00	0,00	0,00	274.965.000,00	274.965.000,00
3.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Revisi rencana strategi dan analisis lingkungan strategis Penganggaran Obat dan Makanan	C	PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA	371.070.000,00	0,00	0,00	0,00	371.070.000,00	371.070.000,00

Gambar 4. 10 Tampilan RAPK versi detail

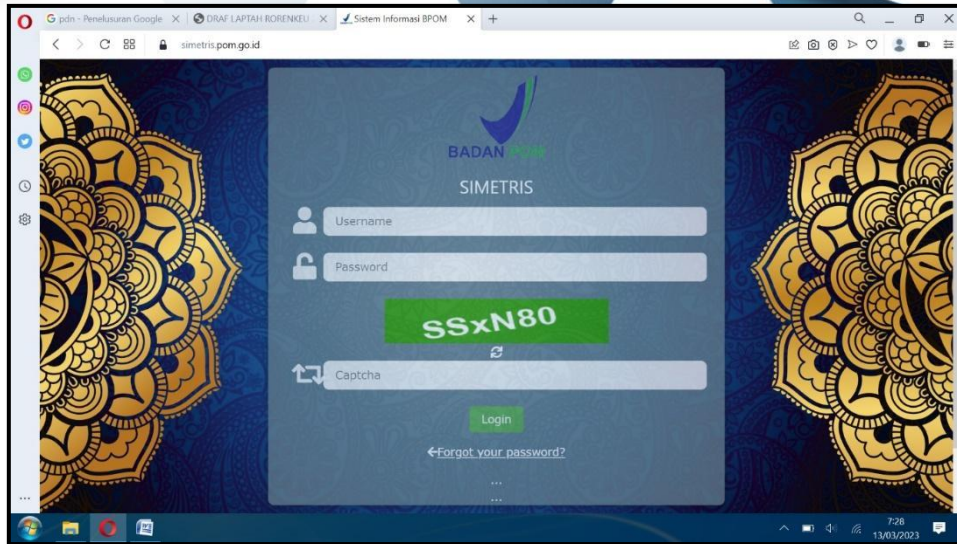
Pengembangan aplikasi *e-Planning* SIMETRIS pada tahun 2022 adalah penambahan mode cetak secara detail dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) yang memuat Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Komponen, hingga Subkomponen.

No.	Kode KRO	Kode RO	Kode Komponen	Sub Komponen	Total Tagging Per Sub Komponen
1.	EB4	960	61	Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021	100 %
2.	EB4	960	61	Koordinasi Internal dan Eksternal Biro Perencanaan dan Keuangan	100 %
3.	EB4	960	61	Operasional Pendukung Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan	100 %
4.	EB4	960	61	Penyielenggaraan Protokol Kesehatan	100 %
5.	EB4	960	61	Peningkatan Kinerja dan Kompetensi Biro Perencanaan dan Keuangan	100 %
6.	EB4	960	61	Pengupdaten Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan QMS Biro Perencanaan dan Keuangan	100 %

Gambar 4. 11 Tampilan Report Tagging

Fitur ini dapat digunakan sebagai data dukung saat dilakukan audit. Selain itu terdapat juga submenu Report Tagging yang berguna untuk melihat isian yang sudah dikerjakan sehingga dapat diketahui KRO, RO, Komponen, dan Subkomponen mana yang

belum ter-tagging. Pada tahun 2022 ini *e-Planning* SIMETRIS telah lolos *System Integration Testing* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT) sehingga mendapatkan domain resmi BPOM ([pom.go.id](http://pom.go.id)) dan telah masuk ke dalam server Pusat Data Nasional (PDN). Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2022 SIMETRIS telah resmi beralih ke [simetris.pom.go.id](http://simetris.pom.go.id).



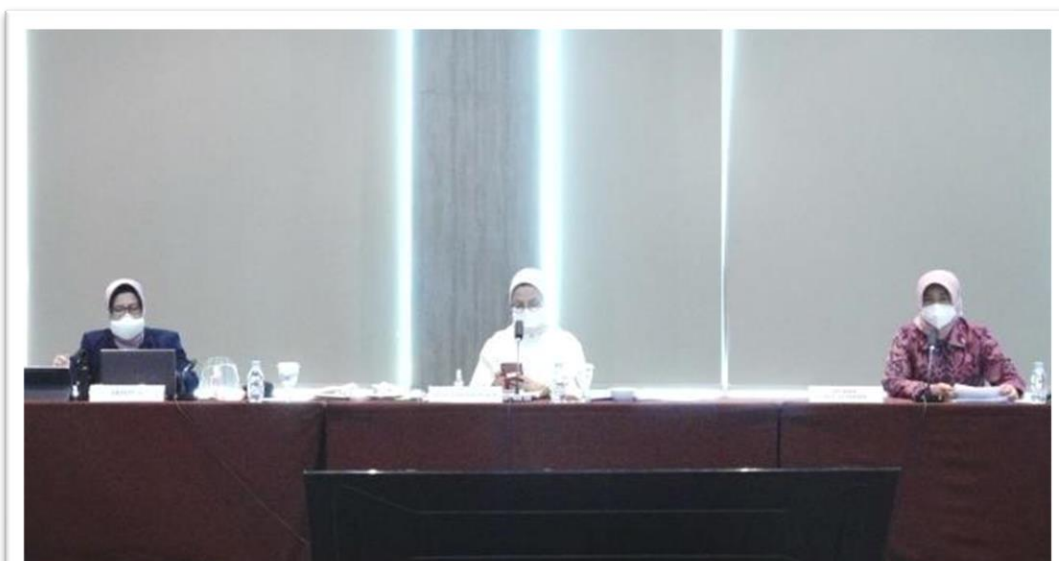
Gambar 4. 12 Tampilan Halaman Muka SIMETRIS dengan domain pom.go.id

Aplikasi e-Planning SIMETRIS merupakan aplikasi wajib terkait penyusunan perencanaan kinerja yang terintegrasi dengan e-Performance SIMETRIS untuk monitoring dan evaluasi Satuan Kerja dan Unit kerja di lingkungan BPOM.

### IKU 3: NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 3 adalah:

#### **A. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN TERKAIT MONITORING KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN**



Gambar 4. 13 Kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan



Rapat Koordinasi Pimpinan dilaksanakan pada 7 Juli 2022 di Jakarta (Hotel Grand Mercure Kemayoran) secara luring dan daring melalui *zoom meeting*. Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPOM dan dipimpin oleh Kepala Badan POM (Ibu Penny K. Lukito). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan monev realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2022 dan melakukan diskusi terkait usulan tambahan anggaran, serta tindak lanjut hasil evaluasi RB dan AKIP Tahun 2021.

Kegiatan pembukaan diawali dengan pemaparan laporan oleh Plt. Sekretaris Utama dan dilanjutkan dengan arahan Kepala Badan POM yang sekaligus secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pimpinan. Pada laporan Plt. Sekretaris Utama disampaikan bahwa Realisasi anggaran BPOM sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 35,49% dan berada pada peringkat 40 dari 85 Kementerian/Lembaga (rata-rata realisasi anggaran Nasional sebesar 40,60%). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM di Triwulan II yaitu 81,14 dengan nilai EKA 78,76 dan IKPA 84,70. NKA dimonitor setiap TW, NKA akan tetap dilihat secara real dan detail di akhir tahun karena ada output yang capaiannya di akhir tahun.



Gambar 4. 14 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rakorpim

Pada arahan Kepala Badan POM, Beliau menyampaikan bahwa capaian realisasi yang diperoleh masih dibawah rata-rata capaian Nasional dan NKA BPOM masih masuk kategori cukup. Hal ini agar menjadi catatan bagi tiap-tiap unit kerja yang realisasinya masih

dibawah target dengan menyampaikan kendala-kendala yang ditemui dan tindak lanjutnya. Tiap unit kerja juga diharapkan agar NKA ditingkatkan dan dimonitoring untuk setiap aspeknya. Beliau juga meminta agar Biro Perencanaan dan Keuangan agar mengkoordinasikan dan menkosolidasikan terkait perhitungan NKA kepada Unit Kerja.

Berikutnya dilanjutkan dengan paparan dari beberapa Unit Kerja dengan realisasi anggaran terendah, yaitu Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor; Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; Direktorat Penyidikan; Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan; Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional; Direktorat Pengawasan Kosmetik; BBPOM di Banjarmasin; BPOM di Manokwari; BBPOM di Samarinda; BPOM di Padang;



BPOM di Mamuju; Loka POM di Rejang Lebong; Loka POM di Toba Samosir; Loka POM di Manggarai Barat; Loka POM di Merauke; Loka POM di Kota Tanjung Balai; Loka POM di Aceh Selatan. Kepala Badan POM memberi arahan agar unit kerja harus meningkatkan capaian dan setiap kegiatan agar dimonitoring dan dikonsolidasi terus, dan diharapkan capaian di triwulan selanjutnya harus lebih baik.

Mengingat realisasi anggaran per 30 Juni 2022 masih dibawah realisasi Nasional, maka Kepala Unit Kerja harus segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk percepatan realisasi anggaran yaitu (1) Melakukan reuiu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi apabila terdapat perubahan pelaksanaan program/kegiatan, (2) Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan, (3) Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan, (4) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat, dan (5) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.



Gambar 4. 15 Sesi Pemaparan oleh Unit Kerja dan Sesi Diskusi serta Pemberian Arahan



**B. MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/  
BALAI POM**

Sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan berkepentingan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, maka diperlukan monitoring dan evaluasi dari pusat terhadap program yang dilaksanakan oleh Balai Besar/ Balai POM. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh petugas pusat merupakan proses pembelajaran bagi Balai Besar/ Balai POM untuk selanjutnya dapat melakukan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendali Intern. Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan dalam hal ini Kelompok Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja melaksanakan monitoring dan supervisi di 4 UPT sebagai lokasi monev per regional terpilih. Pembagian region sebagai berikut:

<b>Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Peserta</b>	<b>Tanggal</b>
Regional Kalimantan - Sulawesi	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar POM di Banjarmasin Balai POM di Gorontalo Balai POM di Kendari Balai Besar POM di Makassar Balai POM di Mamuju Balai Besar POM di Manado Balai Besar POM di Palangkaraya Balai POM di Palu Balai Besar POM di Pontianak Balai Besar POM di Samarinda Balai POM di Tarakan LOKA POM di Hulu Sungai Utara LOKA POM di Tanah Bumbu LOKA POM di Baubau LOKA POM di Palopo LOKA POM di Kepulauan Sangihe LOKA POM di Kotawaringin Barat LOKA POM di Banggai LOKA POM di Sanggau LOKA POM di Balikpapan	21 – 24 Juni 2022



Kegiatan	Lokasi	Peserta	Tanggal
Regional Sumatera	Balai Besar POM di Palembang	Balai Besar POM di Aceh Balai POM di Batam Balai POM di Bengkulu Balai POM di Jambi Balai Besar POM di Bandar Lampung Balai Besar POM di Medan Balai Besar POM di Padang Balai Besar POM di Palembang Balai POM di Pangkalpinang Balai Besar POM di Pekanbaru LOKA POM di Aceh Selatan LOKA POM di Aceh Tengah LOKA POM di Tanjung Pinang LOKA POM di Rejang Lebong LOKA POM di Sungai Penuh LOKA POM di Tulangbawang LOKA POM di Tanjung Balai LOKA POM di Toba Samosir LOKA POM di Dharmasraya LOKA POM di Payakumbuh LOKA POM di Lubuklinggau LOKA POM di Belitung LOKA POM di Indragiri Hilir LOKA POM di Dumai	18 – 21 Juli 2022
Regional Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku	Balai Besar POM di Mataram	Balai POM di Ambon Balai Besar POM di Denpasar Balai Besar POM di Jayapura Balai POM di Kupang Balai POM di Manokwari Balai Besar POM di Mataram Balai POM di Sofifi LOKA POM di Kepulauan Tanimbar LOKA POM di Buleleng LOKA POM di Merauke LOKA POM di Mimika LOKA POM di Manggarai Barat LOKA POM di Ende LOKA POM di Sorong LOKA POM di Bima LOKA POM di Pulau Morotai	8 – 11 Agus 2022
Regional Jawa	Balai Besar POM di Yogyakarta	Balai Besar POM di Bandung Balai Besar POM di Jakarta Balai Besar POM di Semarang Balai Besar POM di Serang	13 – 16 Sept 2022



Kegiatan	Lokasi	Peserta	Tanggal
		Balai Besar POM di Surabaya Balai Besar POM di Yogyakarta LOKA POM di Bogor LOKA POM di Tasikmalaya LOKA POM di Banyumas LOKA POM di Surakarta LOKA POM di Tangerang LOKA POM di Jember LOKA POM di Kediri	

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah paparan capaian anggaran dan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan; diskusi terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beserta rencana tindak lanjut; dan evaluasi entry data capaian kinerja dan anggaran baik pada aplikasi monev *online* (monev SMART DJA, Bappenas, BOC dan *e-performance*) maupun pelaporan manual (RHPK dan RAPK). Dengan adanya kegiatan monitong dan supervisi ini diperoleh pola pencapaian keberhasilan suatu kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM serta mempermudah deteksi dan identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin sehingga alternatif untuk penyelesaian masalah penyebab terhambatnya pencapaian indikator dapat ditemukan dan diatasi dengan merumuskan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring.



(A)



Gambar 4. 16 Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan: (A) Regional Kalimantan-Sulawesi, (B) Regional Jawa, (C) Regional Bali, Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan, (D) Regional Sumatera



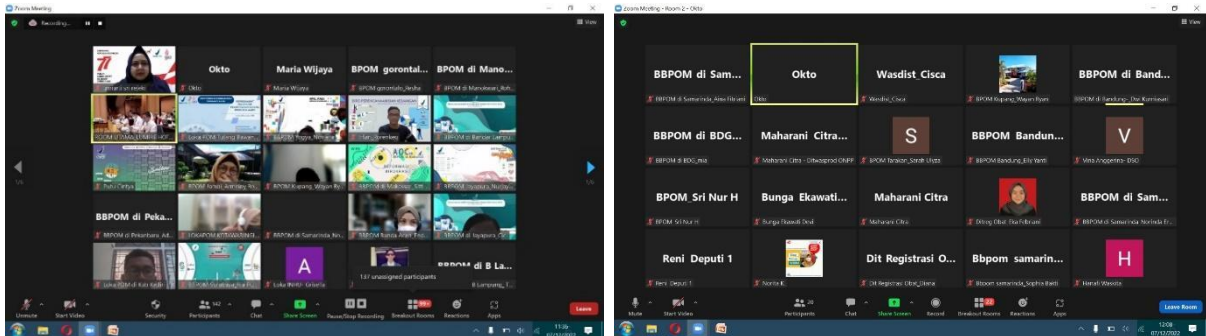
### C. BIMTEK PENYUSUNAN PK DAN RAPK UNIT ORGANISASI/SATKER MELALUI APLIKASI *E-PLANNING* SIMETRIS



Gambar 4. 17 Sosialisasi *hibrid* Penyusunan PK 2023 di Jakarta pada (7 Desember 2022)

Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan

Perjanjian Kinerja Instansi. Selanjutnya Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan sosialisasi Penyusunan PK 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2022 bersama seluruh Satuan Kerja dilingkup Badan POM secara hibrid. Pelaksanaan Bimtek diawali dengan paparan terkait mekanisme penyusunan PK dan RAPK melalui aplikasi SIMETRIS yang kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengisian aplikasi kepada unit kerja oleh tim perencanaan.



### D. FORUM DISKUSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) BPOM

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, soliditas, serta profesionalitas JFP BPOM telah dilaksanakan Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM pada tanggal 31 Agustus – 02 September 2022. Forum diskusi JFP yang mengusung tema “Kontribusi Perencana Dalam Meningkatkan Peran BPOM di Bidang Pengawasan Obat Dan Makanan”, diikuti sebanyak 61 orang Perencana dan Calon Perencana, baik dari Unit Pusat maupun UPT BPOM. Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah peserta mampu melaksanakan



peran dan tugasnya sebagai Perencana sesuai pedoman dan memberikan kontribusi aktif dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 4. 19 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM

lingkungan BPOM dan diskusi sinkronisasi pengelolaan JFP BPOM; Diskusi tugas dan kontribusi Perencana dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; Pelatihan Terkait Pengarusutamaan Gender di BPOM.

Pertemuan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan narasumber dari Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) - Bappenas dan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) dengan agenda: Sosialisasi pedoman teknis kinerja JFP di



Gambar 4. 18 Forum Diskusi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) BPOM

Di dalam forum diskusi juga membahas adanya gap antara JFP Pusat dan UPT, serta beban kerja JFP yang sangat banyak dan beragam (masih banyak mengerjakan pekerjaan tambahan yang bukan ranah perencana). Hal ini menyebabkan JFP tidak dapat fokus pada tugas perencanaan. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan di atas, diantaranya yaitu menyusun Pedoman Teknis



Kinerja JFP sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja JFP, menyusun analisis beban kerja (ABK) pegawai JFP, dan menyusun rencana peningkatan kompetensi bersama PPSDM.

## E. SARASEHAN PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA DENGAN IBU KEPALA BADAN POM

Kompleksnya tantangan pengawasan Obat dan Makanan serta semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap obat dan makanan yang baik dan aman, mengharuskan BPOM untuk selalu tanggap dengan lingkungan yang cepat berubah dan melakukan inovasi peningkatan pelayanan publik serta perlindungan masyarakat, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan yang matang. Agar JFP BPOM lebih mendapat pemahaman akan tugas dan fungsi seorang Perencana, maka diselenggarakanlah kegiatan Sarasehan Pejabat Fungsional Perencana dengan Ibu Kepala BPOM. Sarasehan dilaksanakan pada tanggal 01-02 Desember 2022 dan diikuti oleh Perencana baik di Pusat maupun UPT.



Gambar 4. 20 Pelatihan High Class Response Perencana BPOM

Rangkaian kegiatan hari pertama diisi dengan Pelatihan *High Class Response* Perencana BPOM. Pertemuan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

BPOM. Pelatihan ini bertujuan memberikan panduan terhadap Perencana untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan *High Class Response*, yaitu memberikan respon yang tepat sesuai dengan harapan customer (baik internal maupun eksternal) dan bahkan memberikan nilai tambah pada pekerjaan yang dilakukannya.



Gambar 4. 21 Sarasehan Pejabat Fungsional Perencana Dengan Ibu Kepala Badan POM

Rangkaian kegiatan hari kedua dibuka dengan sambutan dan laporan dari Ibu Sekretaris Utama BPOM, dan sekaligus memandu jalannya kegiatan Sarasehan bersama Ibu Kepala BPOM. Kegiatan juga

dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Utama BPOM. Dari diskusi, terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dalam pembinaan JFP yaitu a) pemenuhan kebutuhan formasi JFP di BPOM; b) evaluasi tugas dan output yang dilakukan oleh Perencana BPOM dan c) pengembangan kompetensi Perencana BPOM, terutama dalam kemampuan menulis dan *strategic thinking*.

#### IKU 4: NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

##### A. KOORDINASI, EVALUASI DAN VERIFIKASI TAGIHAN BELANJA BADAN POM

Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Verifikasi Tagihan Belanja ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian tagihan dari Satker yang ada di BPOM oleh pejabat penguji SPP/SPM sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku. Dengan kegiatan ini diharapkan terjaminnya seluruh proses administrasi dan dokumen pertanggungjawaban anggaran melalui pemeriksaan dan pengujian yang didasarkan pada standard dan peraturan pelaksanaan anggaran. Pejabat Penerbit SPM, yang melaksanakan pengujian atas setiap tagihan (SPP), mempunyai tugas sangat berat, mengingat disanalah palang pintu terakhir penggunaan anggaran pada masing-masing kantor/satuan kerja dilakukan. Metodologi pelaksanaan dengan melakukan verifikasi terhadap tagihan belanja BPOM atas setiap dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran yang diajukan oleh unit kerja yang ada di Satker Sekretariat Utama, dan evaluasi



mingguan pada setiap dokumen pembayaran (SPM) yang telah dikeluarkan. Dalam pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi SPP dan SPM dilakukan oleh Pejabat Penguji Tagihan.



Dalam kegiatan pelaksanaan verifikasi tagihan belanja BPOM juga dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran setiap unit kerja yang ada di satuan kerja Sekretariat Utama. Rapat koordinasi dengan para pengelola keuangan yang dilakukan setiap satu bulan sekali dengan tujuan untuk

mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan pencairan anggaran dan rekonsiliasi terhadap data realisasi unit kerja. Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan pertemuan atau sosialisasi terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.



Gambar 4. 22 Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2022

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2022, Kelompok Substansi Keuangan menyosialisasikan Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada pengelola keuangan pada satker pusat Badan POM. Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman satuan kerja terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan regulasi pelaksanaan



APBN secara umum, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas guna mendukung tertibnya Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban yang tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Belanja pemerintah saat ini selain diharapkan dapat memberi multiplier effect perekonomian nasional juga harus diperhatikan kualitasnya. Oleh sebab itu, selaku pemegang otoritas pelaksanaan anggaran sekaligus pembina Satker K/L di bidang perbendaharaan negara, Ditjen Perbendaharaan berinisiatif melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran yang lebih intensif dari tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun 2021, untuk tahun 2022, penilaian pelaksanaan anggaran 2022 menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang telah direformulasi. Reformulasi IKPA adalah Perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.

Reformulasi Penilaian IKPA Tahun 2022 itu ditujukan untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik dengan penguatan value- for-money, yang semula mencakup 4 aspek terdiri dari 13 (tiga belas) indikator menjadi 3 aspek terdiri dari 8 (delapan) indikator IKPA.

Hasil monev pelaksanaan anggaran akan diapresiasi oleh Ditjen Perbendaharaan dalam bentuk memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga dengan kinerja anggaran terbaik. Hal ini untuk mendorong penyerapan tingkat anggaran yang sehat dan diharapkan juga bisa membantu pola penyerapan anggaran di tiap kementerian lembaga lebih merata di sepanjang tahun sesuai perencanaan, sehingga menyehatkan "cashflow" kas pemerintah dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.



Mengacu Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 5/PB/2022, pengukuran IKPA meliputi aspek:

- Aspek kualitas perencanaan anggaran dengan indikator: revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA;
- Aspek kualitas pelaksanaan anggaran dengan indikator: penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan Dispensasi SPM; dan
- Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan indikator: capaian output.

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara/lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
- Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;
  - pengendalian belanja negara; dan
  - peningkatan efisiensi anggaran belanja.

Untuk mempertegas Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dimana masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna Anggaran diberi amanat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas APBN secara berkala dan menyeluruh sesuai periode dan aktivitasnya. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi ukuran evaluasi kinerja



pelaksanaan anggaran dengan melihat sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Mengingat nilai kinerja level instansi merupakan agregat dari nilai kinerja satker-satkernya, maka untuk memastikan nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPOM berada pada rentang sangat baik, harus dipastikan pelaksanaan level satker juga bernilai kinerja sangat baik.



Gambar 4. 23 Dokumentasi pembinaan pelaksanaan anggaran: (A) BPOM di Ambon, (B) Loka POM di Kab. Kediri, (C) Loka POM di Kab. Sorong, dan (D) BBPOM Banda Aceh.

Pembinaan pelaksanaan anggaran merupakan intervensi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pembina pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan BPOM bersama dengan tim dari direktorat teknis di kementerian keuangan seperti Direktorat Pelaksana Anggaran, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, maupun Direktorat PNPB yang akan dilibatkan sebagai narasumber maupun dalam penyusunan materi pembinaan.

Untuk tahun 2022 telah dilaksanakan pembinaan terhadap 22 satker yang ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:



- ✓ Merupakan satker baru yang memerlukan pengawalan secara intensif terkait pemahaman terhadap penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, norma-norma waktu sesuai regulasi, tugas fungsi dan kewenangan pejabat pembendaharaan satker.
- ✓ Merupakan satker dengan nilai IKPA rendah pada tahun sebelumnya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berjalan.
- ✓ Merupakan satker dengan nilai IKPA rendah berdasarkan hasil penilaian triwulan berjalan di TW 1 dan 2 TA 2022, untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat meningkat kinerjanya pada TW 3 dan TW 4 tahun berjalan.

### C. FGD IKPA DAN INDIKATOR CAPAIAN OUTPUT

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.

Sesuai arahan pimpinan Ibu Menteri Sri Mulyani, tahun 2022 akan difokuskan pada kualitas belanja, salah satu prinsip dalam reformulasi IKPA 2022 adalah mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja yang mengutamakan capaian output sebagai indikator kinerja superior (bobot paling tinggi) sekaligus mendorong pencapaian *outcome* lebih awal.

Berbagai perubahan dan perbaikan tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan pemahaman dari Satker terkait proses bisnis serta teknis pengoperasian sistem aplikasinya. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sosialisasi OMSPAN atas IKPA serta Mekanisme



Pelaporan dan Monev Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2022. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran merupakan forum diskusi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada pengelola keuangan (PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu) tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 dan meningkatkan nilai IKPA Satuan Kerja terkait capaian output. Narasumber berasal dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB, Kementerian Keuangan dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Peserta adalah Pejabat perbendaharaan yang dipersiapkan dan atau yang sudah bertugas dalam pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan yang berasal dari seluruh satuan kerja dilingkungan Badan POM.

Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2022 telah dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah pada tanggal 6-7 April 2022 dengan mengundang Para Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan POM.

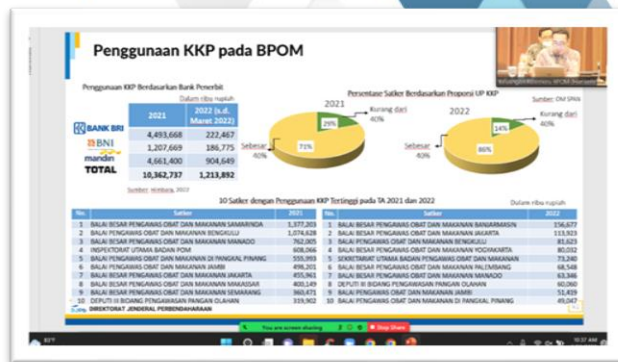


Gambar 4. 24 Workshop evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA) dan Sosialisasi OMSPAN atas IKPA serta mekanisme pelaporan dan monev capaian output pada Aplikasi SAKTI tahun 2022

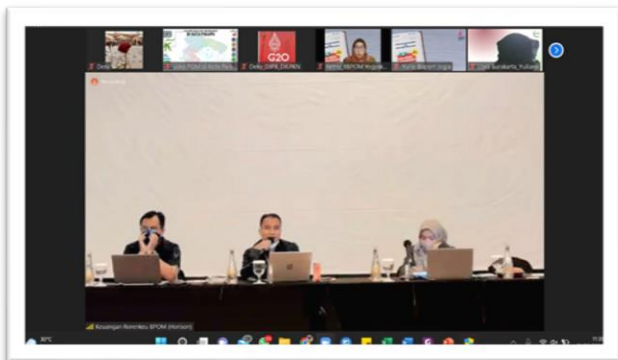


## D. WORKSHOP DIGITAL PAYMENT DAN IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH

Pengelolaan keuangan negara telah mengalami modernisasi dengan adanya digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi, implementasi *Virtual Account* dan Kartu Kredit Pemerintah membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satker, perbankan, dan vendor (UMKM).



Alur proses pengadaan barang/jasa melalui *marketplace* hampir sama dengan cara belanja melalui *marketplace* yang telah banyak digunakan di masyarakat seperti Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Satker yang memerlukan pengadaan barang/jasa dapat memilih barang melalui katalog sistem *marketplace* dan dapat bernegosiasi dengan vendor *marketplace* terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Setelah *deal*, maka satker dapat melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem *marketplace* dan memilih cara bayar KKP.



Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang implementasi *digital payment* dan Kartu Kredit Pemerintah, Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan Workshop *Digital Payment* dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. Narasumber berasal dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran III,

KPPN Jakarta VI, serta mengingat bank mitra satker-satker di daerah juga berbeda-beda, dalam pertemuan ini juga dihadirkan narasumber dari 4 (empat) bank dimana rekening induk BPOM berada yaitu BRI, BNI 46, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Workshop dilaksanakan secara luring dan daring dengan peserta pengelola keuangan (PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan operator user Digipay) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM. Pelaksanaan luring bertempat di Hotel Horison Bekasi pada tanggal 19–20 Mei 2022.



Gambar 4. 25 Workshop Digital Payment dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

## IKU 5: PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BPOM YANG DISUSUN DENGAN SAP

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 5 adalah:

### A. PELAKSANAAN BIMTEK SISTEM AKUNTASI INSTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (PUSAT DAN BALAI)



Gambar 4. 26 *Sharing Knowledge* kepada petugas di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada

petugas pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di Badan POM yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan meliputi:

- ✓ Memberikan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
- ✓ Memberikan pengayaan kepada Satuan Kerja tentang teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang sesyau dengan peraturan perundangan yang berlaku.



- ✓ Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- ✓ Memberikan kesamaan persepsi serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di badan POM yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- ✓ Tertibnya pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di Badan POM sebagai wujud pertanggungjawaban yang tertib, dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Merupakan kegiatan prioritas yang mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai standar PSAP.

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- ✓ Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa materi-materi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
- ✓ Melakukan Analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja yang dibina.
- ✓ Menelusuri kebenaran dokumen sumber yang telah diinput.
- ✓ Memastikan bahwa rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan dengan benar.



Gambar 4. 27 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) orang petugas pusat ke Satuan Kerja di seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2022, kegiatan ini dilaksanakan di 19 (Sembilan belas) Satuan Kerja.

## B. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BPOM

Badan POM sebagai Lembaga negara yang akuntabel memiliki kewajiban untuk Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri



Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan adanya pandemic Covid-19 yang mengubah Sebagian besar proses bekerja, Badan POM tentunya tetap berusaha tanggap dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas fungsinya. Untuk memenuhi target tersusunnya Laporan Keuangan Badan POM, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan kegiatan “Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi” baik secara luring dan daring. Dalam kegiatan ini narasumber dari direktorat



Gambar 4. 28 Penyusunan LK TA 2021 Unaudited  
(24 s.d 29 Januari 2022)

APK Kementerian Keuangan turut menyampaikan materi terkait Penyusunan Laporan Keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh petugas dari Satuan Kerja yang merupakan Tim SAIBA, Persediaan, SIMAK, Tim Reviu dari Inspektorat dan pengelola keuangan lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, pada tahun 2022 dilaksanakan di:

1. Penyusunan LK TA 2021 Unaudited dilaksanakan fullboard meeting (luring) di hotel Grand Mercure Kemayoran pada tanggal 24 sd 29 Januari 2022, dengan mengundang narasumber Denny F. Singawirya, Wahid Ahyani, Alfons Redemptus dan Benny Suluh dari direktorat APK Kementerian Keuangan.
2. Penyusunan LK Semester I TA 2022 dilaksanakan di hotel Avenzel Cibubur pada tanggal 18 sd 20 Juli 2022 secara Hybrid yaitu Fullday meeting (luring) untuk peserta pusat dan Zoom meeting (daring) untuk peserta daerah, narasumber Wahid Ahyani, Faried Zamachsari, Enrico TD dari direktorat APK Kementerian Keuangan.



3. Penyusunan Laporan Keuangan TW III TA 2022 dilaksanakan secara daring (*zoom meeting*) pada tanggal 17 sd 21 Oktober 2022 dengan narasumber Agung Triyanto JM dan Wahyu Ragil Saputro dari SITP Kementerian Keuangan; Wahid Ahyani dan Yunian Yanto Priyoga dari direktorat APK Kementerian Keuangan.



Gambar 4. 30 Laporan Keuangan BPOM TA 2021 (Audited)



Gambar 4. 29 Penyusunan Laporan Keuangan TW III TA via Zoom

### C. FGD LAPORAN KEUANGAN BPOM

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan Laporan Keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan Laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing UAKPA. Selanjutnya Laporan Keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh UAPA menjadi Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, Laporan Keuangan yang wajib disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat/daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan



Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kepala satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran, menteri/pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, sampai dengan Presiden selaku kepala pemerintah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Keuangan.

Periode pelaporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 065/PB/2010 adalah Laporan Keuangan Semester dan Laporan Keuangan Tahunan. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan ini bertujuan agar laporan keuangan yang merupakan wujud pertanggungjawaban Menteri/Kepala Lembaga atas anggaran negara yang telah digunakan dapat tersusun secara akurat handal dan akuntabel.

Metodologi pelaksanaan kegiatan FGD dan Workshop Laporan Keuangan Badan POM ini adalah dengan melakukan rapat di Kantor dan pertemuan rapat di dalam Kota Jakarta maupun rapat melalui media daring. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh seluruh staf Bagian Keuangan, Staf dari Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Inspektorat Utama Badan POM, dan Pembina dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan.

FGD Laporan Keuangan BPOM yang dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Juklak Persediaan Alat Gelas dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022 di Avenzel Hotel Cibubur dengan narasumber Denny F. Singawirya dan Wahid Ahyani dari direktorat APK Kementerian Keuangan. Pertemuan kedua pada tanggal 10 Juni 2022 dilaksanakan di Margo Hotel Depok dengan narasumber Denny F. Singawirya dan Wahid Ahyani dari direktorat APK Kementerian Keuangan.
2. Sosialisasi Intensif Pajak untuk Wajib Pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 dilaksanakan di Harris Hotel Bekasi pada tanggal 5 September 2022 dengan narasumber Yudha Wijaya, M. Lintang Theodikta, Dwi Langgeng Santos.
3. In House Training Modul Pelaporan GLP dilaksanakan di hotel Aryaduta Menteng dengan narasumber M. Priandi, Ahmad Fuad Zain dari SITP, dan Wahid Ahyani dari direktorat APK Kementerian Keuangan.



#### **D. KOORDINASI PEMBENTUKAN UAPPA WILAYAH**

---

Koordinasi Pembentukan UAPPA Wilayah dilaksanakan pada tanggal 29 sd 30 Juni 2022 di Balai Besar POM Denpasar dengan mengundang narasumber Denny F. Singawirya dan Wahid Ahyani dari direktorat APK Kementerian Keuangan, Eka Suparta dan Doni Pradana Ferari dari Kanwil DJPB Provinsi Bali.

#### **E. WORKSHOP LAPORAN KEUANGAN**

---

Workshop Laporan Keuangan dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juni 2022 di Denpasar Bali, berupa Penyuluhan SAI yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI

#### **F. PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL DAN PENYUSUNAN LAPORAN PNBP BADAN POM**

---

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti Penerimaan Negara pada umumnya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak juga membutuhkan sebuah sistem pencatatan untuk mendukung akuntabilitas pengelolaannya. Pencatatan terhadap transaksi penerimaan sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan oleh dua pihak, yaitu oleh pihak Instansi Pemerintah pemungut PNBP dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib setor dalam melakukan pembayaran ke kas negara atas semua jenis setoran, pemerintah telah menyiapkan modul penerimaan negara (MPN) yang menggantikan sistem penerimaan yang lama (SISPEN, MP3 ,dan EDI). MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan



pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem perbendaharaan negara dan Anggaran Negara. Dengan diimplementasikannya MPN ini diharapkan :

- peningkatan validitas nilai penerimaan negara.
- Peningkatan akuntabilitas penerimaan negara.

Salah satu bagian dari sistem MPN adalah Sistem Informasi PNB Online (SIMPONI), dimana merupakan sistem billing yang dikelola oleh DJA untuk memfasilitasi pembayaran PNB dan penerimaan non anggaran. SIMPONI memberi kemudahan bagi Wajib Bayar untuk membayar PNB dan penerimaan non anggaran melalui berbagai channel pembayaran seperti teller (Over The Counter), ATM (Automatic Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), maupun internet banking. Dengan demikian, masyarakat bebas memilih berbagai alternatif metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan terkait penatausahaan PNB, DJPB telah membangun Aplikasi SPAN. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan.

SPAN digunakan untuk mendukung pengelolaan Keuangan Negara dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Oleh karena itu, untuk mendukung data SPAN dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, pengembangan Sistem Aplikasi PNB Satker menjadi begitu penting. Untuk itu, Badan POM telah membangun Sistem Penerimaan PNB Fungsional Badan POM yang telah terintegrasi dengan SIMPONI dan SPAN dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNB Fungsional Badan POM.



## SASARAN KEGIATAN 2:

### **MENINGKATNYA KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

#### **IKU 6: INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 6 adalah:

#### **A. SURVEI KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

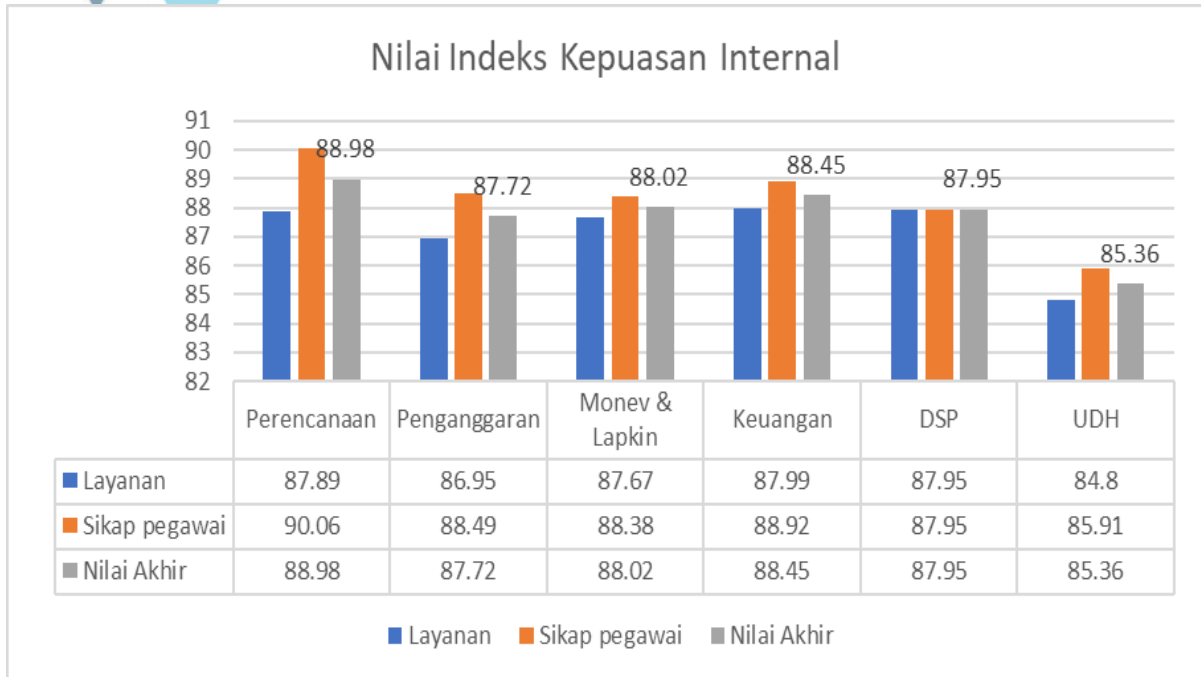
Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan. Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
3. penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM;
4. penyiapan koordinasi bahan substansi strategis pimpinan;
5. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Salah satu Sasaran Kegiatan di Biro Perencanaan sesuai dengan Revisi Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024 yaitu Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan. Oleh karena itu pada tahun 2022 Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan survei kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

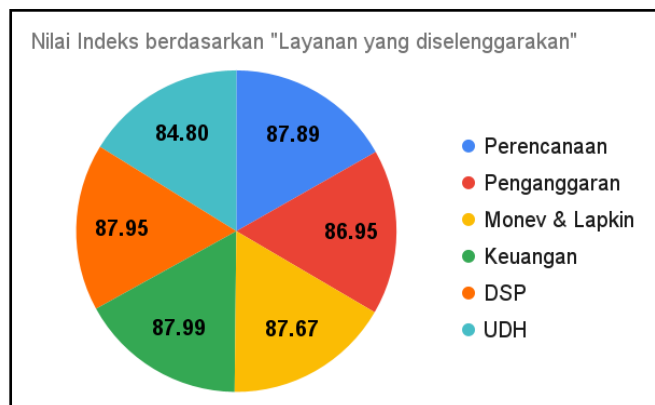


Pada Januari tahun 2023 telah terbit laporan hasil survey evaluasi Kepuasan Pelayanan Internal di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022. Layanan yang dimaksud merujuk pada Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal Unit Biro Perencanaan dan Keuangan ini diperoleh dari rata-rata jumlah nilai indeks dari enam Substansi. Layanan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2022.



A. Tabel Indeks berdasarkan tanggapan pada “Layanan yang diselenggarakan” Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	87,89
2	Penganggaran	86,95
3	Monev & Lapkin	87,67
4	Keuangan	87,99
5	DSP	87,95
6	UDH	84,80

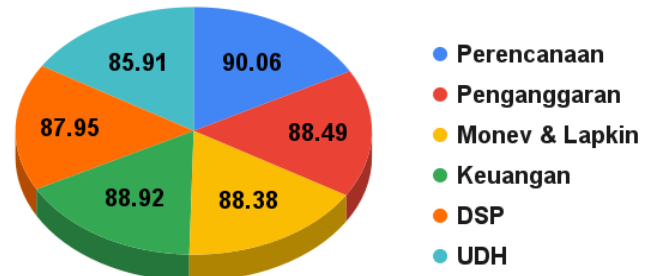




B. Tabel Indeks berdasarkan tanggapan pada “Layanan yang diberikan pegawai” di Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	90,06
2	Penganggaran	88,49
3	Monev & Lapkin	88,38
4	Keuangan	88,92
5	DSP	87,95
6	UDH	85,91

Nilai Indeks berdasarkan "Layanan yang diberikan pegawai"



C. Nilai Indeks Akhir Layanan Kepuasan Internal Biro Perencanaan dan Keuangan 2022.

No.	Kelompok Substansi	Nilai Indeks
1	Perencanaan	88,98
2	Penganggaran	87,72
3	Monev & Lapkin	88,02
4	Keuangan	88,45
5	DSP	87,95
6	UDH	85,36
Nilai Indeks Unit		<b>88,22</b>



Gambar 4. 31 Laporan Hasil Survey Kepuasan Layanan Tahun 2022

Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **88,22** (Delapan puluh delapan koma dua puluh dua) dalam hal ini masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

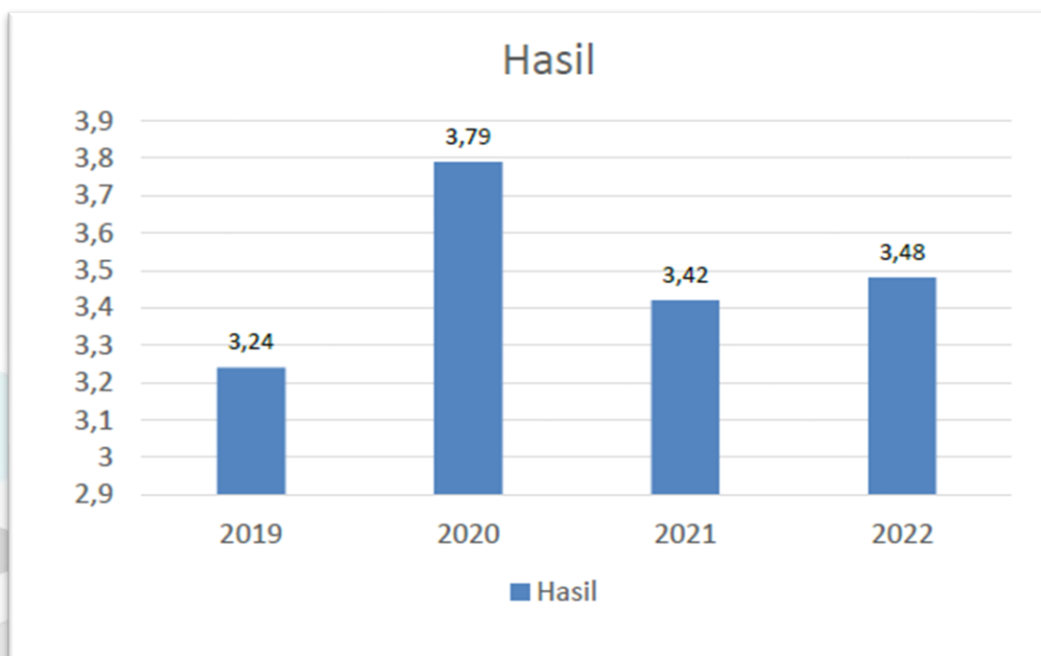


B. SURVEI INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) ANGKA YANG MENUNJUKKAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja dukungan manajemen, maka survei dilakukan kepada unit kerja pusat dan UPT yang menerima layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.

- Survei dilaksanakan di Bulan Maret (TW I)
- Merupakan Indikator Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan
- Dilakukan melalui online dengan tools yang diberikan Inspektorat Utama pada aplikasi SAPA APIP

Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) Angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik. Hasil survei Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar **3,62** (syarat 3,2) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB dan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar **3,48** (Tiga koma empat puluh delapan). Syarat 3,6 dibawah persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB yang dihimpun oleh Inspektorat pada aplikasi SAPA-APIP pada Tahun 2022.



Gambar 4. 32 Nilai Indeks IPP-IPAK Tahun 2022

**SASARAN KEGIATAN 3:****MENINGKATNYA KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,  
MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN  
PELAPORAN KEUANGAN SATKER SESUAI PEDOMAN****IKU 7: PERSENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN,  
MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN  
PELAPORAN KEUANGAN SATKER TERHADAP PEDOMAN**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 7 adalah:

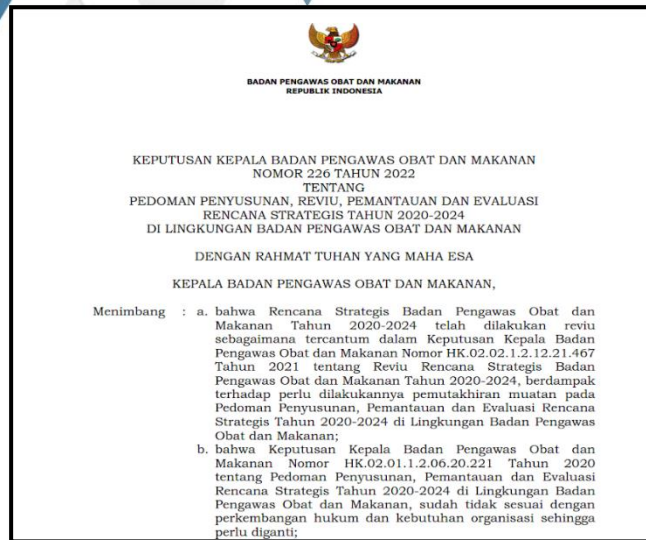
**A. PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN, REVIU, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN  
BPOM**

Sebagai wujud upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan BPOM, pada Tahun 2020 BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM yang memuat tata cara dan mekanisme penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker hingga pelaksanaan monitoring serta evaluasinya. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis serta adanya berbagai tuntutan suprasistem dan berbagai peraturan terkini terkait akuntabilitas kinerja, maka pada tahun 2021, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menginisiasi dilakukannya perubahan terhadap pedoman tersebut yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 226 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM pada Tanggal 1 November 2022. Adapun pada revisi pedoman tersebut telah dilakukan penyempurnaan Langkah pengendalian dalam implementasi Renstra, antara lain:

- ✓ Penambahan Bab terkait mekanisme reviu Renstra yang selama ini belum di atur secara khusus.
- ✓ Penekanan terhadap mekanisme revisi Renstra dan perubahan target tahunan dalam Renstra melalui RKT.
- ✓ Penambahan mekanisme terkait penetapan indikator SMART-C.
- ✓ Serta penajaman mekanisme evaluasi paruh waktu dan akhir pelaksanaan Renstra.



- ✓ Selanjutnya, pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPOM pada tanggal 20 Desember 2022 secara hybrid.



Gambar 4. 33 Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM



Gambar 4. 34 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan paparan dalam rangka Sosialisasi Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM pada tanggal 20 Desember 2022



## B. PENYUSUNAN PETUNJUK OPERASIONAL (JUKOP) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TA 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan BOK pengawasan obat dan makanan sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khusus nonfisik yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penyusunan Jukop mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran  $n+1$ , Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan BA MM DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Proses penyusunan Jukop DAK nonfisik BOK POM antara lain:

1. Permintaan masukan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan kepada unit kerja teknis pengampu
2. Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu, dan/atau pakar terkait
3. Finalisasi dan harmonisasi Rancangan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan
4. Pengesahan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 4. 35 Finalisasi Penyusunan Jukop DAK Nonfisik POM TA 2023

Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu dilakukan secara daring maupun luring. Pertemuan secara luring dilaksanakan pada 26-27 September 2022 di Amarossa Hotel Bekasi dan Finalisasi dilakukan pada 20 Desember 2022 di Novotel Hotel Mangga Dua.



Gambar 4. 36 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Tahun 2022

Rapat Evaluasi Nasional (REN) Badan POM tahun 2022 dilaksanakan pada 7-9 November 2022 di Jakarta dengan mengangkat tema “Satu Langkah dalam Kerja Nyata, Mewujudkan Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan rencana strategis BPOM 2020-2024 serta melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). REN 2022 dilaksanakan secara kombinasi luring yang dihadiri oleh sekitar 150 orang dan daring yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Jakarta.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Badan POM yang diikuti oleh seluruh peserta baik luring maupun daring, dilanjutkan dengan arahan Kepala Badan POM RI yang sekaligus secara resmi membuka Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2022. Beliau menyampaikan bahwa Badan POM adalah **regulator dan pengawas yang melaksanakan tugas dan fungsi tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga ekonomi -industri-perdagangan, riset dan pengembangan, serta penegakan hukum** untuk melindungi masyarakat dari kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan. Saat ini, Badan POM sedang menjadi sorotan publik dikaitkan dengan cemaran etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG) pada sirup obat yang diduga menyebabkan kejadian tidak



diinginkan kasus gagal ginjal akut (GGA) pada anak. Pada satu sisi, tragedi ini menjadi keprihatinan kita. Pada sisi lain, terbangun kesadaran perlunya transformasi dan perbaikan sistem jaminan keamanan dan mutu obat. Kejadian ini menjadi momentum



Gambar 4. 37 Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito, memberikan arahan pada Rapat Evaluasi Nasional Badan POM Tahun 2022

kesadaran pentingnya penguatan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, termasuk penguatan aspek legal dan kelembagaan Badan POM. Kepala Badan POM juga menyampaikan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak atas komitmen dan kinerja luar

biasa hingga saat ini yang berkat kerja keras jajaran Badan POM, pada tahun 2022 kembali meraih sejumlah penghargaan di bidang pelayanan publik, kehumasan, perlindungan konsumen, manajemen SDM, dan sebagainya.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber lintas K/L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agenda berikutnya adalah evaluasi kinerja dari masing-masing eselon I yaitu Sekretaris Utama, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputy Bidang Penindakan; Inspektur Utama; dan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masing-masing eselon I kemudian melakukan identifikasi masalah dan menentukan rencana tindak lanjut maupun upaya perbaikan yang diperlukan. Pada sesi Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015, disampaikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan BPOM wajib menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.96 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM. Seluruh Unit Kerja diharapkan sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2023.

Hasil evaluasi yang diperoleh dalam REN 2022 didokumentasikan dalam Prosiding REN Badan POM 2022 dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Badan POM di tahun-tahun berikutnya.



D. PEMANTAPAN MEKANISME PENGANGGARAN DI BB/BPOM

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Balai Besar/Balai POM dilakukan melalui kegiatan visitasi/kunjungan asistensi penganggaran dan asistensi penyusunan RKA-K/L di beberapa Balai Besar/Balai POM serta Loka POM yang diidentifikasi membutuhkan asistensi lebih lanjut, yaitu Balai Besar/Balai POM di Banjarmasin, Batam, Bandung, Serang, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Bengkulu, Padang, Sofifi, Ambon dan Mataram. Asistensi ke Loka POM di Tasikmalaya, Tangerang dan Bogor, pada rentang waktu Januari hingga Agustus 2022.

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi adalah melakukan verifikasi dan *rapid appraisal* terhadap usulan BB/Balai POM dan Loka POM terkait rencana kerja dan anggaran di 2023 baik yang sudah termuat dalam RKA-K/L maupun belum tertampung dalam RKA-K/L 2023. Pendampingan/asistensi RKA-K/L maupun asistensi penganggaran kepada unit Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dilaksanakan oleh pejabat/staf dari Kelompok Substansi Penganggaran ke Balai Besar/Balai POM dan Loka POM selama 2 sampai 3 hari per kunjungan.



Gambar 4. 39 Asistensi Anggaran BBPOM Banjarmasin (13-15 Juli 2022)



Gambar 4. 38 Asistensi Anggaran BBPOM Ambon (17-19 Oktober 2022)



Gambar 4. 40 Asistensi Anggaran BBPOM Denpasar (23 Desember 2022)



## E. SUPERVISI PENGANGGARAN BERSAMA INSTANSI TERKAIT

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Komisi IX DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan, Kunjungan Kerja Spesifik dan Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Vaksin Covid-19. Kunjungan Kerja Spesifik dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kesehatan ke Provinsi Lampung, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat pada tanggal 2 – 3 September 2022 dan dalam rangka pengawasan penanganan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak ke Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa Timur pada tanggal 9 – 10 November 2022. Komisi IX DPR RI juga melakukan Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 terkait pengawasan ketersediaan vaksin Covid-19 ke Provinsi Banten dan Jawa Barat pada tanggal 1 – 2 Desember 2022.

Kegiatan ini merupakan pendampingan kunjungan kerja Anggota Komisi IX oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPOM. Kegiatan ini dilakukan sejumlah 24 kali yang dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Desember 2022.

## F. PENYIAPAN BAHAN DAN PENGAWALAN RDP DENGAN MITRA KERJA BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap penggunaan APBN memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran. Sesuai pembagian tugas komisi, BPOM bermitra dengan Komisi IX DPR RI yang memiliki lingkup tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Koordinasi dan persetujuan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dapat dilakukan dengan tujuan pendalaman dan persetujuan anggaran serta RDP yang bertujuan khusus seperti tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat.



Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun bahan paparan pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Mitra Kerja BPOM Mengingat bahan tersebut perlu dipersiapkan secara matang dan akurat, sehingga dibutuhkan suatu pembahasan.

Selain itu, kegiatan ini juga berupa pengawalan RDP yang diikuti peserta dari BPOM di Gedung DPR RI maupun dalam bentuk Rapat Konsinyering. Pelaksanaan kegiatan RDP antara lain :

- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2023 pada 8 Juni 2022;
- ✓ RDP Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 pada 14 Juni 2022;
- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2023 pada 23 Juni 2022;
- ✓ RDP Pembahasan RKA-K/L Tahun 2023 dan Pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi pada 31 Agustus 2022;
- ✓ RDP Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2023 pada 7 September 2022;
- ✓ RDP Penyesuaian RKA K/L Tahun 2023 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI pada 21 September 2022;

## **G. KOORDINASI PENGANGGARAN DENGAN LINTAS SEKTOR**

Kegiatan yang dilakukan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama lintas sektor antara lain pada tanggal 23 - 25 maret di Tarakan – Balikpapan; Pembahasan Rekomendasi Usulan Prioritas Pengadaan Alat Laboratorium TA 2023 tanggal 24 Juni 2022 di Hotel Horison Bekasi; serta Pertemuan Koordinasi Awal Kegiatan dan Anggaran TA 2023 tanggal 20 – 21 Desember 2022.

## **H. PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)**

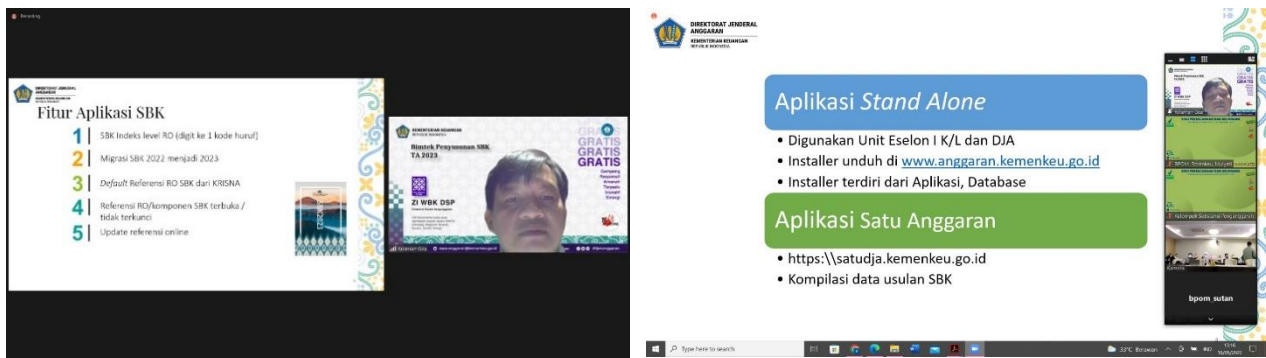
Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM membutuhkan standar biaya khusus dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku di BPOM dan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L.

SBK merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) dan salah satu fungsinya sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L. SBK juga berfungsi untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran dan alat monitoring dan evaluasi pencapaian output.



Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan cara melakukan revidi dari SBK yang telah dilaksanakan dan masukan terhadap usulan SBK pada tahun 2022. SBK tahun 2023 dilaksanakan untuk kegiatan penyidikan di UPT dan kegiatan Intelijen.

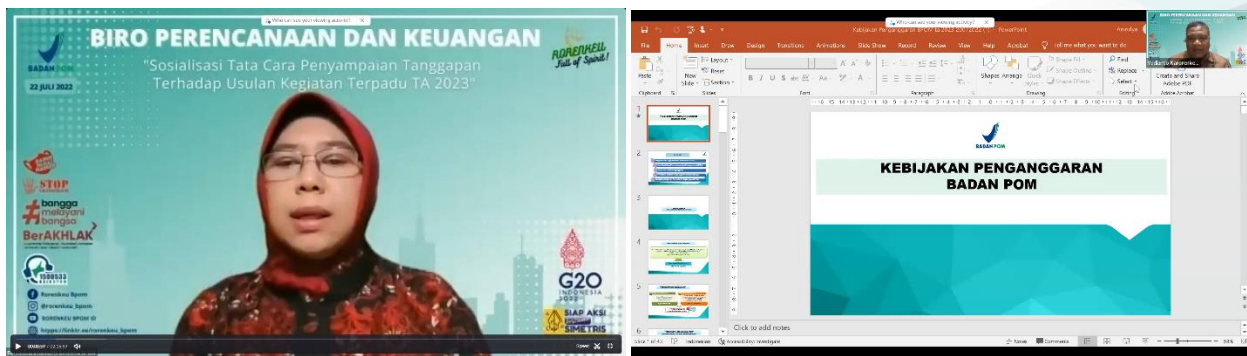
Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Amaroossa Grande Bekasi.



Gambar 4. 41 Kegiatan Penyusunan Usulan SBK Badan POM TA 2023

## I. WORKSHOP PENGANGGARAN KEGIATAN TERPADU PUSAT DAN UPT BPOM

Arah Kebijakan Deputy I, II, III, IV, dan Sekretariat Utama Tahun 2023 telah ditetapkan melalui pelaksanaan Rapat Kerja Nasional BPOM Tahun 2022. Arah kebijakan tersebut lebih lanjut dijabarkan ke dalam strategi maupun kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan Program Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, situasi internal, dan tantangan global. Selanjutnya strategi maupun kegiatan prioritas masing-masing unit kerja perlu dituangkan secara lebih rinci dalam perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka penyusunan Kegiatan Terpadu TA 2023, telah dilakukan Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Tanggapan Terhadap Usulan Kegiatan Terpadu TA 2023 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 22 Juli 2022.



Gambar 4. 42 Foto Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Tanggapan Terhadap Usulan Kegiatan Terpadu TA 2023



Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh Unit Eselon II Pusat dan seluruh UPT POM. Hasil/Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kumpulan dokumen lembar kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Unit Pusat dan UPT, kemudian ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BPOM tentang Rencana Kegiatan Terpadu di Lingkungan BPOM TA 2023.

### J. PENYELARASAN PENGANGGARAN KEBIJAKAN BARU BPOM TA 2022

Sehubungan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan TA 2022, telah dilaksanakan pertemuan koordinasi bersama dengan lintas sektor. Untuk itu, telah dilakukan pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2022 dalam rangka persiapan Pelaksanaan Kegiatan KIE dengan mengundang Koordinator/ Subkoordinator/Pejabat Fungsional BPOM Pusat.

Pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2022 bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui KIE bersama dengan lintas sektor. Output kegiatan ini adalah kesepakatan tata cara pelaksanaan kegiatan KIE TA 2022.

Pertemuan Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Februari 2022 di Aryaduta Menteng.



**SASARAN KEGIATAN 4:  
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN  
PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN  
KEUANGAN BPOM**

**IKU 8: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN  
PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN  
KEUANGAN BPOM YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 8 adalah:

**A. PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN BADAN POM TAHUN 2021**



Gambar 4. 43 Buku Laporan Tahunan  
Badan POM Tahun 2021

Laporan tahunan merupakan sumber informasi tentang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam satu tahun anggaran. Laporan hasil pengawasan Obat dan Makanan ini, yang disusun berdasarkan data-data dari unit kerja di pusat dan daerah, dapat memberikan gambaran yang berguna bagi masyarakat/konsumen mengenai perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Selain masyarakat, instansi terkait juga dapat melihat keberhasilan program yang dikerjakan bersama BPOM di dalam laporan tahunan ini.

Selain itu, laporan tahunan juga penting untuk menegaskan satu azas pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan laporan tahunan diperlukan data-data yang valid dan dapat dipercaya, kajian yang mendalam serta analisis yang tajam. Laporan yang disusun berdasarkan sumber data yang sah akan menghasilkan informasi yang berharga baik untuk keperluan eksternal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang



terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri, maupun untuk keperluan internal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang matang dan handal di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan BPOM menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode tahun 2021 yang mencakup kegiatan standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat dengan maksud untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap daerah membuat standar tersendiri. Kegiatan lain adalah penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dengan maksud agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Kegiatan lain yang ada dalam laporan tahunan BPOM adalah pengawasan setelah beredar (post-market control). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji di laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kegiatan selanjutnya yang disajikan dalam laporan tahunan BPOM tahun 2021 adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Sedangkan kegiatan terakhir pada laporan tahunan BPOM adalah manajemen atau tata



kelola pemerintah, fungsi ini sendiri bertugas untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di bidang Obat dan Makanan di Indonesia.

Di dalam laporan tahunan juga disampaikan upaya BPOM dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

## B. REFLEKSI AKHIR TAHUN 2022 DAN *OUTLOOK* 2023

Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Outlook 2023 dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 di Jakarta. Pada kegiatan tersebut dilaporkan terkait realisasi anggaran BPOM per 19 Desember 2022 adalah 94,3% di atas realisasi rata-rata nasional sebesar 86,58% atau peringkat 11 dari 82 K/L. Sesuai arahan Kepala Badan POM, seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diminta agar memaksimalkan upaya mencapai realisasi output dan anggaran minimal 99% di mana realisasi anggaran TA 2021 sebelumnya adalah 99,15%. Pelaksanaan dan capaian tahun 2022 harus dievaluasi efektivitasnya dan dijadikan *lesson learned* untuk pengembangan serta peningkatan kualitas program kegiatan tahun 2023. Keterbatasan anggaran BPOM mengharuskan dilakukannya prioritas kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitasnya, suatu kegiatan tidak harus terus menerus ada setiap tahun jika tidak memiliki urgensi dan kebermanfaatannya signifikan bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menyampaikan bahwa pada tahun 2022 Badan POM telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif berupa simplifikasi dan percepatan registrasi, percepatan penilaian CPOB dan CDOB, percepatan penerbitan SKI untuk obat, bahan obat dan vaksin khusus COVID-19 serta integrasi dan simplifikasi pelayanan publik, seperti integrasi *Online Single Submission*, integrasi 4 Kementerian/Lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyampaikan sepanjang Tahun 2022 telah diterbitkan 6 regulasi untuk menunjang



pengawasan dan meningkatkan daya saing obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Selain itu telah dilakukan integrasi dan simplifikasi dalam rangka percepatan registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, percepatan pelayanan publik selama masa pandemi COVID-19, fleksibilitas dan fasilitasi dalam pengawasan *pre market* dan *post market*, fasilitasi pendampingan uji pra klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Fasilitasi yang dilakukan untuk mendukung penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Seluruh kegiatan tersebut di atas memberikan hasil meningkatnya jumlah produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memperoleh izin edar. Selain daripada itu juga telah dilakukan pendampingan UMKM untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM dan pendampingan hilirisasi riset obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengawasan riset dan hilirisasi untuk mendukung kemandirian nasional bahan baku obat bahan alam dan ketahanan sediaan farmasi.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada penjelasannya menyampaikan Percepatan Pelayanan Publik Bidang Pangan Olahan dilakukan melalui peningkatan kemudahan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Undang - Undang Cipta Kerja, intensifikasi percepatan proses perizinan melalui jemput bola terutama bagi UMK, pelatihan *Registration Officer* (RO) Pangan Olahan, peningkatan efektifitas pengawasan *post market*, pendampingan pelaku usaha Pangan Olahan, pengawalan inovasi Pangan Olahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.

Deputi Bidang Penindakan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yaitu perkuatan koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam Operasi Terpadu/Gabungan, penguatan Operasi Intelijen, penguatan Operasi Penindakan, *profiling* peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal secara daring, pembangunan sistem cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan fungsi deteksi dini dan penggalangan *stakeholder*, penguatan pengawasan wilayah kepulauan terluar dan terpencil dengan pemenuhan sarana transportasi air.

Pada kegiatan ini, disampaikan pula capaian pengawasan intern BPOM dengan meraih hasil penilaian yang baik untuk SAKIP, indeks RB, dan termasuk juga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut serta indikator-indikator lainnya. Sapaian ini agar dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud nyata

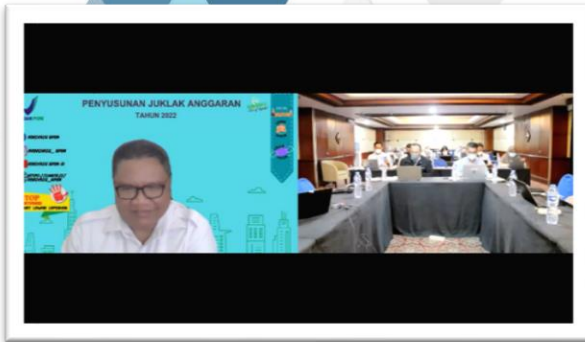


komitmen BPOM melaksanakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sampai dengan terselenggaranya kegiatan ini, BPOM telah meraih berbagai penghargaan di berbagai bidang yaitu pada bidang sumber daya manusia, kehumasan, hukum, dan Kerjasama. Penghargaan tersebut diantaranya yaitu BKN Award 2022 dengan predikat Peringkat 1 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Lembaga Non Kementerian Tipe Besar dan Peringkat 2 Penerapan Pemanfaatan Data–Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Best Starter untuk Kategori “Berorientasi Pelayanan” dan Best Starter Overall Berakhlak, pada Kick Off ASN Culture Fest 2022 dari Kementerian PANRB pada bidang sumber daya manusia. Kemudian penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2022 kategori Silver untuk the best smart teamwork, Gold untuk Best of the Best Back Office, dan Platinum untuk The Best Agent Inbound Lembaga Publik dari Indonesia Contact Center Association (ICCA), BPOM meraih predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 dari Komisi Informasi Pusat, Anugerah Ikatan Pranata Humas Indonesia (Anugerah IPRAHUMAS) Tahun 2022 dengan predikat Lembaga Terbaik bidang Kehumasan dalam Kategori Instansi Pemerintah Subkategori Lembaga, Bronze Winner untuk Kategori Lembaga Pemerintah sub kategori Media Sosial dari ajang Public Relations Indonesia Awards 2022 (PRIA 2022) pada bidang kehumasan. Peringkat Ketiga pada Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kategori AA (Istimewa) Tahun 2022 Kategori Kementerian/Lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang hukum. Penghargaan Anugerah Mitra Kerjasama Pendukung Program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kategori Lembaga Instansi Pemerintah sebagai Lembaga dengan Dukungan Peningkatan dan Pengawasan Kesehatan bagi Insan Pendidikan Tinggi atas Program Pangan Aman *Goes to Campus* dalam Kerjasama.



C. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) DAN PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TAHUN 2022



Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dan dituangkan dalam DIPA dan POK tahun anggaran 2022, dalam proses pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Anggaran dan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan.

Dokumen tersebut disusun berdasarkan uraian, sifat dan proses yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, sehingga dalam implementasinya petunjuk teknis tidak dapat dipisahkan dari petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan POM.



Gambar 4. 44 Buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2022 bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus. Sementara Petunjuk Teknis Kegiatan tahun anggaran 2022 merupakan pedoman, khususnya bagi Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan terpadu dengan unit yang ada di pusat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan.



Rapat pembahasan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan tahun 2021 dilaksanakan pada 26 – 27 Januari 2022 di Hotel Lumire Jakarta secara *hybrid* (daring dan luring) dengan mengundang Narasumber Kementerian Keuangan, perwakilan Unit Eselon II Pusat serta UPT.



Gambar 4. 45 Pertemuan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Petunjuk Teknis Kegiatan Tahun 2022

#### D. PENYERAHAN DIPA PETIKAN BPOM 2023

Pelaksanaan dan capaian tahun 2022 harus dievaluasi efektifitasnya dan dijadikan *lesson learned* untuk pengembangan serta peningkatan kualitas program kegiatan tahun 2023. Keterbatasan anggaran BPOM mengharuskan dilakukannya prioritas kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektifitasnya, suatu kegiatan tidak harus terus menerus ada setiap tahun jika tidak memiliki urgensi dan kebermanfaatannya signifikan bagi masyarakat.

Presiden telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2023 kepada gubernur se-Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Kamis 1 Desember 2022.

Penyerahan DIPA Petikan BPOM 2023 dilaksanakan dengan mengundang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPOM Pusat, serta Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia pada tanggal 20 - 21 Desember 2022 di Novotel Jakarta Mangga Dua Square.



Gambar 4. 46 Kegiatan Penyerahan DIPA Petikan  
BPOM 2023

## E. PENYUSUNAN EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA BPOM 2020-2024

Agar pelaksanaan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dapat terjaga dan berhasil sesuai dengan yang telah direncanakan, setiap K/L selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra K/L secara tahunan melalui evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) K/L juga perlu melakukan evaluasi terhadap Renstra K/L baik pada tengah tahun pelaksanaan (mid term) dan akhir tahun pelaksanaan Renstra K/L. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Untuk itu, dalam rangka menjalankan amanat tersebut, pada tahun ketiga pelaksanaan Renstra, BPOM perlu melakukan evaluasi paruh waktu (mid term) Renstra BPOM Tahun 2020-2024 sebagai upaya pengawalan terhadap ketercapaian target Renstra serta peningkatan kinerja ke depan.

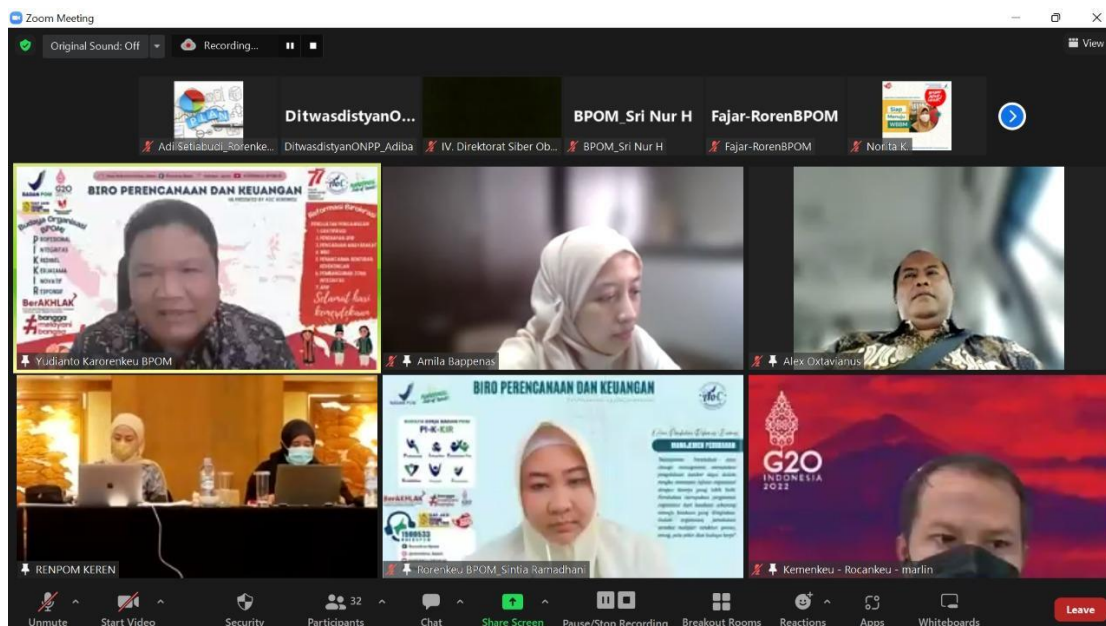
Terkait hal tersebut, dalam rangka penyusunan evaluasi paruh waktu Renstra BPOM Tahun 2020-2024, pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan mulai melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu tersebut dengan melibatkan Unit Kerja di Lingkungan BPOM serta Kementerian/Lembaga terkait.



Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi paruh waktu Renstra BPOM, antara lain:

1. Pembahasan evaluasi paruh waktu Renstra BPOM bersama Unit Kerja di Lingkungan BPOM, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Agustus 2022 untuk memperoleh masukan dan gambaran terkait kerangka serta ruang lingkup evaluasi paruh waktu Renstra sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengumpulan data kinerja dan anggaran Unit Organisasi/Satker Tahun 2020, 2021 dan TW III 2022 untuk digunakan sebagai input dalam evaluasi paruh waktu Renstra BPOM Tahun 2020-2024.
3. Pembahasan kerangka evaluasi paruh waktu, pengumpulan data kinerja, desain kuesioner evaluasi paruh waktu Renstra serta penyusunan draft awal evaluasi paruh waktu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 pada September – Desember 2022.

Kegiatan Penyusunan evaluasi paruh waktu Renstra BPOM ini akan berlanjut hingga Tahun 2023.



Gambar 4. 47 Pembahasan evaluasi paruh waktu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 bersama Unit Kerja di Lingkungan BPOM, Bappenas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Agustus 2022.



F. PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2045

*Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 atau selanjutnya disebut dengan Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang terkait pengawasan Obat dan Makanan. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Perencanaan Jangka Panjang POM 2045 disusun sebagai upaya proaktif mempersiapkan perencanaan POM yang lebih baik dalam periode jangka menengah (5 tahun). Bersamaan dengan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026-2045, maka Perencanaan Jangka Panjang POM 2045 juga akan memberikan inputan untuk RPJPN dan RPJMN. Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045 akan dijabarkan dalam bentuk rencana aksi per elemen strategis secara lebih spesifik dan operasional dalam periodisasi 5 (lima) tahun.

Pada tahun 2022, telah terbentuk Surat Keputusan (SK) Kepala BPOM Nomor 118 Tahun 2022 tentang Tim Intensif Finalisasi Penyusunan *Grand Design* Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2045. Proses penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045 telah melibatkan berbagai macam pihak, terutama pihak eksternal dan pakar untuk memberikan masukan dalam penyusunan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045. Selain itu, dokumen ini juga dibahas dengan para Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM.



Gambar 4. 48 Pembahasan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045 bersama Kepala BPOM, Pejabat Tinggi Madya, dan Pejabat Tinggi Pratama



Gambar 4. 49 Pembahasan Perencanaan Jangka Panjang POM Tahun 2045

## G. PENYUSUNAN RENCANA KERJA BPOM TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2023, Pagu Indikatif Badan POM Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.141.137.799.000,- (Dua Triliun Seratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 4,58% atau sebesar Rp102.865.552.000,- (Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Alokasi Anggaran Tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 17 Mei 2022 telah dilaksanakan *Trilateral Meeting* (TM) tahap 1 Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun Anggaran (TA) 2023 bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.



Gambar 4. 50 Trilateral Meeting Tahap I Penyusunan

Pertemuan dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Badan POM baik secara langsung (*luring*) maupun melalui *zoom meeting* (daring). Terdapat beberapa poin arahan yang disampaikan Plt. Deputi Bidang



Pemberdayaan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas terkait penyusunan Renja BPOM TA 2023, yaitu :

- ✓ Alokasi anggaran agar diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kesehatan, sesuai RPJMN 2020-2024 penuntasan target RPJMN.
- ✓ Renja BPOM yang akan disusun agar mendukung pelaksanaan RKP 2023, termasuk *Major Project* (MP) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dan MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- ✓ Terkait Regionalisasi laboratorium POM, perlu ditingkatkan terkait kerjasama pengujian dengan non-pemerintah serta dilakukan penyiapan laboratorium POM untuk Ibu Kota Negara (IKN).
- ✓ Agar dilakukan pemanfaatan teknologi informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan strategi komunikasi efektif terkait data pola penyakit, peta risiko pelanggaran obat dan makanan, resistensi antibiotika, *outbreak* keracunan pangan, dst.

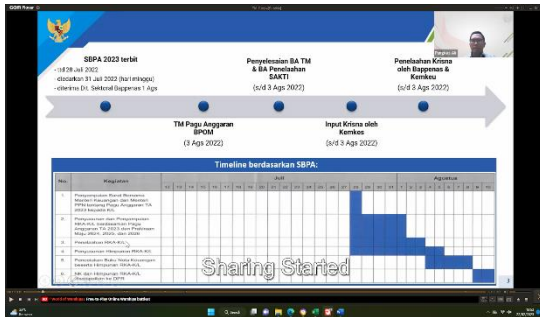
Adapun beberapa isu strategis penyusunan Renja BPOM TA 2023 yang dibahas pada pertemuan TM tahap I antara lain :

- ✓ Perubahan target sasaran pengawasan Obat dan Makanan pada RPJMN dan RKP 2023 yaitu pada dua indikator pembangunan Kesehatan “Persentase Obat yang memenuhi syarat” dan “Persentase Makanan yang memenuhi syarat”. Berdasarkan hasil pembahasan, Kementerian PPN/Bappenas meminta agar BPOM dapat melakukan *re-exercise* kembali terhadap usulan target tahun 2023 dan 2024 dengan penetapan target yang lebih optimis.
- ✓ Terkait arah pengembangan Laboratorium BPOM, Kementerian PPN/Bapenas dan Kementerian Keuangan meminta agar dilakukan penguatan khususnya pada UPT yang berada di wilayah penyangga Ibu Kota Negara meliputi BBPOM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, dan Loka POM di Balikpapan.
- ✓ Terkait rincian output pada Renja BPOM TA 2023, secara keseluruhan terdapat penurunan target sebanyak 5 % baik pada RO prioritas maupun non-prioritas atas dasar penurunan anggaran. Berdasarkan pembahasan, seluruh usulan target RO dapat disepakati dengan catatan dapat mengupayakan kenaikan target pada Indikator Rincian Ouput sehingga walaupun terdapat penurunan target RO, kualitas kinerja output masih meningkat.



- ✓ Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah dilakukannya finalisasi *exercise* target dan alokasi Renja BPOM TA 2023 serta input Renja hasil kesepakatan TMI pada Aplikasi Krisna Renja 2023.

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 Tanggal 27 Juli 2022 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKAKL TA 2023, pada tanggal 3 Agustus 2022 telah dilaksanakan TM tahap II Renja BPOM TA 2023 bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, dan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* (daring).



Gambar 4. 51 Trilateral Meeting Tahap II Penyusunan

Pagu Anggaran Badan POM TA 2023 adalah sebesar Rp2.215.929.014.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Rupiah) atau mengalami kenaikan 3,49% atau sebesar Rp74.791.215.000,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dari

Pagu Indikatif TA 2023. Beberapa poin kesepakatan dalam pembahasan Pagu Anggaran BPOM antara lain:

- ✓ Disepakati tambahan anggaran BPOM sebesar 74,791 M diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas laboratorium (sarana, prasarana, dan alat) di wilayah penyangga IKN, yaitu di Loka POM Balikpapan, BBPOM Samarinda, dan BPOM Tarakan yang merupakan bagian dari regionalisasi laboratorium di Kalimantan.
- ✓ BPOM perlu menyampaikan kepada Bappenas dan Kemkeu kondisi saat ini kapasitas sarana prasarana lab POM di wilayah penyangga IKN dan wilayah lainnya, rencana peningkatannya, dan gap pemenuhan kebutuhan sarana prasarana tersebut (termasuk anggaran).
- ✓ Usulan penyediaan Loka belum dapat disetujui pada TM Pagu Anggaran. Sebagai tindak lanjut dari TM, BPOM perlu menyampaikan justifikasi dan data dukung kondisi saat ini, kebutuhan, dan rencana detail ke depan, penguatan dan penyediaan Loka POM. Selanjutnya, BPOM perlu mendiskusikan dan menyepakati kembali dengan Bappenas dan Kemkeu.



Kesepakatan trilateral meeting tahap II ini menjadi bahan pegangan bersama pada saat pembahasan dengan DPR dan menjadi acuan utama pada finalisasi Renja K/L dan RKA K/L BPOM tahun 2023. Penelaahan RKAKL akan difokuskan untuk menelaah kewajaran anggaran dengan mengacu pada pencapaian target-target pembangunan dan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan mempertimbangkan TOR/RAB dan dokumen pendukung lainnya, serta diupayakan tetap menjaga target output yang telah disepakati.

### H. PENGEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

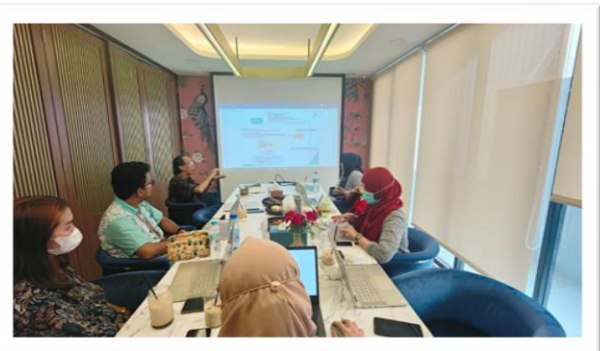


Gambar 4. 52 Pembahasan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM saat ini berupaya untuk melakukan pengembangan model Indeks Pengawasan Obat dan Makanan. Upaya tersebut dilakukan melalui menyusun model indeks yang dimulai dari Produk Pangan, sebagai kegiatan awal dalam pengembangan model indeks ini.

Jenis-jenis pangan yang beragam di masyarakat dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, menjadi tantangan pengawasan bersama antar lintas sektor. Kegiatan Pembahasan Indikator Kinerja Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan secara parallel pada tanggal 20 mei, 15 Agustus, 10 November dan 26 Oktober 2022 dengan Prof. Dedi Fardiaz.

Pemaparan materi disampaikan oleh Prof. Dedi Fardiaz terkait Konsep Penyusunan Indikator Pembangunan Pengawasan Obat dan Makanan. Masukan pada diskusi ini agar focus indeks ini tidak hanya di pangan olahan, tetapi juga pangan keseluruhan dan pembahasan terkait Konsep *Result Based Monitoring and Evalutaion* dan pentingnya indikator *outcome*.



Selanjutnya pertemuan membahas tentang Indikator Presentase Obat yang memenuhi syarat, pembahasan juga terkait data sampling, sample obat yang di sampling akan di uji sesuai dengan regionalisasi Lab dan Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) a) Tidak



Memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu b) Produk kadaluwarsa c) Produk rusak d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.



Gambar 4. 53 Pembahasan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Pada pertemuan tersebut juga membahas tentang indikator POM, terdapat 2 (dua) indikator yang akan dijadikan alternatif pembangunan POM, 1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Kajian ini masih diperlukan mengingat Bappenas memiliki kecenderungan untuk menggunakan indikator berupa persentase yang lebih dapat terbaca maknanya. 2) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM), pengembangan IPOM tersebut telah disusun kajian awal dengan pilot model saat ini untuk pengawasan Pangan Olahan.

## I. REBRANDING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat Pusat dan Daerah seperti yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun begitu, kesadaran tersebut belum banyak terbangun sepenuhnya oleh sebagian besar aparatur negara, sehingga meski pengarusutamaan gender telah menjadi salah satu dimensi pengarusutamaan pembangunan (*mainstreaming*) selain tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sejak

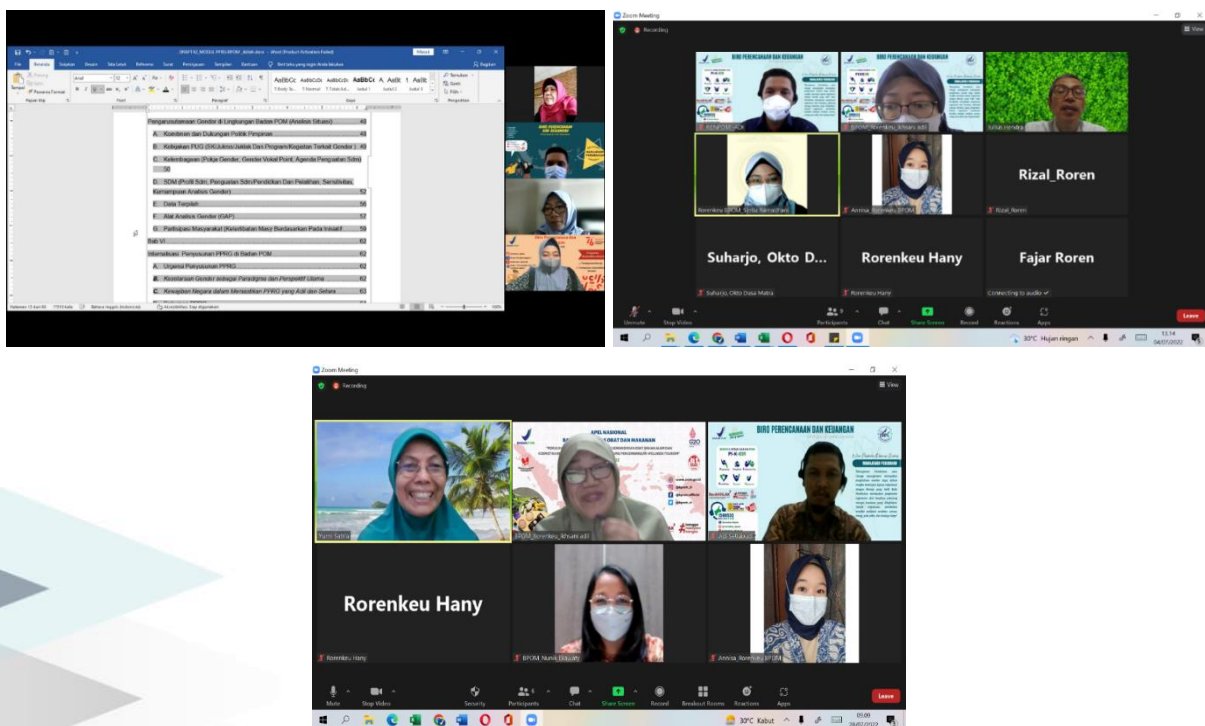


RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, masih banyak isu gender dalam pembangunan yang belum terselesaikan.

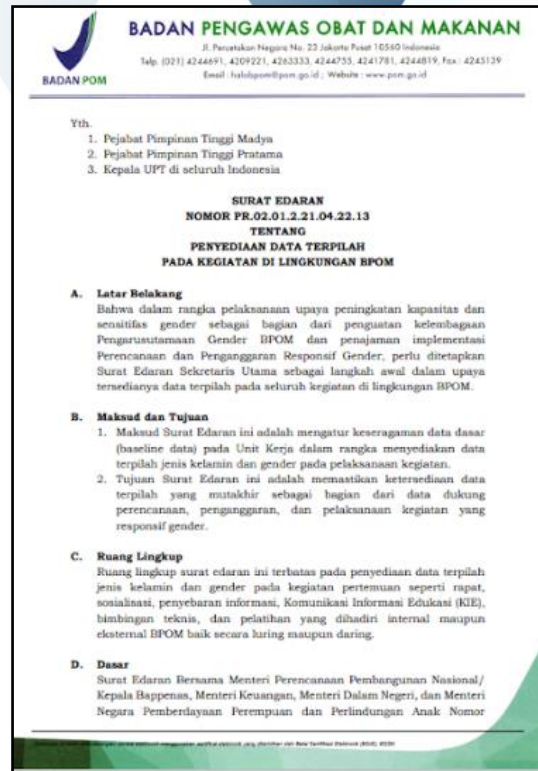
Bertolak dari kondisi tersebut, Re-Branding PPRG BPOM menjadi hal yang penting sebagai media pengokohan kembali prasyarat PUG di lingkungan BPOM. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya dalam pengokohan kembali prasyarat PUG, seperti:

### J. FORUM KONSULTASI DENGAN PAKAR GENDER

Forum dilaksanakan tanggal 4 Juli 2022 dan 28 Juli 2022 dengan melibatkan para pakar dibidang gender antara lain Ibu Ikiliah, Bapak Julius dan Ibu Yurni. Dimana kemudian menghasilkan empat hal penting yakni *Planning of Action*, arah kebijakan BPOM 2023 yang lebih responsif gender, kurikulum pelatihan PPRG, dan juga rancangan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Penyediaan Data Terpilah.



Gambar 4. 54 Pembahasan dengan pakar Gender



Gambar 4. 55 Surat Edaran Tentang Penyediaan Data Terpilah

## K. STUDI TIRU PRAKTEK BAIK IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER



Gambar 4. 56 Screenshoot Studibandung dengan KLHK terkait implemetasi PUG

Pada 5 Agustus 2022 telah dilakukan pertemuan daring dengan mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mempelajari praktik baik implementasi pengarusutamaan gender. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah sejak lama mendapat Anugerah Eka Praya Pratama, Madya, Utama dan

Mentor.

## L. PELATIHAN PPRG

Dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang kapasitas dan sensitivitas gender dilakukan pelatihan PPRG dengan fasilitator pakar gender dan dilakukan dengan metode luring yang dibagi dalam beberapa gelombang dan kelas. Hal ini dilakukan karena sasaran kegiatan yang berbeda beda sehingga dapat lebih fokus.



Pelatihan dibagi menjadi 4 gelombang yaitu (1) tanggal 18-19 Agustus 2022 dengan peserta perwakilan Unit Kerja Pusat; (2) tanggal 2 September 2022 dengan peserta 45 orang JF perencana di UPT dan Unit Kerja pusat; (3) tanggal 12-13 Oktober 2022 dengan peserta 19 JF Auditor dan calon auditor dan (4) tanggal 20-21 Oktober 2023 dengan peserta 3 orang widyaiswara dan PFM Madya yang menjadi pengajar akif pelatihan Komunikasi Infomasi dan Edukasi.



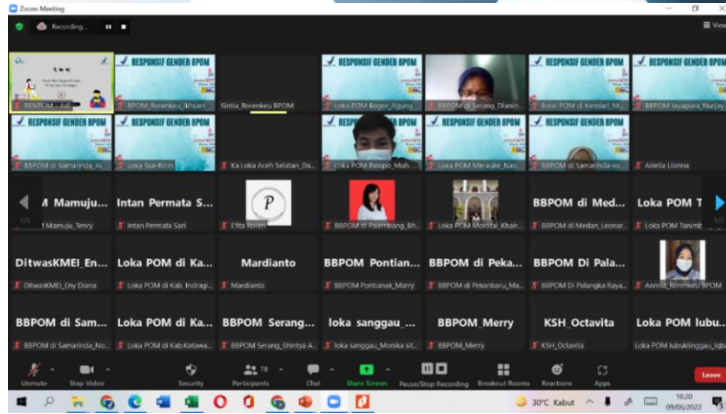
Gambar 4. 57 Kegiatan pemantapan pemahaman PUG tingkat dasar dan menengah bersama pakar yang diikuti Satker Pusat luring di Aryaduta Hotel

#### M. INTENSIFIKASI PENYEDIAAN DATA TERPILAH

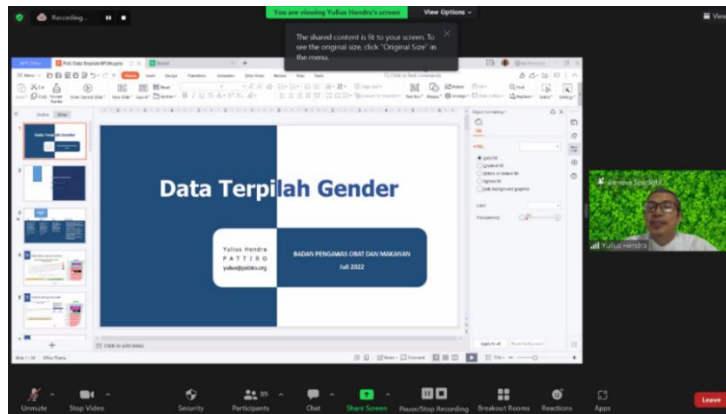
Dalam rangka intensifikasi penyediaan data terpilih, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.02.01.2.21.04.22.13 tentang Penyediaan Data Terpilah pada Kegiatan di Lingkungan BPOM, dilakukan serangkaian pertemuan daring yang melibatkan seluruh unit kerja baik pusat maupun UPT yakni pada 9 Juni, 14 Juli dan 20 September 2023. Dengan rangkaian zoom meeting ini diharapkan tumbuh motivasi untuk memilah data yang ada dan mengumpulkan data secara terpilih.



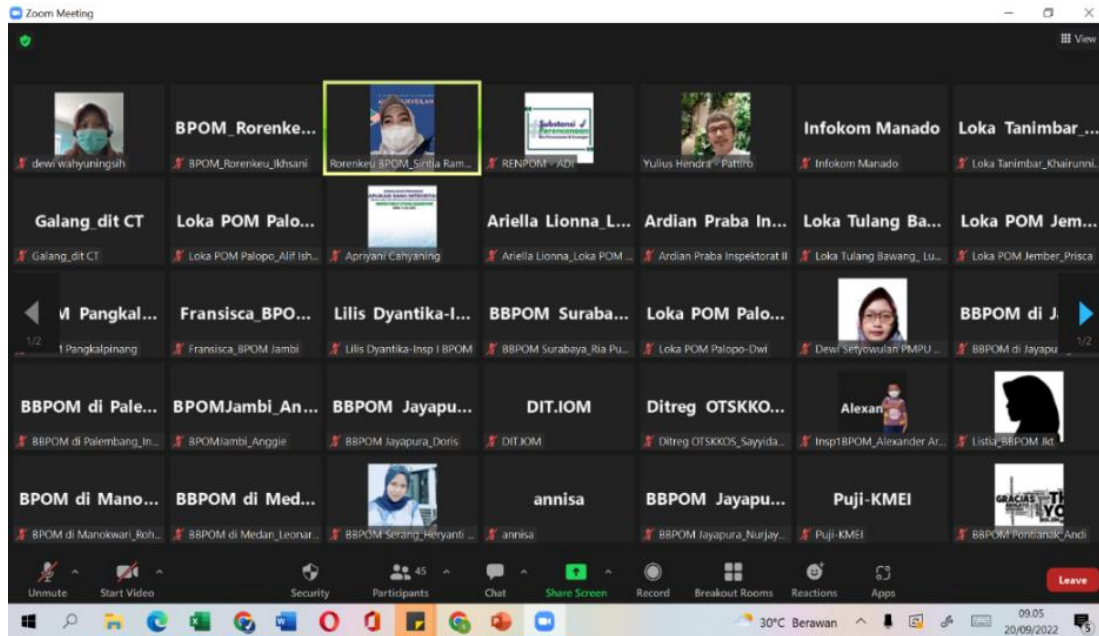
Gambar 4. 58 Kegiatan Pelatihan bersama JF Perencana, JF Auditor dan JF Widyaiswara/PFM Madya



Gambar 4. 59 Screenshoot kegiatan sosialisasi Penyediaan Data Terpilah



Gambar 4. 60 kegiatan pemantapan materi Data Terpilah melalui zoom meeting bersama pakar pada 14 Juli 2022

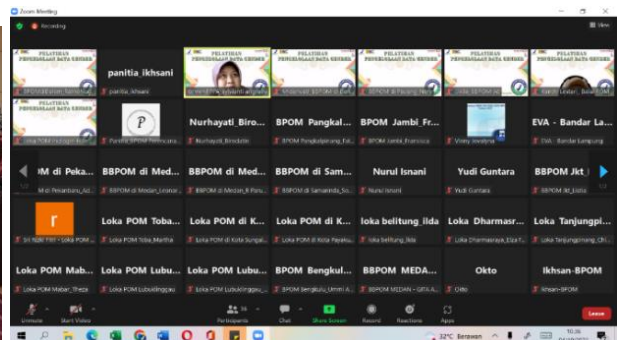


Gambar 4. 61 Screenshoot zoom meeting 20 September 2022



## N. PELATIHAN PENGELOLAAN DATA GENDER

Selain penguatan dalam konsep analisis, diperlukan juga penguatan dari sisi pengelolaan data gender. Oleh karenanya, dilakukan pelatihan dengan mengundang fasilitator statistisi Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran kegiatan ini adalah semua pegawai yang melakukan pengolahan data baik di Unit Kerja Pusat maupun UPT di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan dilakukan menjadi 4 gelombang yakni 30 September 2022 yang dilakukan untuk peserta perwakilan Unit Kerja Pusat secara luring dan 4, 6, dan 10 Oktober 2022 secara daring untuk perwakilan UPT di seluruh Indonesia.



Gambar 4. 62 Foto Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Data Gender

## O. KERJASAMA PENGGUNAAN E-LEARNING PPRG DARI PUSDIKLAT AP KEMENTERIAN KEUANGAN

Untuk meningkatkan cakupan kegiatan pelatihan PPRG, Biro Perencanaan dan Keuangan telah bekerjasama dengan Pusdiklat Anggaran dan Perberdahaaran Kementerian Keuangan untuk penggunaan E-Learning Asinkron. Sebanyak 385 orang pegawai dari Unit Kerja Pusat dan UPT di Seluruh Indonesia telah berpartisipasi dalam E-Learning ini.

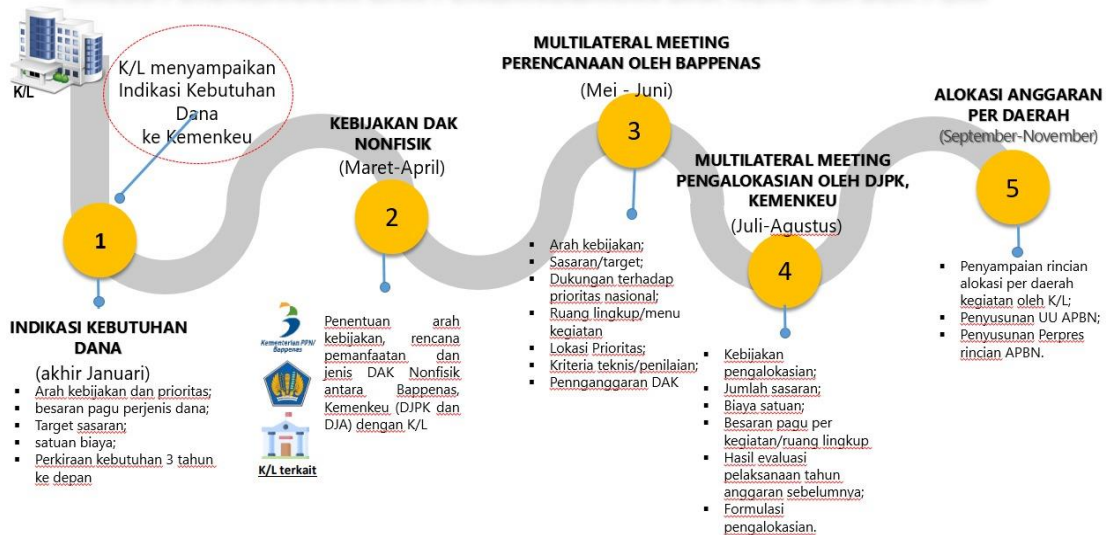
## P. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BPOM

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.



Dalam hal pembiayaan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan pelaksanaan operasional pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui penyediaan BOK POM.

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAK NONFISIK BOK POM



Gambar 4. 63 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM

Berdasarkan Berita Acara Multilateral Meeting (BA MM), DAK Non Fisik BOK POM TA 2023 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 150 Milyar,- untuk 359 Kabupaten/Kota yang tersebar di 33 Provinsi.



Gambar 4. 64 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-20223



Berdasarkan BA MM tersebut, Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui aplikasi SMART POM dengan tautan <https://smartpom.pom.go.id>. Usulan RKA tersebut ditelaah oleh BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, Unit Kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) melalui kegiatan *desk* RKA DAK Nonfisik BOK POM TA 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 secara daring untuk membahas Mekanisme Penelaahan BOK POM TA 2023 dan tanggal 31 Oktober–3 November 2022 di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah, Bekasi untuk Penelaahan BOK POM TA 2023. RKA yang telah disepakati dialokasikan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

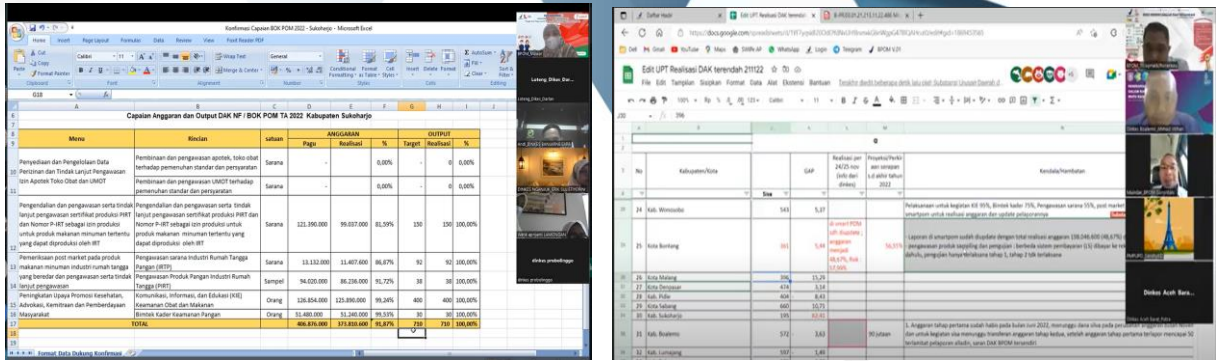


Gambar 4. 65 Kegiatan Penelaahan RKA BOK POM TA 2023

#### **Q. MONITORING DAN EVALUASI DAK NON FISIK BOK POM**

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan DAK, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Biro Perencanaan dan keuangan melaksanakan Monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2022 pada saat pembinaan/pendampingan oleh unit kerja teknis pengampu per regional. Selain itu, monev juga dilakukan secara berkala melalui daring antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2022 dengan BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, unit kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) yang membahas progres realisasi anggaran dan output, hambatan/kendala dan rencana tindak lanjut.



Gambar 4. 66 Monitoring dan Evaluasi Capaian DAK Nonfisik dengan Dinas Kab/Kota

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan pertemuan nasional monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2022 secara *back to back* dengan kegiatan penyerahan DIPA Satker TA 2023 pada 20 Desember 2022 di Novotel Hotel Mangga Dua yang dihadiri oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT. Tujuan pertemuan ini antara lain:

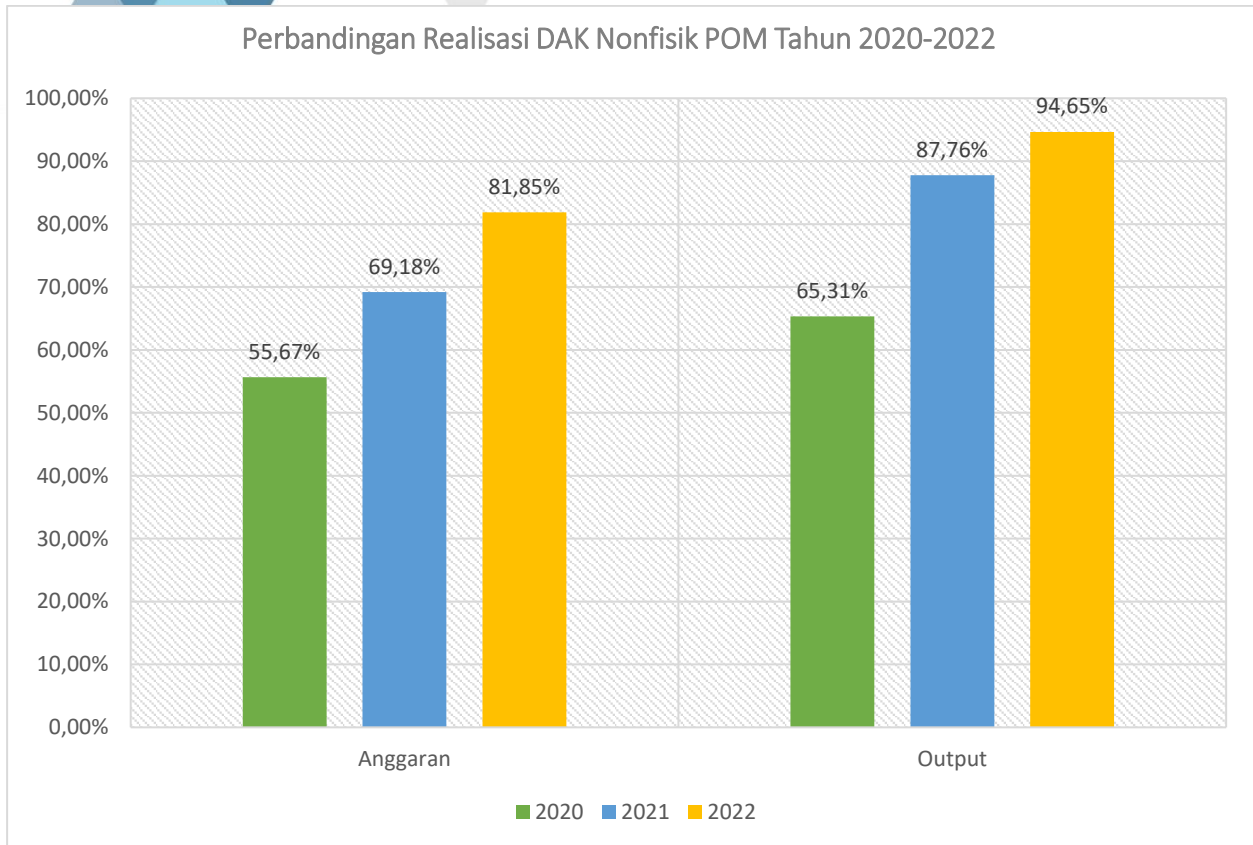
1. Meningkatkan koordinasi unit kerja teknis pengampu dan UPT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan pembinaan/pendampingan dan monev terhadap pelaksanaan DAK baik secara mandiri atau bersama sama Unit Pusat.
3. Meningkatkan kepatuhan UPT dalam memverifikasi terhadap pelaporan pelaksanaan DAK yang disi oleh Dinas Kesehatan melalui SMART POM



Gambar 4. 67 Pertemuan monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2022



Pada tahun 2022, realisasi anggaran DAK NF BOK POM yang dilaporkan oleh 280 Dinkes Kabupaten/kota melalui aplikasi SMART POM adalah sebesar Rp91.507.841.494,- (81,85%) dari pagu Rp111.792.901.018,-



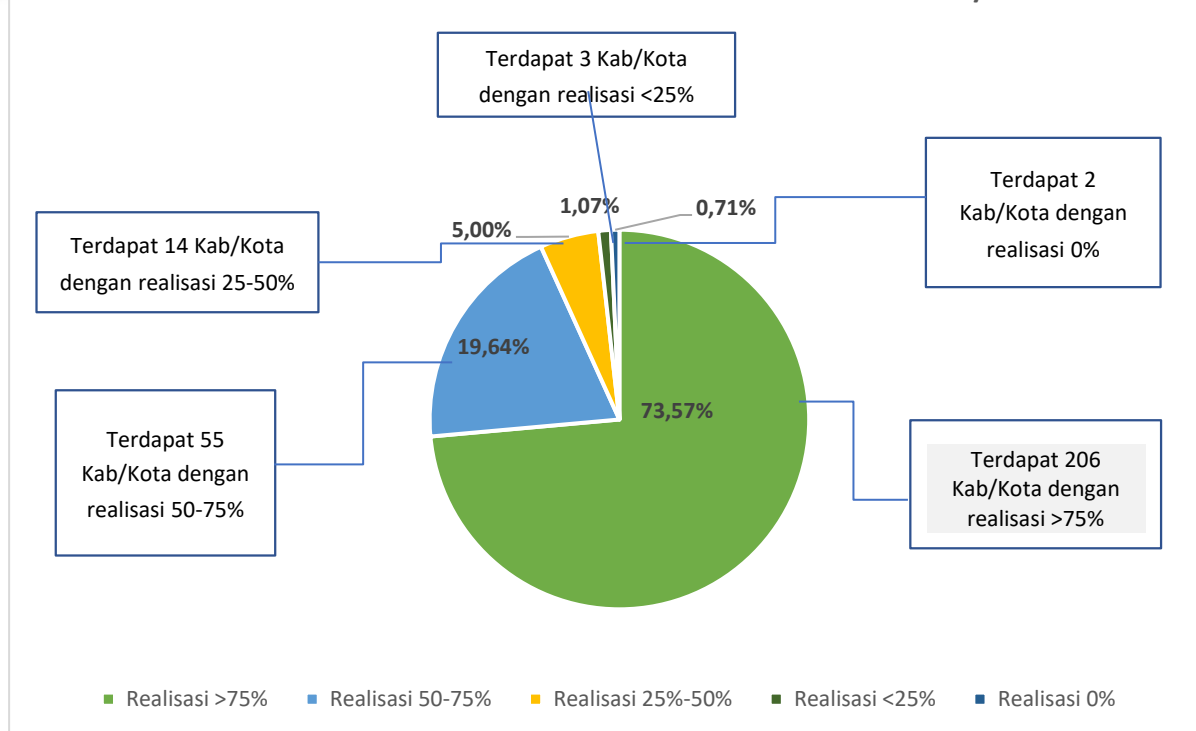
Gambar 4. 68 Perbandingan Realisasi DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2022

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi anggaran maupun capaian output DAK Nonfisik BOK POM dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021.

Ditinjau dari tingkat kepatuhan pelaporan, jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana terdapat 60 Kab/Kota yang tidak melakukan pelaporan melalui SMARTPOM dan tahun 2021 terdapat 25 Kab/Kota dengan realisasi 0% atau tidak melaporkan realisasi melalui SMARTPOM, maka pada tahun 2022 terdapat perbaikan tingkat kepatuhan pelaporan, dimana seluruh Kab/kota sudah melaporkan realisasi melalui SMARTPOM.



### REALISASI ANGGARAN DAK NF POM TA 2022 PER KAB/KOTA



## R. PENGELOLAAN HIBAH

Hibah merupakan setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, Jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan serta mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Sampai dengan tahun 2022, Hibah yang diterima BPOM merupakan hibah langsung yang dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut siklus pengelolaan hibah:

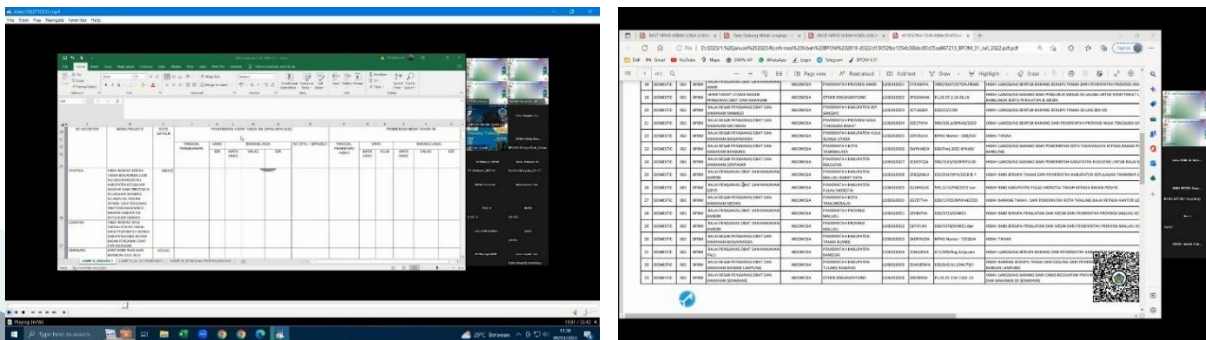


SIKLUS HIBAH



Gambar 4. 69 Siklus Hibah

Proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilakukan oleh masing-masing Satker di BPOM. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hibah Satker setiap triwulan yang bertujuan untuk memantau kemajuan pengelolaan hibah, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.



Gambar 4. 70 Monitoring dan Evaluasi Hibah

Berdasarkan hasil monev pengelolaan hibah tersebut, Badan POM selaku *executing agency* melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Menteri Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan pelaporan, Menteri PPN/ Bappenas.



Selama Tahun 2022 Badan POM melakukan pelaporan terhadap penerimaan dan pengesahan Hibah langsung Uang dan Barang/jasa sebanyak 69 penerimaan hibah yang terdiri atas:

- a) 29 Hibah langsung dalam bentuk barang berupa alat laboratorium dan persediaan untuk pengujian dan 6 hibah dalam bentuk jasa berupa jasa penyelenggaraan pelatihan pengujian untuk satker dilingkungan BPOM dari JICA
- b) 20 Hibah langsung dalam bentuk Tanah untuk kantor, 1 hibah langsung berupa bangunan kantor dan 3 hibah berupa bangunan tempat ibadah pada 23 satker di UPT BPOM
- c) 3 Hibah langsung barang berupa persediaan untuk pengujian covid pada 2 satker UPT BPOM
- d) 7 Hibah langsung dalam bentuk Uang untuk melaksanakan kegiatan dari WHO pada satker dilingkungan BPOM

Untuk Hibah Langsung dalam bentuk uang masih terdapat 2 Hibah dari WHO yang akan dilanjutkan kegiatannya pada tahun 2023 senilai Rp350.306.400,00 pada Satker P3OMN dan Deputi I.

Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan telah mengembangkan Aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah terintegrasi (SEHATI) yang merupakan sistem aplikasi terintegrasi yang menyatukan beberapa aplikasi dalam satu portal besar untuk membentuk database dalam rangka mendukung Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan terkait dengan office automation dan data driven decision making.

Fitur yang terdapat dalam SEHATI antara lain:

1. Modul E-Register: menyediakan fasilitas Permohonan Registrasi, Pemutakhiran Data, dan Pembatalan Hibah dapat dilakukan secara online dimanapun dan dapat dipantau secara real time.
2. Modul Monitoring Pengelolaan Hibah: mencakup pemantauan pertanggungjawaban hibah mulai dari register sampai dengan pengesahan.
3. Modul E-Konfirmasi Penerimaan Hibah: menyediakan fasilitas konfirmasi penerimaan hibah antara Pemerintah dengan K/L dan Donor.
4. *Modul Reporting*: menyediakan berbagai jenis informasi hibah yang dibutuhkan stakeholders.



Fitur yang sudah diimplementasikan sampai dengan tahun 2022 adalah modul e-register. BPOM pada tahun 2022 telah melakukan e-Register SEHATI) baik untuk user admin K/L maupun 83 admin satker. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyempurnakan dan meluncurkan Aplikasi SEHATI dengan menambahkan Modul Monitoring Hibah, Modul e-Konfirmasi, dan Modul Reporting. Modul Monitoring Hibah dan Modul Reporting berisi data realisasi dan status hibah, sedangkan Modul e-Konfirmasi digunakan oleh admin K/L untuk melakukan konfirmasi penerimaan hibah yang akan diimplementasikan pada triwulan I Tahun 2023.

### S. Penguatan Kelompok Kerja

Untuk penguatan aspek kelembagaan, telah dilakukan pertemuan pertama Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM pada 4 Oktober 2023. Meskipun belum secara resmi terbentuk, namun perlu dilakukan penguatan kapasitas pada anggota Kelompok Kerja. Oleh karena itu, pada pertemuan ini dilakukan pemaparan Praktek Baik Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertanian dan paparan dari fasilitator pakar gender.

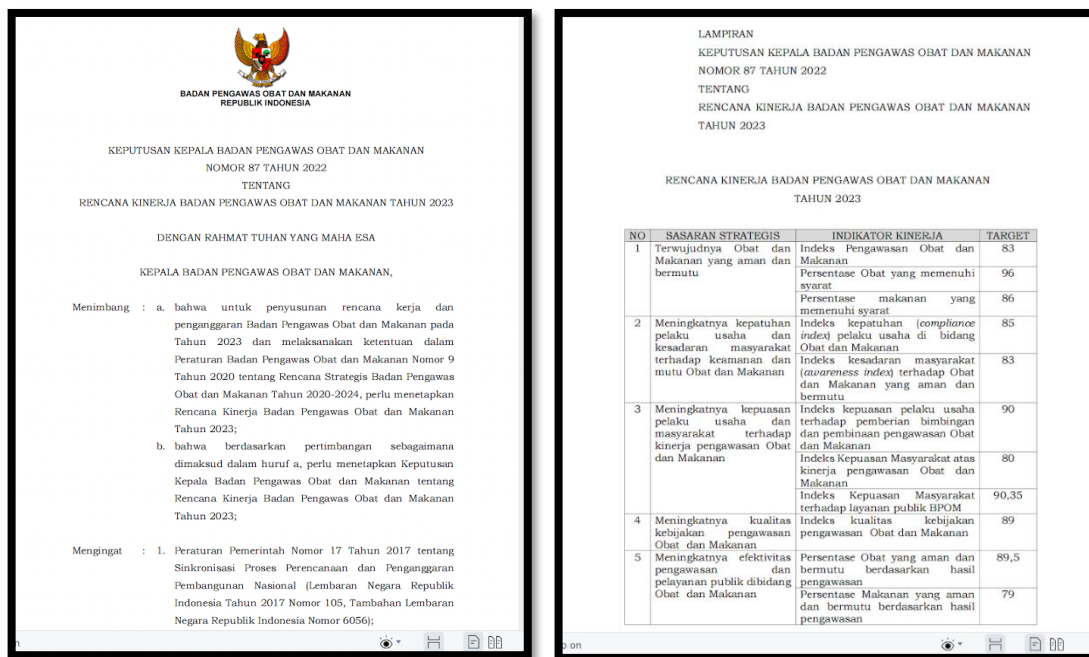


Gambar 4. 71 Kegiatan Pertemuan POKJA PUG BPOM yang dilakukan secara hybrid pada 4 Oktober 2022



## T. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPOM TAHUN 2023

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2022 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2023. Tujuan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2023 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM pada Tahun Anggaran 2023.



Gambar 4. 72 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2023.



**IKU 9: PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONEV DAN PELAPORAN KINERJA, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN SETTAMA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR**

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 9 adalah:

**A. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022**

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama mengacu pada Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Sekretariat Utama merupakan dokumen evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan sebagai bahan untuk perencanaan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Laporan Kinerja Sekretariat Utama ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Sekretariat Utama dan dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM ke depan. Berikut adalah gambar buku laporan kinerja Sekretariat Utama yang ditunjukkan pada Gambar 4.40.



Gambar 4. 73 Buku Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022



Laporan Kinerja juga diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang berdampak pada pencapaian visi dan misi BPOM. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat kegiatan yang mempunyai daya ungkit secara signifikan dalam mencapai visi dan misi BPOM untuk melihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan untuk perencanaan-perencanaan selanjutnya, mengingat sumber daya dan sumber dana yang terbatas dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.

Sebagai salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai sebesar 12% (dua belas persen) meliputi kriteria: dokumen laporan yang menggambarkan kinerja (2,40%), dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,0%). Hasil evaluasi oleh Inspektur Utama BPOM terhadap implementasi SAKIP di Sekretariat Utama tahun 2022, untuk komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 9,84 dengan pemenuhan sebesar 82% terhadap bobot komponen (12), menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

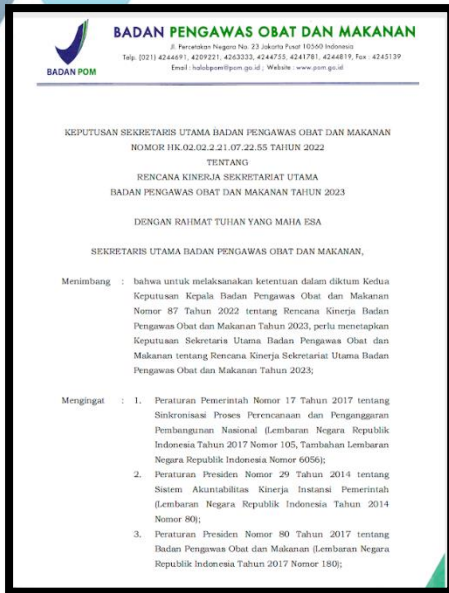
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut disampaikan pula bahwa laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, evaluasi kinerja, termasuk perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah. Rekomendasi yang diberikan antara lain agar dapat mengkuantifikasikan perhitungan efisiensi sumber daya dan menganalisis besaran efisiensi dan pemanfaatan atas informasi kinerja secara maksimal untuk digunakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

## **B. PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2021 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat



Utama Tahun 2023. Tujuan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2023 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2023.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.2.21.07.22.55 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM Nilai Kinerja Anggaran BPOM	34,4 74,22 WTP 94,5
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi Indeks Kepuasan Media Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	89 75 80 3,75
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi standar	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Sistem Merit	2,95 74 Level 4 (0,89)
5		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100

Gambar 4. 74 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2023.

### C. LAPORAN TAHUNAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2021



Gambar 4. 75 LAPTAH BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2021

Pada laporan tahunan 2021 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 10 Sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu : 1) Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas; 2) Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM; 3) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM; 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM; 5) Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP; 6) indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan; 7) Persentase kesesuaian



dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman; 8) Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar; 9) Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme *reward and punishment*; 10) Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar; 11) Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman; 12) Persentase dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu; 13) Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal baik; 14) Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar; 15) Persentase laporan PNBPN unit kerja yang disampaikan tepat waktu; 16) Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan; 17) Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan; 18) Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan; dan 19) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan. Dari kesembilan-belas indikator, terdapat 1 indikator dengan kategori sangat kurang, 2 indikator dengan kategori cukup, 14 indikator dengan kategori baik dan 2 indikator dengan kategori sangat baik.

Sebagian besar kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf dengan upaya seoptimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti kurangnya tenaga SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diharapkan kedepan, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal yaitu para *stakeholders*.

## SASARAN KEGIATAN 5:

### MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN

#### IKU 10: TINGKAT KEBERHASILAN KOORDINASI DALAM LAYANAN DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 10 adalah:



Gambar 4. 76 Pendampingan Karokenkeu dalam kegiatan Perjalanan Dinas ke Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022 (A. Batam, B. Lampung, C. Nusa Dua (Bali), D. Banjarmasin, E. Semarang, F. Surabaya)

Dalam rangka meningkatkan kepuasan layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan, maka pada tahun 2022 dilakukan rapat-rapat dengan unit-unit terkait di Biro Perencanaan dan Keuangan seperti dengan Biro SDM dalam rangka layanan kepegawaian, dengan Biro Umum dalam rangka pengadaan dan BMN dan Inspektorat Utama. Disamping itu dilaksanakan juga kegiatan perjalanan dinas kunjungan, bimbingan teknis dan pendampingan pimpinan dalam mengikuti kegiatan internal maupun eksternal BPOM diantaranya Perjalanan Dinas ke Unit Pelaksana Teknis ke BBPOM Yogyakarta, BBPOM Bandung, BBPOM Denpasar, BPOM Batam, BBPOM Banjarmasin, BPOM Lampung, BBPOM Surabaya, BPOM Bengkulu, BPOM Ambon, Loka POM Hulu Sungai Utara (Tabalong), Loka POM Tanjungpinang, Loka POM Sofifi, dan Loka POM Kota Lubuklinggau. Pada kegiatan ini karena masih dalam suasana pandemic covid, maka dalam rangka menunjang kinerja maka terdapat langganan akun zoom meeting dan pemberian pulsa untuk rapat-rapat secara online.

## B. KOORDINASI PENYIAPAN BAHAN SUBSTANSI KEPALA BPOM

Koordinasi penyediaan bahan substansi Kepala BPOM dilaksanakan melalui komunikasi intensif antara Kelompok Substansi DSP dengan unit kerja terkait serta rapat koordinasi dan pembahasan.



Tim DSP mengoordinasikan bahan substansi Kepala BPOM, baik dengan mengolah konsep bahan dari unit kerja maupun menyusun bahan dari *database* substansi dan literatur/referensi terpercaya, untuk kemudian mengomunikasikan dan meminta masukan dari unit kerja terkait jika diperlukan atau dimungkinkan. Tergantung kompleksitas substansi dan teknis kegiatan, tim DSP memerlukan sekurangnya 3 hari kerja (HK) untuk melakukan *review*, pengolahan, dan finalisasi bahan atau 4 HK untuk menyusun bahan yang diinisiasi oleh Tim DSP.

Selama tahun 2022, Tim DSP mengelola  $\pm 540$  paket dokumen substansi kegiatan Kepala BPOM yang terdiri dari 260 paket bahan bicara, 269 paket bahan referensi, dan 11 bahan lainnya (surat dan *foreword*). Bahan ini disiapkan untuk 188 kegiatan Kepala BPOM dengan sebaran keterkaitan topik kegiatan atau substansi bahan dengan ranah tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker) di lingkungan BPOM dapat dilihat pada Gambar 4.43.



Gambar 4. 77 Sebaran Keterkaitan Topik Bahan Kegiatan Kepala BPOM tahun 2022 per Satker (N = 188)

### C. PENDAMPINGAN KEGIATAN STRATEGIS KEPALA BPOM

Tim DSP melakukan pendampingan kegiatan kedinasan Kepala BPOM untuk mengawal bahan substansi dan mendokumentasikan arahan lisan serta hasil kegiatan yang dihadiri Kepala BPOM. Sepanjang tahun 2022, Tim DSP melakukan pendampingan pada 186 kegiatan Kepala BPOM baik secara *offline* maupun *online*. Kegiatan pendampingan ini dilaporkan melalui 175 nota dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Rorenkeu) kepada Sestama dan diteruskan dengan 52 nota dinas tindak lanjut arahan lisan Kepala BPOM dari Sekretaris Utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama terkait. Arahan lisan Kepala BPOM yang harus segera ditindaklanjuti pada waktu yang terbatas, seperti arahan terkait pelaksanaan kegiatan esok hari, disampaikan oleh Tim DSP kepada unit kerja penanggung jawab kegiatan berupa *keypoints* hasil pertemuan melalui aplikasi percakapan seperti *WhatsApp*.



D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ARAHAN KEPALA BPOM DAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM STRATEGIS PIMPINAN (PSP)

Pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM bertujuan meningkatkan ketertelusuran dan penyelesaian tindak lanjut arahan Kepala BPOM. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan dan Program Strategis Pimpinan (Tim Monev PSP) beranggotakan perwakilan 30 unit kerja pusat dan 7 Kesekretariatan Pimpinan telah dibentuk pada tahun 2021. Susunan keanggotaan tim telah diperbarui berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.09.22.64 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.03.22.19 Tahun 2022 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan dan Program Strategis Pimpinan Tahun 2022 tanggal 6 September 2022. Anggota Tim mempunyai tugas menyediakan dan melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan tindak lanjut arahan Kepala Badan POM, dan pelaksanaan PSP melalui Aplikasi Sistem Informasi Layanan Dukungan Strategis Pimpinan (Sinergis). Anggota Tim juga diharapkan partisipasi aktifnya pada rapat atau *desk* monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan Kepala Badan POM, dan PSP yang dilaksanakan setiap triwulan.

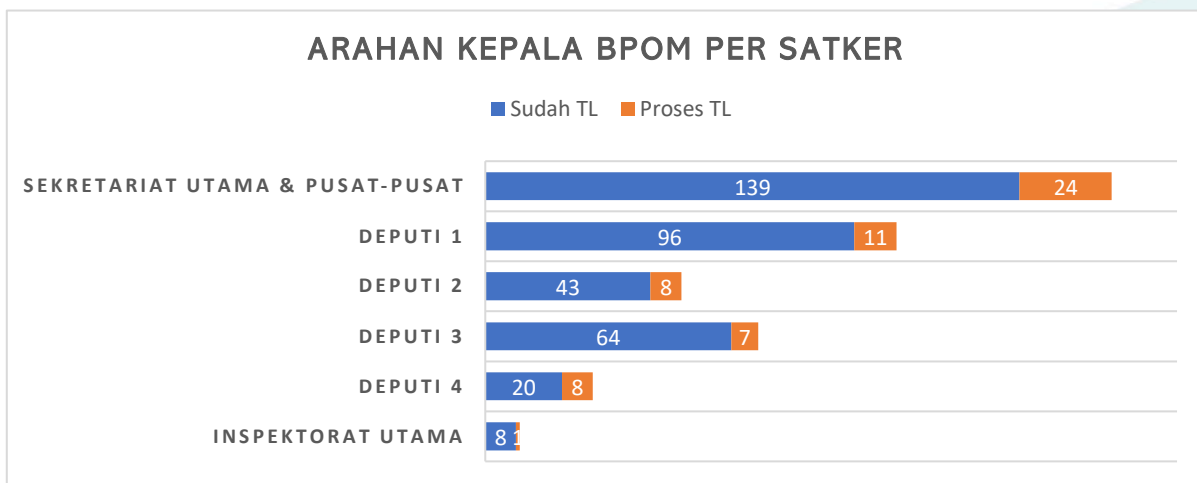
*Desk* pemantauan tindak lanjut arahan Kepala BPOM dan perkembangan PSP pada tahun 2022 diselenggarakan secara *online* pada tanggal 20-21 April 2022 (triwulan I), 21-22 Juli 2022 (triwulan II), dan 14 dan 17 Oktober 2022 (triwulan III). Sedangkan desk triwulan IV akan dilaksanakan pada awal tahun 2023. Selain *desk*, Workshop Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 09.00-15.30 WIB secara luring di Hotel Aryaduta, Jakarta dan secara daring terbatas melalui aplikasi *zoom meeting* (*gambar...*). Kegiatan dihadiri 65 orang terdiri dari narasumber dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Kementerian Keuangan (Pushaka Kemenkeu), narasumber dari Biro Dukungan Strategis Pimpinan (BDSP) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), anggota Tim Monev PSP atau yang mewakili, dan internal Biro Perencanaan dan Keuangan. Tujuan workshop secara umum adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi monev PSP yang efektif di BPOM serta sosialisasi kepada unit kerja tentang Aplikasi Sinergis yang telah dikembangkan pada tahun 2022.



Gambar 4. 78 Workshop Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Pimpinan

## E. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ARAHAN KEPALA BPOM

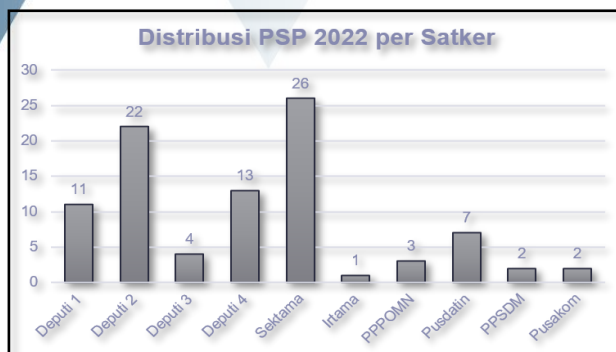
Tahun 2022 dilakukan terhadap 269 disposisi surat dan 145 arahan lisan Kepala BPOM (Gambar 4.63). Hasil pemantauan telah disampaikan secara rutin melalui nota dinas Sekretaris Utama kepada PPT Madya dan PPT Pratama terkait melalui 52 laporan pemantauan mingguan dan 12 laporan pemantauan bulanan (tembusan kepada Kepala BPOM) sepanjang tahun 2022. Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 90,1% dari 415 disposisi/arahan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sedangkan sisanya masih dalam proses oleh unit kerja.



Gambar 4. 79 Profil Sebaran Tindak Lanjut Arahan Kepala BPOM per Satker



Pada tahun 2022, monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 91 program strategis pimpinan (PSP) dari 30 unit kerja (Gambar 4.64). Laporan hasil monev PSP disampaikan secara tahunan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Pusat-Pusat serta tembusan kepada Kepala BPOM. Laporan Monitoring Program Strategis Pimpinan Tahun 2022 akan disusun pada awal tahun 2023.



Gambar 4. 80 Profil Sebaran PSP per Satker

### SASARAN KEGIATAN 6:

#### TERWUJUDNYA ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG EFEKTIF

#### IKU 11: INDEKS REFORMASI BIROKRASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 11 adalah:

#### A. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN BADAN POM TAHUN 2022

Berdasarkan surat Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.72.10.22.212 tanggal 3 Oktober 2022, Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2022.



Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	4,00	2,78	6,78	<b>MS</b>
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,81	3,17	5,98	<b>MS</b>
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,85	4,25	9,10	<b>MS</b>
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	3,89	8,89	<b>MS</b>
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	7,50	7,50	15,00	<b>MS</b>
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,43	4,59	9,02	<b>MS</b>
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>					<b>54,77</b>	
<b>B.</b>	<b>HASIL</b>	40,00				
	I. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			<b>18,98</b>	
	1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			15,23	<b>TMS</b>
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	<b>MS</b>
	II. Pelayanan Publik yang Prima	17,50			<b>15,84</b>	
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			15,84	<b>MS</b>
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>34,81</b>	
<b>NILAI PMPZI</b>					<b>89,58</b>	

Gambar 4. 81 Hasil evaluasi PMPZI pada Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022

lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar **89,58** dengan rincian sebagai berikut:

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- ❖ Biro Perencanaan dan Keuangan telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- ❖ Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan ZI.
- ❖ Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP).
- ❖ Biro Perencanaan dan Keuangan telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan dengan membuat inovasi melalui Google Site Penganggaran



dan pembuatan Aplikasi SIMETRIS, Aplikasi e-PNBP, Aplikasi Monev BOC dan Aplikasi Dashboard IKPA.

- ❖ Terdapat inovasi “Rompi Kapok” pada area penataan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- ❖ Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagai berikut:

- ❖ Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi sebesar 3,48 masih dibawah persyaratan minimal yaitu 3,6 yang ditetapkan oleh KemenPANRB.
- ❖ Belum dilakukan monitoring dan evaluasi sepenuhnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
- ❖ Belum terdapat kajian dan evaluasi atas pemberian voucher belanja atau dompet elektronik senilai Rp150.000,00 yang tidak tercantum dalam Keputusan Biro Perencanaan dan Keuangan tentang mekanisme pemberian *reward* bagi pelaksana layanan publik di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- ❖ Perlu dilakukan integrasi untuk akses aplikasi pelayanan yang tersedia di Biro Perencanaan dan Keuangan.
- ❖ Nilai BerAKHLAK belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan.
- ❖ Hasil *assessment* belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
- ❖ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun tidak berkala.

Saran Inspektorat untuk perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembangunan pada Area Persepsi Anti Korupsi dengan mensosialisasikan secara berkala sehingga dapat mencapai syarat minimal penetapan WBK.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.



3. Mengoptimalkan laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja sebagai sarana menyajikan informasi kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
4. Melakukan reuiu atas Keputusan Biro Perencanaan dan Keuangan tentang mekanisme pemberian *reward and punishment* bagi pelaksana layanan publik di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
5. Melakukan integrasi terhadap layanan-layanan yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.
6. Menerapkan BerAKHLAK pada seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.
7. Hasil *assessment* dapat dimanfaatkan untuk mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
8. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala.
9. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

#### SASARAN KEGIATAN 7:

#### TERWUJUDNYA SDM BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BERKINERJA OPTIMAL

#### IKU 12: INDEKS PROFESIONALITAS ASN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 12 adalah:

#### A. PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) BADAN POM TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.17.2.24.01.23.01.23.94 tanggal 27 Januari 2023 terkait Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Badan POM Tahun 2022 atas tindak lanjut surat sebelumnya Nomor B-KP.17.24.241.11.22.734 tanggal 28 November 2022. Dapat dijabarkan bahwa,



Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.

Selanjutnya Indeks Profesionalitas ASN tersebut diukur menggunakan Aplikasi IP-ASN BPOM, dalam hal ini mencakup 4 dimensi pengukuran yang diantaranya:

- 1) Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.
- 2) Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%.
- 3) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.
- 4) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.

Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN, diperoleh hasil nilai **IP ASN Badan POM Tahun 2022** adalah **84,78** dengan 4449 pegawai ASN. Sedangkan, hasil nilai **IP ASN Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022** adalah **84,04** dengan 56 pegawai ASN, menurun 1,11 poin dari IP ASN tahun 2021 yakni 85,15 dengan 55 pegawai ASN.

Hasil evaluasi tersebut IP ASN Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dinyatakan berada di bawah nilai rata-rata IP ASN Badan POM, secara umum hal ini dikarenakan faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Masih terdapat pejabat fungsional belum mengikuti diklat fungsional dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP; dan
- b. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan dan mengikuti diklat teknis jabatan 20 JP.



Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN Badan POM Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN.
- b. Setiap pegawai mengikuti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

## **B. PELATIHAN *PERSONAL RESILIENCY FOR BETTER PERFORMANCE IN DIGITAL ERA* (2 JUNI 2022)**

Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai banyak manfaat bagi karyawan maupun bagi instansi itu sendiri. Pegawai akan semakin bertambah pengetahuannya, kompetensi maupun skill, yang akan berdampak positif bagi instansi / organisasi. Banyak sekali manfaat yang akan didapat dari hasil Pelatihan Sumber Daya Manusia.

Berikut ini adalah ringkasan manfaat dari Kegiatan Pelatihan:

1. Pegawai akan menjadi ahli dan terampil
2. Pegawai akan semangat dalam melakukan pekerjaan
3. Pegawai akan mempunyai integritas tinggi dalam pekerjaan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja
5. Meningkatkan produktivitas kerja
6. Meningkatkan mutu hasil kerja

Personal “*Resiliency For Better Performance In Digital Era*”, yang telah berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada tanggal 02 Juni 2022, telah sukses dan terlaksana dengan baik. Maksud dari pelaksanaan kegiatan “Pelatihan *Resiliency For Better Performance In Digital Era*”, adalah Pandemi membawa perubahan yang signifikan dan berdampak munculnya banyak permasalahan baru dan juga peluang baru.

Namun, tidak setiap orang siap dengan perubahan, bahkan Sebagian mengalami stress dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan yang serba cepat.

Maksud dari pelaksanaan kegiatan “Pelatihan *Resiliency For Better Performance In Digital Era*”, adalah Pandemi membawa perubahan yang signifikan dan berdampak munculnya banyak permasalahan baru dan juga peluang baru.



Namun, tidak setiap orang siap dengan perubahan, bahkan Sebagian mengalami stress dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan yang serba cepat.

Adapun Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan “Pelatihan *Resiliency For Better Performance In Digital Era*”, ini adalah:

- ✓ Membantu peserta mengidentifikasi faktor faktor yang perlu diimprove dalam membangun resiliency.
- ✓ Membantu peserta menumbuhkan kesadaran pentingnya mengelola stress diri dalam membangun Kerjasama tim.
- ✓ Membantu peserta meyakini membangun sinergi dan kolaborasi dibandingkan kompetisi.



Gambar 4. 82 Pelatihan PERSONAL RESILIENCY FOR BETTER PERFORMANCE IN DIGITAL ERA  
(2 Juni 2022 – Hotel Aryaduta)



## SASARAN KEGIATAN 8: MENGUATNYA DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

### IKU 13: INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN YANG BAIK

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 13 adalah:

#### A. PEMELIHARAAN ALAT PENGOLAH DATA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaporkan 26 kasus pemeliharaan alat pengolah data dan sarana, melalui aplikasi yang dibangun oleh ROUM, Bernama SIROUM (Sistem Informasi Biro Umum) yang untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh tim support teknis dari Pusdatin atau Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Biro Umum maupun Pusdatin, Adapun data tersebut sebagai berikut:

Data Pemeliharaan Alat & Sarana								
Tambah Pemeliharaan Alat & Sarana								
Show 10 entries								
Search:								
Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Tanggal Kerusakan	Deskripsi Kerusakan	Satuan Kerja	File Tambahan	File Upload	Status	Aksi
Beni Arbiyanto	21-04-2022	20-04-2022	ijar bergaris dan berwarna hitam dibuka penuh	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Tri Handayani, S.Farm	19-04-2022	19-04-2022	Laptop Blue Screen	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	24-03-2022	01-01-2022	tidak dingin	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
adem fahri ramdani	18-03-2022	17-03-2022	rental sering kendur, tune UP, Ganti Oli Ceki rem depan, susah pindah gigi	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Tri Handayani, S.Farm	17-02-2022	09-02-2022	Blue Screen, memerlukan instal ulang operating system.	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Proses Pengajuan	
Letitia Hutapea	17-02-2022	17-02-2022	Lampu di ruangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sudah kelap kelip, diperlukan akan mati dan perlu diganti.	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	

Data Pemeliharaan Alat & Sarana								
Tambah Pemeliharaan Alat & Sarana								
Show 10 entries								
Search:								
Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Tanggal Kerusakan	Deskripsi Kerusakan	Satuan Kerja	File Tambahan	File Upload	Status	Aksi
Beni Arbiyanto	28-09-2022	28-09-2022	air pembuangan mesin, di ruang koordinator subansal motor, sering dicek semua AC dan lakukan pembersihan	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	01-09-2022	01-09-2022	kamera pada desktop PC tidak bisa dibuka	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Dikembalikan	
Mohammad Sadam Husain	26-08-2022	26-08-2022	instal ulang PC	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Vike	26-08-2022	26-08-2022	instal ulang PC	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	10-08-2022	10-08-2022	tune up ganti oli	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Beni Arbiyanto	03-08-2022	03-08-2022	konstel dibarek mengkilap panas dan dingin	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	01-07-2022	01-07-2022	terdapat larat pada bodi mobil, agar melakukan pengecekan	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Beni Arbiyanto	05-07-2022	05-07-2022	AC hanya angin saja tidak dingin tolong semua AC split dan central diservis ada 7 ac split dan 1 AC central	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	07-06-2022	06-06-2022	-	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	
Beni Arbiyanto	16-06-2022	16-06-2022	-	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	



# LAPORAN TAHUNAN

## BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

### 2022

Halo, Beni Arbiyanto, A.Md

Dashboard

Layanan Umum

- Layanan Umum
- Data Umum
- Data Layanan

Utilitas

- Ubah Profil
- Keluar

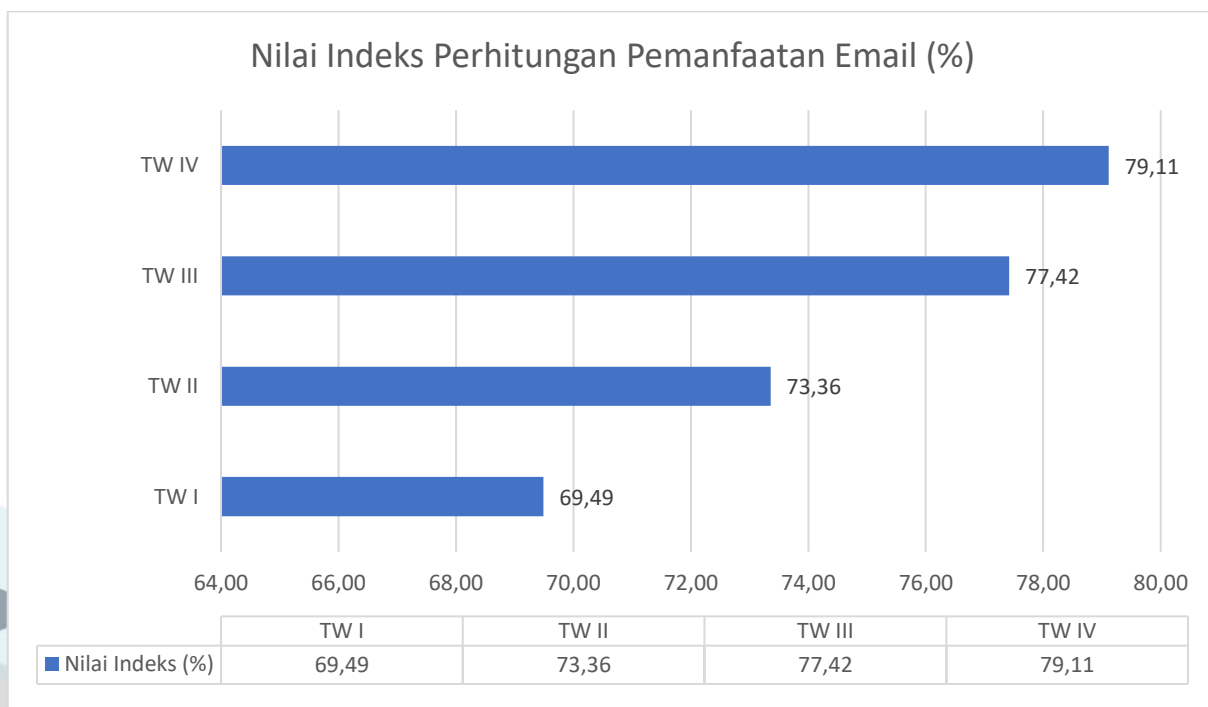
Show 10 entries

Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Tanggal Kerusakan	Deskripsi Kerusakan	Satuan Kerja	File Tambahan	File Upload	Status	Aksi
Tri Handayani	16-06-2022	16-06-2022	Tidak mengkilap listrik.	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	
Beni Arbiyanto	10-06-2022	10-06-2022	1. Gardi Oli Mesin 2, Gardi Oli Gardan 3, Gardi Cairan Liquid Collet 4, Gardi Kampas Rem Depan-Belakang 5, Service CVT dan bersihkan Throttle Body 6, Bersihkan Tombak Seklar (Terutama Klakson)	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Beni Arbiyanto	08-06-2022	08-06-2022	tidak bisa starter karena aki soak, interior jemuran, pedal gas tidak bisa saat di injak, seteban gas tidak lumsum, karet wiper sudah getas.	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Beni Arbiyanto	06-06-2022	06-06-2022	gardi oli dan tune up, karet wiper	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	25-05-2022	25-05-2022	karet pada layer pojok bawah kiri	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Beni Arbiyanto	18-05-2022	18-05-2022	Tune up gardi oli	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Anendra Wahyu Pradana	18-05-2022	17-05-2022	PC tidak bisa menyala.	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	
Agus Suherman	11-04-2022	11-04-2022	Gardi Oli, tune Up, gardi Ban 2 pos	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Disetujui	
Puzri Penkas, S.Pd	18-04-2022	18-04-2022	AC Tidak Menyala di Ruang Koordinator Kelompok Substansi Penganggaran	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Selesai	
Beni Arbiyanto	22-04-2022	18-04-2022	tidak bisa masuk windows	Sekretariat Utama	Kosong	Kosong	Pemeriksaan Berhasil	

Gambar 4. 83 Data Pemeliharaan APD Tahun 2022

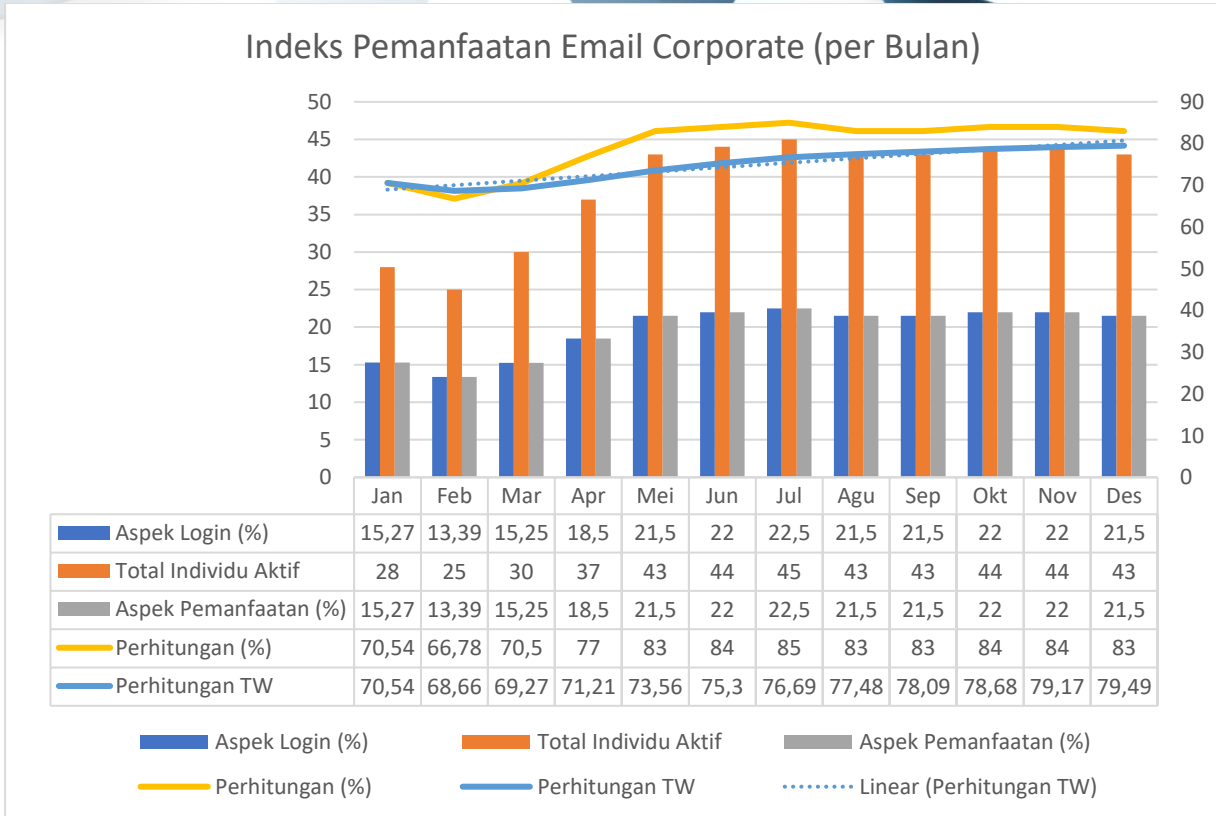
## B. DATA PEMANFAATAN EMAIL *CORPORATE* (*MAIL.POM.GO.ID*) BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2022

Pada tahun 2022, nilai indeks pemanfaatan email corporate (*mail.pom.go.id*) di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan per Triwulan sebagai berikut:



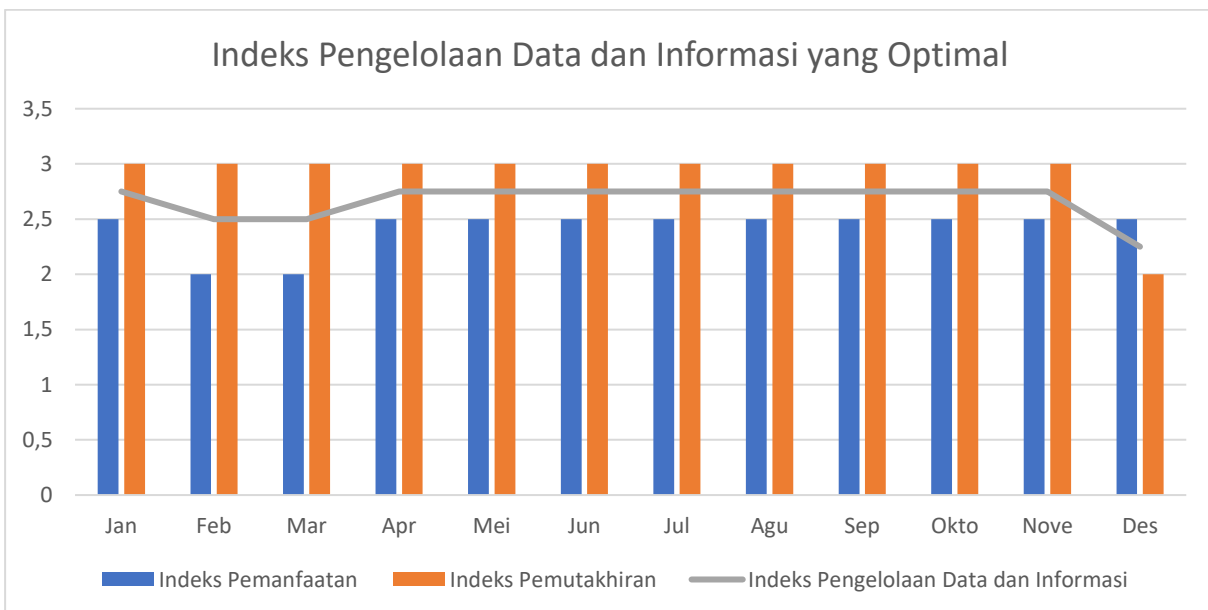
Gambar 4. 84 Indeks Pemanfaatan per Triwulan

Sedangkan data nilai indeks pemanfaatan per Bulan, Pegawai Rorenkeu memporel trend kenaikan selama sepanjang tahun 2022, Adapun data tersebut digambarkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 4. 85 Indeks Pemanfaatan Email Rorenkeu 2022

Rata-rata Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sepanjang tahun 2022 adalah **2,75** setiap bulan memenuhi target bulanan yaitu **2,5**, Adapun grafiknya sebagai berikut:



Gambar 4. 86 Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Rorenkeu selama Tahun 2022



SASARAN KEGIATAN 9:

TERKELOLANYA KEUANGAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SECARA  
AKUNTABEL

IKU 14: TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 14 adalah:

A. SOSIALISASI DAN BIMTEK PENYUSUNAN RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN

BPOM telah melewati beberapa tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2023. Menteri Keuangan telah menerbitkan surat Nomor : S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 September 2022 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran dengan peserta dari unit Pusat dan UPT BPOM. Pada pertemuan tersebut telah disusun KAK, RAB dan data dukung lain yang dibutuhkan pada saat penelaahan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan serta review RKA-K/L oleh APIP. Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan belanja K/L dan kriteria pemanfaatan belanja mendesak K/L, serta langkah-langkah penyesuaian, penelaahan RKA-K/L TA 2023 dan penyusunan KPJM TA 2023 – 2025.



Gambar 4. 87 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2022



Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 September 2022 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, untuk pelaksanaan secara luring di Jakarta dengan peserta meliputi: Para pejabat pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan POM beserta pendamping. Output dari pertemuan ini adalah himpunan data elektronik RKA-K/L Alokasi Anggaran dan Data Dukung Tahun Anggaran 2023 seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM.

Data dukung dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang disusun oleh seluruh Unit direviu oleh APIP/Inspektorat baik dari segi urgensi, efektifitas, efisiensi, dan juga rincian komponen/sub komponen dan kesesuaian penggunaan akun. Kumpulan Arsip Data Komputer yang dihasilkan menjadi konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan digunakan untuk penelaahan *online* oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

## B. MONEV TRIWULAN (EVALUASI INTERNAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN) TAHUN 2022

Ketika Rapat Evaluasi Internal Triwulan IV, apat diketahui bahwa realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2022 tergolong sangat bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu 99,87% sumber dari Aplikasi OMSPAN sesuai SP2D yang terbit per 31 Desember 2022. Sedangkan untuk masing-masing Substansi dari Aplikasi SAKTI Modul Akrual belum termasuk pengembalian realisasi sebagai berikut dalam persen:

	PAGU	REALISASI	% Realisasi
TU	2.132.667.000	2.130.547.089	99,95%
DSP	1.041.129.000	1.040.419.121	99,93%
PERENCANAAN	3.641.576.000	3.641.166.951	99,99%
PENGANGGARAN	3.874.464.000	3.874.209.267	99,99%
MONEV	3.206.539.000	3.201.324.711	99,84%
KEUANGAN	4.293.536.000	4.292.347.058	99,97%
TOTAL	18.189.911.000	18.180.014.197	99,95%

Kesimpulan rapat ini bahwa, realisasi perbulan semakin mendekati RPD yang telah ditetapkan, namun sebaiknya RPD mengikuti dengan ketetapan dari Kemenkeu bukan di plot di akhir-akhir untuk pencairan anggarannya. Realisasi dari Perjanjian Kinerja sudah lebih baik, namun memang paada Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas dan Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM masih menggunakan nilai realisasi tahun 2021 yang keluar di 2022 karena



nilai dari MENPAN belum keluar untuk hasil 2022. Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan belum mencapai target karena Responden yang ditentukan di Aplikasi SAPA-APIP, 50 orang responden dan diambil yang mengisi paling dahulu, sehingga tidak bisa mengetahui responden tersebut pernah menerima jenis layanannya, rata-rata responden menilai di

No	Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Output	Satuan	Volume Output			Anggaran (dalam Ribu)			Ket
			Target	Realisasi	%Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	3159-Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan								
	960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	3.173.796.000	3.170.966.210	99,91%	
	952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	dokumen	15	15	100%	7.516.040.000	7.515.376.218	99,99%	
	953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	dokumen	12	12	100%	3.206.539.000	3.201.324.711	99,84%	
	955.Layanan Manajemen Keuangan	dokumen	9	9	100%	4.293.536.000	4.292.347.058	99,97%	

Gambar 4. 88 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan IV 2022

skala 5 dari range 1 sampai 6. Penilaian terendah ada pada Waktu Penyelesaian Layanan (3,28 nilai maksimal 4) Adapun rencana tindak lanjutnya pada saat pelaksanaan survei memilih 50 responden yang menerima layanan rorenkeu, memperjelas waktu layanan dengan mengumkan di papan pengumuman atau di media social, membuat media konsultasi. Nilai EKA belum sesuai target karena beberapa satker belum melakukan input pada aplikasi DJA.



Gambar 4. 89 Dokumentasi Rapat Evaluasi Internal TW IV 2022



## BAB 5: PENUTUP

Sepanjang tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM yaitu Obat dan “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Pada laporan tahunan 2022 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 9 Sasaran kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu :

- 1) Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas.
- 2) Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.
- 3) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM.
- 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM5.
- 5) Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP
- 6) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 7) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman.
- 8) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
- 9) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
- 10) Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan.
- 11) Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 12) Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 13) Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- 14) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan.



Dari keempat belas indikator, terdapat, 11 indikator dengan kategori **baik** dan 3 indikator dengan kategori **sangat baik**.

Sebagian besar kegiatan-kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf dengan upaya seoptimal mungkin walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, seperti kurangnya tenaga SDM baik secara kuantitas maupun kompetensi dan terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Diharapkan kedepan, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan dukungan seluruh staf dan menjalin kerjasama yang semakin baik dengan pihak-pihak internal di lingkungan Badan POM sendiri maupun eksternal yaitu para *stakeholders*.



☎ 021-4241646

✉ rorenkeu@pom.go.id

🌐 <https://sites.google.com/view/rorenkeu-bpom/>

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN